

SKRIPSI

Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta

Keraton Surakarta Hadiningrat

Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi

Konsentrasi Sosiologi Pembangunan



Oleh:

Itsnaini Nurfaizah

145120100111006

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di
Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Itsnaini Nurfaizah

145120100111006

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA
NIP. 19801018 200604 1 001

Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A
NIK. 2017108709262001

HALAMAN PENGESAHAN

Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di
Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

Disusun oleh:

Itsnaini Nurfaizah
145120100111006

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana

pada tanggal 07 Juni 2018

Tim Penguji :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA
NIP. 19801018 200604 1 001

Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A
NIK. 2017108 70926 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Dhanny S Sutopo, S.Sos., M.Si
NIP. 200906 730915 1 001

Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si
NIK. 2016079 00404 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 19690814 199402 1 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Itsnaini Nurfaizah

NIM : 145120100111006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017 adalah benar-benar karya sendiri. Pada skripsi ini informasi yang bukan karya saya diberi tanda *citasidan* ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh setelah menyelesaikan studi ini.

Malang, 09 Juli 2018

Pembuat pernyataan,

Itsnaini Nurfaizah

145120100111006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan ilmu baru, masukan, kritik saran, dan banyak curahan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini
2. Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing II yang memberikan tambahan semangat dan saran dalam pelaksanaan penelitian
3. Dhanny Sutopo, S.Sos., M.Si dan Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji atas kritik dan sarannya.
4. Ummi, Abah yang selalu memberikan dukungan materiil, moril dan doa.
5. Segenap jajaran Pemerintah dan bawahannya yang telah memberikan Program BIDIKMISI dan mempercayakan saya sebagai salah satu penerimanya, sehingga saya bisa menuntut ilmu dan berhasil menyelesaikannya.
6. Kanjeng Budyaningrat, RM Restu, Gusti Mung, Pak Bambang Ary, Pak Winarno Kusuma selaku narasumber yang banyak membantu dalam proses penelitian ini.
7. Teman, saudara dan kerabat penulis serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas waktu, doa dan motivasinya yang tak ternilai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan sarannya yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di waktu mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Malang, 09 Juli 2018

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk pihak yang selalu mendampingi penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih selalu tercurah pada kalian semua yang telah bersedia menemani setiap langkah penulis dalam suka dan duka

1. Allah SWT atas semua limpahan kasih sayang, kenikmatan, petunjuk yang telah menghantarkan penulis hingga sampai tahap ini. Baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan banyak pembelajaran penting terutama dalam hal kedisiplinan,
2. Ummi, Abah, Sholahuddin Al Ayyubi, Mutiara Nur Laili, Intan AzZahro, RizkiNisfu Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan banyak energi positif selama ini hingga berhasil mencapai tahap ini,
3. Bapak Anton Novenanto secara khusus yang telah memberikan banyak energi positif atas semangat dan penggemblengan mental selama menjalani proses bimbingan hingga memberikan pembelajaran bahwa menulis adalah persoalan ketekunan dan daya tahan mental,
4. Teman-teman sosiologi yang saya sayangi terkhusus kelas A sosiologi untuk banyak cerita hebat selama empat tahun ini,
5. Teman-teman seperantauan Sukoharjo Makmur Tercinta (SKUTER) untuk banyak bantuan, liburan, dan kehangatan seperti di kampung halaman sendiri,
6. Teman-teman organisasi BEM Kabinet Bunga Karya, ISSC, PSDM EM 2015, Jurnalistik, Lingkaran tiap Jum'at, Rumah Belajar Polehan atas banyak pembelajaran dan pengalaman yang hebat sebagai bekal langkah selanjutnya,
7. Teman-teman Kos KertoPamuji 67A dan Pandjaitan Gang 19 No.1 atas banyak keseruan selama ini, semoga selalu memudahkan langkah selanjutnya.

Malang, 09 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
GLOSARIUM.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Aturan adat legitimasi pewaris Tahta.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Konflik Perebutan Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Konsekuensi Suksesi pada Abdi Dalem.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Definisi Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1.4. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Tindakan Sosial sebagai Tindakan Politik menurut Max Weber.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Tiga Dimensi Kekuasaan menurut Steven Lukes.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Kekuasaan dalam Budaya Jawa menurut Ben Anderson.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Materiil Kekuasaan	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Homogenitas Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.

2.2.3.	Limitasi Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.4.	Standarisasi Kekuasaan.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.	Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
BAB IIIMETODE PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
BAB IVGAMBARAN UMUM.....		Error! Bookmark not defined.
4.1.	Tinjauan Awal.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.	Kekuasaan dalam Budaya Jawa	Error! Bookmark not defined.
4.3.	Kekuasaan dalam Keraton Surakarta	Error! Bookmark not defined.
4.4.	Dualisme Standarisasi Kekuasaan	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.	Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Hangabeni	Error! Bookmark not defined.
4.4.2.	Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Tedjowulan ...	Error! Bookmark not defined.
4.5.	Analisis Kelompok dalam Suksesi Politik	Error! Bookmark not defined.
BAB VHASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
5.1.	Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.	Suksesi Politik dan Perebutan Tahta.....	Error! Bookmark not defined.
5.3.	Suksesi dalam Dinasti Mataram.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.	Suksesi di Era Republik.....	Error! Bookmark not defined.
5.5.	Rekonsiliasi Tahun 2012.....	Error! Bookmark not defined.
5.6.	Pasca Rekonsiliasi.....	Error! Bookmark not defined.
5.7.	Rekonsiliasi dan Proses Pengambilan Keputusan..	Error! Bookmark not defined.
BAB VIKESIMPULAN DAN SARAN		Error! Bookmark not defined.
6.1.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
6.2.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Kerja Lapang	38
Tabel 2. Perbedaan Standarisasi Kekuasaan	77



DAFTAR BAGAN

<u>Bagan 1. Kerangka Teori</u>	<u>31</u>
<u>Bagan 2. Relasi Kuasa pada Rekonsiliasi</u>	<u>93</u>
<u>Bagan 3. Relasi Kuasa Pasca Suksesi</u>	<u>97</u>



ABSTRAK

Itsnaini Nurfaizah (2018) Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. Malang. Relasi kuasa abdi dalem pasca suksesi politik dan konflik perebutan tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat sejak tahun 2004 hingga tahun 2017. Pembimbing Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., dan Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A

Penelitian ini membahas perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam Keraton Surakarta menandakan timbulnya kepentingan baru. Kepentingan baru diinternalisasikan pada penghuni keraton tidak terkecuali abdi dalem yang bertindak sebagai pelaku kegiatan adat. Hal ini berpotensi mempengaruhi relasi sosial abdi dalem sebagai dampak dari normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap abdi dalem. Gambaran ini menjadi dasar bahwa suksesi politik dapat mempengaruhi relasi sosial abdi dalem.

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial sebagai tindakan politik dari Weber sebagai dasar pemikiran, teori kekuasaan Jawa Ben Anderson untuk menganalisis tujuan awal masing-masing pihak yang terlibat dalam relasi kuasa dan dibantu oleh teori kekuasaan Steven Lukes untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pihak tersebut untuk mencapai rekonsiliasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penentuan informannya menggunakan teknik *pusposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah diawali dari tokoh dalam tataran Gusti atau putra-putri kerajaan yang bersentuhan langsung dengan konflik yang sedang berlangsung. Para Gusti yang mempunyai strata atau kedudukan yang lebih tinggi daripada sentana dalem maka mampu mempengaruhi pemikiran sentana dalem terlebih konsep *Manunggaling Kawula Gusti* yang mengikuti kehendak gustinya dan *Narima Ing Pandum* (menerima bagian dengan ikhlas) sebagai dasar terjadinya proses relasi kuasa pada abdi dalem dalam menghadapi suksesi politik. Sehingga pemahaman tersebut menyebar dalam kalangan sentana dalem yang merupakan keluarga kerajaan. Tidak terlepas abdi dalem yang mengabdikan hidupnya di Keraton yang bersentuhan langsung dengan para sentana dalem mendapatkan doktrin mengenai raja yang dianggap sah menurut klaim dari masing-masing kubu. Relasi kuasa yang terbangun membawa pemahaman mengenai klaim kebenaran raja yang dianggap sah hingga pada lini yang paling rendah yaitu abdi dalem. Sehingga menciptakan polarisasi dari masing-masing kubu mengenai raja yang dianggap sah.

Kata kunci : Abdi dalem, Keraton, Relasi kuasa, Suksesi politik

ABSTRACT

Itsnaini Nurfaizah (2018), Majoring in Sociology. Faculty of Social and Political Science. Brawijaya of University. Malang. Authority Relations Abdi dalem post-war politics and conflict of succession to the throne at the Surakarta Palace Hadiningrat beginning in 2004 until 2017. Supervisor Dr. Phil. Anton Novenanto, S. Sos., MA and Dewi Puspita Rahayu, S. Sos., M.A

This research discusses about struggle power going on in Surakarta Palace marked the onset of a new interest. The new internalized interests on the occupants of the Palace include Abdi dalem who act as principals of custom events. This potentially affects social relations Abdi dalem as the impact of the operation of the normalization of power against abdi dalem. This review became the basis of political succession that can affect social relations Abdi dalem.

This research uses theories of social action as a political action from Weber as a rationale, Ben Anderson Java power theory to analyze the initial goals of each party involved in the relations of power and aided by theory Steven Lukes power to analyze the party's decision-making process to achieve reconciliation. This research uses qualitative research methods with the case study approach, the determination of the sampling technique using purposive informant.

The results of this study suggest that understanding the truth about claims the King considered valid beginning from the characters in the landscape or sons and daughters of the Kingdom later on get into touch directly with the ongoing conflict. The Gusti which has strata or higher position than Sentana dalem then capable of influencing thought sentana Manunggaling Kawula concept first servant Gusti who followed the will of Gusti Narima and Ing Pandum (receiving sections sincerely) as the basis for the occurrence of power relations in the process of the servant in the face of political succession. So the spread in the understanding among the servants sentana is a Royal family. Inseparable Abdi dalem dedicated his life in indirect contact with the Palace of the Sentana Dalem get the doctrine concerning the King considered valid according to the claims of their respective camps. Relationship power that woke up brings understanding of the truth claims of the King deemed valid until the line that best rendang namely Abdi dalem. Thus creating the polarization of their respective camps about a King who is considered valid.

Key Word : Abdi Dalem, Palace, Struggle Power, Political Succession

GLOSARIUM

1. Abdi dalem : Orang yang mengabdikan diri secara penuh atau separuh hidupnya untuk keberlangsungan keraton
2. Sentana dalem: Orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat menurut silsilah keraton
3. Gusti : Putra atau putri dari keturunan Raja
4. Manunggaling Kawula Gusti : Abdi dalem tunduk patuh pada hierarki teratas yang dimiliki oleh Raja dalam lingkup Keraton
5. Narima Ing Pandum : Menerima bagian dengan ikhlas tanpa mengharap suatu apapun
6. Tinggalan JumenenganDalem: Serangkaian acara digelar untuk meresmikan Raja yang akan bertakhta di Keraton Surakarta
7. ndherekkersandalem: Tunduk patuh pada kehendak Raja
8. Wenang misesaingsanagari : Pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri
9. Agung binathara: Sebesar kekuasaan Dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia
10. Sangkanparaning Djumadi : Yang berarti pemberi kehidupan

HALAMAN PERSETUJUAN

Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di
Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Itsnaini Nurfaizah
145120100111006

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA
NIP. 19801018 200604 1 001

Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A
NIK. 2017108 70926 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di
Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

Disusun oleh:

Itsnaini Nurfaizah
145120100111006

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian sarjana

pada tanggal 07 Juni 2018

Tim Penguji :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA
NIP. 19801018 200604 1 001

Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A
NIK. 2017108 70926 2 001

Penguji I,

Penguji II,

Dhanny S Sutopo, S.Sos., M.Si
NIP. 200906 730915 1 001

Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si
NIK. 2016079 00404 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak
NIP. 19690814 199402 1 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Itsnaini Nurfaizah

NIM : 145120100111006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017 adalah benar-benar karya sendiri. Pada skripsi ini informasi yang bukan karya saya diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh setelah menyelesaikan studi ini.

Malang, 09 Juli 2018

Pembuat pernyataan,

Itsnaini Nurfaizah

145120100111006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Relasi Kuasa Abdi Dalem Pasca Suksesi Politik dan Konflik Perebutan Tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat Sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2017

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan doa dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan ilmu baru, masukan, kritik saran, dan banyak curahan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini
2. Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing II yang memberikan tambahan semangat dan saran dalam pelaksanaan penelitian
3. Dhanny Sutopo, S.Sos., M.Si dan Wida Ayu Puspitosari, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji atas kritik dan sarannya.
4. Ummi, Abah yang selalu memberikan dukungan materiil, moril dan doa.
5. Segenap jajaran Pemerintah dan bawahannya yang telah memberikan Program BIDIKMISI dan mempercayakan saya sebagai salah satu penerimanya, sehingga saya bisa menuntut ilmu dan berhasil menyelesaikannya.
6. Kanjeng Budyaningrat, RM Restu, Gusti Mung, Pak Bambang Ary, Pak Winarno Kusuma selaku narasumber yang banyak membantu dalam proses penelitian ini.
7. Teman, saudara dan kerabat penulis serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas waktu, doa dan motivasinya yang tak ternilai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan sarannya yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di waktu mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Malang, 09 Juli 2018

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk pihak yang selalu mendampingi penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih selalu tercurah pada kalian semua yang telah bersedia menemani setiap langkah penulis dalam suka dan duka

1. Allah SWT atas semua limpahan kasih sayang, kenikmatan, petunjuk yang telah menghantarkan penulis hingga sampai tahap ini. Baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan banyak pembelajaran penting terutama dalam hal kedisiplinan,
2. Ummi, Abah, Sholahuddin Al Ayyubi, Mutiara Nur Laili, Intan Az Zahro, Rizki Nisfu Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, doa, dan banyak energi positif selama ini hingga berhasil mencapai tahap ini,
3. Bapak Anton Novenanto secara khusus yang telah memberikan banyak energi positif atas semangat dan penggemblengan mental selama menjalani proses bimbingan hingga memberikan pembelajaran bahwa menulis adalah persoalan ketekunan dan daya tahan mental,
4. Teman-teman sosiologi yang saya sayangi terkhusus kelas A sosiologi untuk banyak cerita hebat selama empat tahun ini,
5. Teman-teman seperantauan Sukoharjo Makmur Tercinta (SKUTER) untuk banyak bantuan, liburan, dan kehangatan seperti di kampung halaman sendiri,
6. Teman-teman organisasi BEM Kabinet Bunga Karya, ISSC, PSDM EM 2015, Jurnalistik, Lingkaran tiap Jum'at, Rumah Belajar Polehan atas banyak pembelajaran dan pengalaman yang hebat sebagai bekal langkah selanjutnya,
7. Teman-teman Kos Kerto Pamuji 67A dan Pandjaitan Gang 19 No.1 atas banyak keseruan selama ini, semoga selalu dimudahkan langkah selanjutnya.

Malang, 09 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
GLOSARIUM.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Aturan adat legitimasi pewaris Tahta.....	1
1.1.2. Konflik Perebutan Kekuasaan.....	2
1.1.3. Konsekuensi Suksesi pada Abdi Dalem.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Definisi Konseptual	9
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.1.1. Tindakan Sosial sebagai Tindakan Politik menurut Max Weber.....	13
2.1.2. Tiga Dimensi Kekuasaan menurut Steven Lukes	18
2.1.3. Kekuasaan dalam Budaya Jawa menurut Ben Anderson.....	23
2.2. Kerangka Teori	26
2.2.1. Materiil Kekuasaan	27
2.2.2. Homogenitas Kekuasaan.....	28
2.2.3. Limitasi Kekuasaan.....	29
2.2.4. Standarisasi Kekuasaan.....	30
2.3. Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	45

4.1.	Tinjauan Awal.....	45
4.2.	Kekuasaan dalam Budaya Jawa	46
4.3.	Kekuasaan dalam Keraton Surakarta	47
4.4.	Dualisme Standarisasi Kekuasaan	54
4.4.1.	Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Hangabeni	55
4.4.2.	Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Tedjowulan	61
4.5.	Analisis Kelompok dalam Suksesi Politik	74
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....		78
5.1.	Pengantar.....	78
5.2.	Suksesi Politik dan Perebutan Tahta	78
5.3.	Suksesi dalam Dinasti Mataram.....	79
5.4.	Suksesi di Era Republik	83
5.5.	Rekonsiliasi Tahun 2012.....	92
5.6.	Pasca Rekonsiliasi.....	96
5.7.	Rekonsiliasi dan Proses Pengambilan Keputusan.....	102
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		105
6.1.	Kesimpulan	105
6.2.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Kerja Lapang	38
Tabel 2. Perbedaan Standarisasi Kekuasaan	77



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori	31
Bagan 2. Relasi Kuasa pada Rekonsiliasi	93
Bagan 3. Relasi Kuasa Pasca Suksesi	97



ABSTRAK

Itsnaini Nurfaizah (2018) Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya. Malang. Relasi kuasa abdi dalem pasca suksesi politik dan konflik perebutan tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat sejak tahun 2004 hingga tahun 2017. Pembimbing Dr. Phil. Anton Novenanto, S.Sos., dan Dewi Puspita Rahayu, S.Sos., M.A

Penelitian ini membahas perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam Keraton Surakarta menandakan timbulnya kepentingan baru. Kepentingan baru diinternalisasikan pada penghuni keraton tidak terkecuali abdi dalem yang bertindak sebagai pelaku kegiatan adat. Hal ini berpotensi mempengaruhi relasi sosial abdi dalem sebagai dampak dari normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap abdi dalem. Gambaran ini menjadi dasar bahwa suksesi politik dapat mempengaruhi relasi sosial abdi dalem.

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial sebagai tindakan politik dari Weber sebagai dasar pemikiran, teori kekuasaan Jawa Ben Anderson untuk menganalisis tujuan awal masing-masing pihak yang terlibat dalam relasi kuasa dan dibantu oleh teori kekuasaan Steven Lukes untuk menganalisis proses pengambilan keputusan pihak tersebut untuk mencapai rekonsiliasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penentuan informannya menggunakan teknik *puspositive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah diawali dari tokoh dalam tataran Gusti atau putra-putri kerajaan yang bersentuhan langsung dengan konflik yang sedang berlangsung. Para Gusti yang mempunyai strata atau kedudukan yang lebih tinggi daripada sentana dalem maka mampu mempengaruhi pemikiran sentana dalem terlebih konsep *Manunggaling Kawula Gusti* yang mengikuti kehendak gustinya dan *Narima Ing Pandum* (menerima bagian dengan ikhlas) sebagai dasar terjadinya proses relasi kuasa pada abdi dalem dalam menghadapi suksesi politik. Sehingga pemahaman tersebut menyebar dalam kalangan sentana dalem yang merupakan keluarga kerajaan. Tidak terlepas abdi dalem yang mengabdikan hidupnya di Keraton yang bersentuhan langsung dengan para sentana dalem mendapatkan doktrin mengenai raja yang dianggap sah menurut klaim dari masing-masing kubu. Relasi kuasa yang terbangun membawa pemahaman mengenai klaim kebenaran raja yang dianggap sah hingga pada lini yang paling rendah yaitu abdi dalem. Sehingga menciptakan polarisasi dari masing-masing kubu mengenai raja yang dianggap sah.

Kata kunci : Abdi dalem, Keraton, Relasi kuasa, Suksesi politik

ABSTRACT

Itsnaini Nurfaizah (2018), Majoring in Sociology. Faculty of Social and Political Science. Brawijaya of University. Malang. Authority Relations Abdi dalem post-war politics and conflict of succession to the throne at the Surakarta Palace Hadiningrat beginning in 2004 until 2017. Supervisor Dr. Phil. Anton Novenanto, S. Sos., MA and Dewi Puspita Rahayu, S. Sos., M.A

This research discusses about struggle power going on in Surakarta Palace marked the onset of a new interest. The new internalized interests on the occupants of the Palace is include Abdi dalem who act as principals of custom events. This potentially affects social relations Abdi dalem as the impact of the operation of the normalization of power against abdi dalem. This review became the basis of political succession that can affect social relations Abdi dalem.

This research uses theories of social action as a political action from Weber as a rationale, Ben Anderson Java power theory to analyze the initial goals of each party involved in the relations of power and aided by theory Steven Lukes power to analyze the party's decision-making process to achieve reconciliation. This research uses qualitative research methods with the case study approach, the determination of the sampling technique using purposive informant.

The results of this study suggest that understanding the truth about claims the King considered valid beginning from the characters in the landscape or sons and daughters of the Kingdom later on get in touch directly with the on going conflict. The Gusti which has strata or higher position than Sentana dalem then capable of influencing thought sentana Manunggaling Kawula concept first servant Gusti who followed the will of Gusti Narima and Ing Pandum (receiving section sincerely) as the basis for the occurrence of power relations in the process of the servant in the face of political succession. So the spread in the understanding among the servants sentana is a Royal family. Inseparable Abdi dalem dedicated his life in direct contact with the Palace of the Sentana Dalem get the doctrine concerning the King considered valid according to the claims of their respective camps. Relationship power that woke up brings understanding of the truth claims of the King deemed valid until the line that best rendang namely Abdi dalem. Thus creating the polarization of their respective camps about a King who is considered valid.

Key Word : Abdi Dalem, Palace, Struggle Power, Political Succession

GLOSARIUM

1. Abdi dalem : Orang yang mengabdikan diri secara penuh atau separuh hidupnya untuk keberlangsungan keraton
2. Sentana dalem : Orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat menurut silsilah keraton
3. Gusti : Putra atau putri dari keturunan Raja
4. Manunggaling Kawula Gusti : Abdi dalem tunduk patuh pada hierarki teratas yang dimiliki oleh Raja dalam lingkup Keraton
5. Narima Ing Pandum : Menerima bagian dengan ikhlas tanpa mengharap suatu apapun
6. Tinggalan Jumenengan Dalem : Serangkaian acara digelar untuk meresmikan Raja yang akan bertakhta di Keraton Surakarta
7. ndherek kersa ndalem : Tunduk patuh pada kehendak Raja
8. Wenang misesa ing sanagari : Pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri
9. Agung binathara : Sebesar kekuasaan Dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia
10. Sangkan paraning Djumadi : Yang berarti pemberi kehidupan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1. 1. 1. Aturan adat legitimasi pewaris Tahta

Raja Keraton Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Sri Paku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdulrahman Sayidin Panatagama. Raja berkedudukan tinggi dan harus dihormati. Gelar yang disandang memperlihatkan bahwa kekuasaan Raja tidak hanya mencakup urusan pemerintahan akan tetapi panglima tinggi angkatan perang (Senapati Ing Ngalaga), bidang keagamaan (Ngabdulrahman Sayidin Panatagama) serta wakil Allah di dunia (Khalifatullah).

Tingginya kedudukan Raja, sehingga muncul legitimasi-legitimasi yang memungkinkan putra pangeran yang berhak mewarisi takhta Keraton. Selain pulung atau wahyu, serangkaian pendidikan juga harus dilewati oleh calon Raja. Mereka akan dididik lebih dari satu guru dalam berbagai keahlian, etika dan kerohanian sebagai bekal calon pengganti Raja (Eviana, 2012:03).

Sebagian besar calon pengganti Raja pada Dinasti Mataram adalah putra tertua dari permaisuri dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunagara Sudibya Rajaputra Narendra. Kedudukan dari Adipati Anom ini berada di bawah Raja sehingga dapat melakukan peran penting, memiliki kekuasaan, hak kewajiban, keuntungan materiil, dan prestise yang lebih tinggi dari Putera raja yang lain. Bila Raja tidak memiliki Putera dari Permaisuri maka

dialihkan pada adik raja yang lahir dari permaisuri. Apabila adik yang dimaksudkan tidak ada maka yang berhak adalah paman yang lahir dari permaisuri. Jika paman yang dimaksud tidak ada maka kedudukan diberikan pada putra sulung raja yang lahir dari selir. Selain itu calon pengganti raja wajib Salat Jumat di Masjid Agung Keraton tujuh kali berturut-turut. Selain itu pergantian kekuasaan akan dilakukan setelah raja mangkat, hal ini berarti Raja akan berkuasa hingga meninggal dunia (Antlöv, 2011:34).

Penobatan raja di Keraton Surakarta dilaksanakan melalui dewan adat melalui upacara *Tinggalan Jumenengan Dalem*. Serangkaian acara digelar untuk meresmikan Raja yang akan bertakhta di Keraton Surakarta.

1. 1. 2. Konflik Perebutan Kekuasaan

Dalam sejarah dinasti Mataram, Raja yang berkuasa menerapkan poligami. Raja memiliki istri permaisuri (prameswari), serta istri selir yang disebut *garwa ampeyan*, *garwa pangrembe*, *garwa paminggir*, atau *priyantun dalem*. Hal ini bertujuan membangun kekuatan kekuasaan (*man power*) mengingat kekuasaan raja-raja di Jawa sangat luas. Dengan beristri banyak maka diharapkan memiliki banyak anak. Namun hal ini justru dapat menimbulkan perebutan kekuasaan antar putra pangeran. Terlebih hukum adat Keraton Surakarta belum dituangkan dalam peraturan secara tertulis. Sehingga dapat menuai kontroversi mengenai pewaris kekuasaan yang sah.

Suksesi perebutan kekuasaan terjadi sejak 2004 oleh dua kubu yaitu Paku Buwana XII Hangabeni yang berkedudukan di Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwana XII Tedjowulan yang berbasis di Kota Barat. Hal ini disebabkan

karena keduanya sama-sama mengklaim sebagai pewaris Keraton yang sah. Paku Buwana XII memiliki enam selir dan dikaruniai tiga puluh lima anak terdiri dari lima belas orang putra dan dua puluh orang putri. Dari keenam selir tersebut tidak ada yang menjadi permaisuri, sehingga kedudukan antar selir sama derajatnya. Prahara ini terus berlangsung hingga babak baru yang menyebabkan kondisi Keraton Surakarta tidak stabil. Perebutan kekuasaan ini masih berlangsung walaupun sudah sempat terjadi rekonsiliasi pada tahun awal bulan Mei 2012. Tedjowulan mendukung kepemimpinan Hangabeni yang memang lebih tua darinya, sementara Tedjowulan mendapat gelar Mahapatih Keraton Surakarta. Namun situasi kembali memanas ketika kubu Hangabeni dengan *sentata dalem* (keluarga kerajaan) menolak Tedjowulan dinobatkan menjadi Mahapatih dan membubarkan secara paksa acara *Tinggalan Jumenengan Dalem* atau ulang tahun penobatan Raja (Solopos, 20 Maret 2017).

Setelah berhasil dimediasi oleh berbagai pihak kemudian kembali muncul konflik pada tahun 2014. Berawal dari adanya laporan Hangabeni yang melakukan tindakan *human trafficking* pada anak di bawah umur (Liputan6, 21 Maret 2017). Atas alasan mengalami sakit permanen stroke yang menyerah ingatan dan tidak mampu berbicara Hangabeni mendapat pengampunan berdasarkan ketentuan pasal 1330 KUHPerdara. Oleh karena itu Dewan Adat akhirnya membentuk Pelaksana tugas (Plt) yang diserahkan pada Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGHP) Puger pada April 2015 yang menjalankan tugas Hangabeni sebagai Raja. Namun dari pihak Hangabeni tidak mengakui adanya Plt tersebut dan dua pihak ini mengadakan dua acara pelantikan *Tinggalan Jumenengan Dalem*.

Hangabeni kemudian membentuk Tim Lima yang dikukuhkan pada tanggal 26 Februari 2017 yang disaksikan oleh banyak pihak, tim ini nantinya bertugas membantu keberlangsungan Keraton Surakarta. Dewan Adat melakukan gugatan atas terbentuknya Tim Lima tersebut karena, posisi Hangabeni yang terampuni atas tuntutan *human trafficking* sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum. Namun Raja membentuk Tim Lima yang justru memperkeruh konflik internal. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mengucurkan dana upacara adat dua ratus juta dan gaji untuk abdi dalem Keraton senilai sembilan ratus juta. Pembentukan Tim Lima tersebut menyebabkan kerugian imaterial satu milyar rupiah dan materiil hingga total kerugiannya adalah dua milyar seratus juta rupiah. Ini tentunya akan berimbas pada abdi dalem selaku bagian dari Keraton yang menjalankan setiap acara adat dan segala keperluan Keraton itu sendiri.

1. 1. 3. Konsekuensi Suksesi pada Abdi Dalem

Kehidupan Keraton, terutama Keraton Surakarta Hadiningrat tidak lepas dari peran abdi dalem yang setia dengan prinsip *manunggaling kawula gusti*. Kesetiaan dari abdi dalem melakukan pengabdian dengan berbagai gelar dan predikat kebangsawanannya di lingkungan kekerabatan Surakarta. Abdi dalem yang melakukan pengabdian selama belasan bahkan hingga puluhan tahun, meskipun Keraton saat ini sudah tidak lagi memiliki kemampuan memberikan gaji. Hal ini memang tidak sesuai dengan kerja keras dan pengorbanan dari abdi dalem.

Prinsip seorang abdi dalem adalah suatu hal yang sama halnya dengan bertapa tanpa mengharap imbalan upah apa pun dengan sukarela dan terus mengabdikan dalam situasi apa pun yang dihadapi oleh keraton. Kebanyakan dari abdi

dalem melakukan pengabdian selama belasan bahkan hingga puluhan tahun. Meskipun Keraton sudah tidak berkemampuan memberikan gaji, namun animo abdi dalem cukup besar. Pengabdian didasari oleh semangat pengabdian, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk *ngurip-nguripi* (menghidupkan suasana) Keraton (Suara Merdeka, 28 Februari 2004). Sikap *nrimo* (menerima) yang diterapkan oleh abdi dalem dalam melakukan pengabdian yang berlangsung hingga sekarang.

Tindakan pengabdian sebagai suatu refleksi dari budaya Jawa yang menempatkan Keraton sebagai sentral dari kehidupan. Abdi dalem melakukan pengabdian karena membutuhkan berkah, ketenteraman dan ketenangan dari pusat kehidupan. Dengan orientasi ini upah yang minim tidak diperhitungkan. Selain itu mengabdikan dipengaruhi juga oleh tiga ciri utama abdi dalem atau pegawai Keraton yang harus dimiliki, yakni: kesetiaan (*setya*), kerendahan hati (*sadu*), dan kesungguhan (*tuhu*) (Lombard, 2005: 165).

Dalam melakukan pengabdian abdi dalem Keraton Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu: *anon-anon* dan *garap*. *Anon-anon* adalah abdi dalem yang mengabdikan dari luar keraton. Para abdi dalem menghadap ke keraton jika ada suatu tugas atau jadwal untuk menghadap (*sowan*). Sesuai dengan pekerjaannya, abdi dalem *anon-anon* tidak mendapatkan upah. Untuk abdi dalem *anon-anon* mempunyai tugas lebih keluar yaitu menyebarkan, melestarikan kebudayaan Jawa pada masyarakat. Abdi dalem *anon-anon* masih termasuk kerabat Keraton yang mendapatkan pangkat karena telah berjasa terhadap Keraton.

Abdi dalem *garap* yaitu abdi dalem yang mengabdikan di dalam keraton dan menghadap ke keraton sehari-hari menurut jadwal. Abdi dalem ini mendapatkan

gaji dari Keraton sesuai dengan pangkat yang disandangnya. Mereka kebanyakan mempunyai tugas dalam hal pemeliharaan, kebersihan lingkungan serta inventaris Keraton Surakarta. Selain itu abdi dalem memiliki peran dalam melestarikan budaya Jawa seperti tata krama, busana adat, dan perilaku yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari.

Abdi dalem menerima gaji dari Keraton antara Rp 70.000 dan Rp 600.000 per bulan, mengikuti bidangnya masing-masing. Gaji yang diterima abdi dalem tersebut sangat jauh dari UMR Surakarta yaitu Rp 1.534.985,00. Abdi dalem berdasarkan pangkatnya dibedakan menjadi dua. Pertama, Kartiprojo sebutan bagi pangkat rendah mulai Lurah hingga Kanjeng Aryo Tumenunggug besarnya gaji yaitu di bawah Rp 100.000. Kedua, Sentono yaitu kerabat Keraton yang disebut Kanjeng Raden Aryo sampai pangkat tertinggi yaitu Kanjeng Gusti yang mendapatkan gaji kisaran Rp 100.000 hingga Rp 600.000 sesuai dengan masa pengabdian (Liputan6, 18 Maret 2017).

Menurut Sudaryanto (2008:164), abdi dalem mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan mengikuti upacara adat, keterlibatannya ini akan berpengaruh pada proses kenaikan pangkat. Adapun motivasi dari abdi dalem yang terdapat dalam penelitian ini, adalah *pertama* mencari ketenteraman dan ketenangan hidup. Berpedoman pada prinsip *narima ing pandum* (terimalah bagianmu secara ikhlas, jangan iri dengan yang lain) meyakini kaya dan miskin, rezeki yang kecil semua adalah takdir. *Kedua*, mereka mencari berkah dari Sultan, karena dianggap mampu menuntut manusia untuk hidup tenang, kecukupan, dan selamat hidup. *Ketiga*, yaitu mempertahankan identitas diri dan pelestarian budaya

tata krama, karena menjalani kehidupan yang pasrah (apa adanya) merupakan budi pekerti dasar dalam kehidupan. *Keempat*, abdi dalem diperbolehkan menempati tanah milik sultan (tanah magersari), sehingga ada kewajiban moral untuk membalas budi kebaikan dengan mengabdikan diri pada keraton. *Kelima*, meneruskan tradisi warisan nenek moyangnya, yang menjumpai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Bagi abdi dalem sudah menjadi kewajiban untuk mempertahankannya warisan tersebut.

Penelitian Fadzar Alimin (2007:27) melihat dinamika psikologis abdi dalem pasca suksesi di Keraton Surakarta menunjukkan terjadi kebimbangan, waswas, tidak tenang pada abdi dalem pasca suksesi yang menghasilkan dua raja. Namun setelah kembali pada prinsip pengabdian, abdi dalem kembali mengabdikan dengan tenang seperti sebelum peralihan kekuasaan. Tidak ada konsekuensi yang berat akibat peralihan kekuasaan terhadap abdi dalem, walaupun mengalami kecemasan, kebingungan dan keraguan mereka tetap mengabdikan kepada Keraton Surakarta.

Terlepas dari siapa yang akan memimpin Keraton Surakarta secara sah, konflik pewarisan kepemimpinan itu memiliki efek pada kehidupan abdi dalem. Diperkuat dengan persepsi abdi dalem tentang proses yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam memperhatikan pekerjaan abdi dalem dengan memberikan bantuan, imbalan atas prestasi kerja. Dalam mempengaruhi abdi dalem, meningkatkan motivasi dan menanamkan komitmen dilakukan dengan memberikan inspirasi, rangsangan intelektual maupun pertimbangan secara individu yang diarahkan pada upaya pencapaian tujuan organisasi (Nurchayyo, 2016:20).

Apabila dalam masyarakat timbul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan dalam pola kehidupan politik. Pergerakan perubahan menyebabkan orientasi kepada nilai-nilai baru yang timbul sebagai akibat pergeseran golongan dan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat (Budiardjo, 2008:19).

Perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam Keraton Surakarta menandakan timbulnya kepentingan baru. Kepentingan baru diinternalisasikan pada penghuni keraton tidak terkecuali abdi dalem yang bertindak sebagai pelaku kegiatan adat. Hal ini berpotensi mempengaruhi pada relasi sosial abdi dalem sebagai dampak dari normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap abdi dalem. Gambaran ini menjadi dasar bahwa suksesi politik dapat mempengaruhi relasi sosial antar abdi dalem. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena sebagaimana yang telah dipaparkan di awal bahwa keraton tidak akan lepas dari keberadaan abdi dalem. Terlebih melalui kegiatan *Tinggalan Jumenengan Dalem* abdi dalem sebagai pelaksana kegiatan adat dapat memunculkan klaim-klaim kebenaran untuk mendukung salah satu pihak atau berada pada pihak di tengah. Penelitian ini melihat relasi kuasa sebagai konsekuensi akibat terjadinya suksesi politik di Keraton Surakarta. Penting untuk mengetahui klaim-klaim kebenaran yang timbul dari abdi dalem dalam menghadapi suksesi politik di Keraton Surakarta, sehingga dapat memetakan klaim-klaim mengenai Raja yang sah menurut sudut pandang abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat di Keraton Surakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana relasi kuasa abdi dalem pasca suksesi politik dan konflik perebutan tahta di Keraton Surakarta Hadiningrat sejak tahun 2004 hingga tahun 2017?

1.3. Definisi Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan konsep “kekuasaan” yang hadir dalam relasi kekuasaan menurut Steven Lukes sebagai kunci dan mengombinasikannya dengan pendapat Ben Anderson tentang relasi kekuasaan dalam budaya Jawa. Kedua tokoh tersebut memandang kekuasaan merujuk pada tingkah laku seorang akan mempengaruhi tingkah laku pihak lain.

Lukes memformulasikan kekuasaan merujuk pada tingkah laku yang beraturan, bahwa tingkah laku seorang agen akan mempengaruhi tingkah laku agen lain. Namun menolak pandangan pluralis yang terlalu menekankan konflik aktual. Hal ini karena kekuasaan dapat digunakan dalam situasi konflik potensial dan laten yang tidak akan menjadi aktual (Lukes, 2005:28). Konflik laten terjadinya karena ketidaksesuaian antara kepentingan penguasa dan objek yang tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan.

Kekuasaan dapat pula digunakan secara kolektif, karena gejala tindakan kolektif yang muncul dari permukaan tidak memperlihatkan ciri keputusan tingkah laku individu. Sehingga pandangan Lukes (2005:28) menekankan bahwa untuk mengetahui penggunaan kekuasaan oleh individu atau sekelompok aktor melalui konflik laten dalam mencapai kepentingan penguasa.

Berbeda dengan kekuasaan dalam tradisi Jawa yaitu, sesuatu yang konkret di luar dari diri individu secara mandiri sebagai suatu daya permanen dari alam semesta. Indikator seorang dinyatakan berkuasa apabila mempunyai hak kepemilikan atas benda-benda dan orang-orang dengan kekuatan besar. Seorang yang berkuasa harus menjadi pusat dari kekuatan besar, sehingga mampu diserap untuk memperkuat diri (Anderson, 2006:24). Selain itu berkemampuan dalam mengonsentrasikan kekuatan personal dalam menyerap kekuatan dari luar dan mengharmonisasi gejolak dalam diri agar tidak menjadi difraksi. Kekuatan kosmos penguasa yang ideal dalam tradisi budaya Jawa mampu menyerap semua elemen yang bertentang di alam semesta dan mengumpulkan dalam karakternya sehingga berwujud suatu karismatik penguasa.

Kedua tokoh tersebut memandang kekuasaan merujuk pada tingkah laku agen yang berpengaruh pada tingkah laku agen lain. Namun dalam penelitian akan menggunakan teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Anderson karena lebih sesuai dengan kondisi sosial yaitu kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa. Hal ini dikarenakan relasi kekuasaan dalam budaya Jawa yang dikemukakan Anderson (2006:26), menyangkut peran benda-benda yang dikeramatkan dan penghuni Keraton dengan berbagai tugasnya yang menyimpan kekuatan besar.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk :

- Untuk mengetahui dan memetakan klaim-klaim kebenaran yang muncul dari abdi dalem saat dihadapkan pada suksesi politik
- Memberikan sumbangan pemikiran pada mata kuliah sosiologi politik mengenai pola relasi kuasa abdi dalem saat dihadapkan dengan suksesi politik

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Adapun manfaat penelitian ini secara akademik untuk melihat relasi kuasa abdi dalem dalam menghadapi perebutan takhta di Keraton Surakarta. Sehingga akan diperoleh tipologi aktor yang berperan dalam relasi kuasa tersebut beserta tujuan dan sumber kuasanya. Selain itu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap sosiologi politik yang belum terlalu mendalami perihal tindakan sosial sebagai suatu tindakan politik. Sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai relasi kuasa abdi dalem saat menghadapi suksesi politik. Abdi dalem selama ini dianggap sebagai aktor yang di dominasi oleh kekuasaan ternyata terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton Surakarta. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara akademis pada ilmu yang terkait. Sumbangan yang dimaksud dapat berupa rujukan awal pada penelitian lanjutan hingga pengembangan mata kuliah terkait. Peneliti juga berharap mampu mempermudah peneliti dengan tema serupa, khususnya yang melihat relasi kuasa.

b. Manfaat Praktis

Selain secara akademis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan praktek bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi. Selain sebagai sumber informasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan mengenai situasi perebutan takhta Keraton Surakarta sebagai salah satu dari beberapa keraton yang masih bertahan di Indonesia. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyikapi perebutan kekuasaan dengan menggunakan pendekatan relasi kuasa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1. Tindakan Sosial sebagai Tindakan Politik menurut Max Weber

Salah satu tokoh sosiologi klasik yang membahas tentang kekuasaan sebagai bentuk kunci dari relasi sosial adalah Max Weber. Bagi Weber, Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kekuatan dan kemampuan manusia sebagai subjek yang berkuasa dan mempunyai peran dalam menentukan posisinya saat dihadapkan pada sebuah struktur (Giddens, 1972:40-45). Sehingga yang menjadi fokus kajian Weber adalah melihat tindakan sosial bermakna dan berfokus pada tindakan aktor saat berhadapan dengan struktur sosial tertentu.

Tindakan sosial adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat disertai tujuan tertentu (Giddens, 1995:20-22) . Di lain sisi manusia memiliki orientasi melampaui batas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan terus menerus akan melampaui tujuan yang lebih besar. Hal ini terdapat suatu agenda untuk mempengaruhi pihak lain bahwa agar dianggap menjadi pihak yang mampu dalam melampaui batas tujuan, hal inilah yang menjadikan tindakan sosial juga merupakan tindakan politis. Terdapat dimensi kekuasaan untuk mempengaruhi pihak lain agar mencapai tujuannya yang merupakan kunci bagi setiap tindakan sosial seseorang. Abdi dalem menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan adat memiliki tujuan lain untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam suksesi politik. Tujuan dari

tindakan ini untuk mengembalikan kondisi harmonis dalam internal keraton yang dilakukan dengan penuh perhitungan dan perencanaan yang matang.

Tindakan rasionalitas instrumental yang dipaparkan oleh Weber sebagai tindakan diarahkan untuk melampaui tujuan tertentu dan diterapkan. Tindakan ini menjadi suatu tindakan politik karena adanya keinginan untuk melampaui batas dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan paham *manunggaling kawula gusti* yang dimilikinya maka abdi dalem patuh pada hierarki teratas yang dimiliki oleh Raja dalam lingkup Keraton. Walaupun demikian abdi dalem juga bertindak sebagai perantara yang menjembatani Raja terhadap rakyat sekitar. Keadaan ini memungkinkan abdi dalem untuk mempengaruhi perubahan kultural masyarakat terutama terlihat pada beberapa paguyuban yang diinisiasi oleh abdi dalem terdidik yang menjadi tonggak restorasi Keraton dalam menyikapi suksesi politik.

Dalam hal ini abdi dalem melakukan tindakan pengabdian dalam rangka mempertahankan tradisi adat di Keraton Surakarta. Namun saat terjadi suksesi politik dan perebutan kekuasaan peran abdi dalem semakin terlihat. Tujuan awal abdi dalem yang hanya untuk mempertahankan tradisi adat Keraton mulai menguatkan kembali formasi Paguyuban Abdi Dalem Keraton Surakarta dalam menyikapi suksesi politik. Abdi dalem mulai terlibat dalam pembicaraan mengenai kondisi abdi dalem. Pembicaraan yang dilakukan saat menjalankan tugas di Keraton Surakarta ini menjadi titik awal kepedulian abdi dalem terhadap suksesi Keraton Surakarta.

Abdi dalem memberikan kontrol dalam upacara adat *Tinggalan Jumenengan Dalem* yang digelar untuk meresmikan Raja yang akan bertakhta di Keraton Surakarta. Hal ini karena abdi dalem bertindak sebagai pelaksana kegiatan adat yang berwenang dalam mengatur jalannya upacara adat. Kekuasaan seperti yang diungkapkan oleh Weber (dalam Giddens 1995:34) dipahami sebagai tindakan politik dipahami sebagai tindakan sosial yang harus dicapai, dipertahankan dan direproduksi terus menerus tanpa membutuhkan penerimaan sosial formal untuk memenuhi kebutuhan aktor penguasa.

Abdi dalem pada masa kemerdekaan Negara Republik Indonesia memiliki kesempatan dan keleluasaan dalam menentukan hidupnya. Sehingga pengabdian abdi dalem pada masa sekarang didorong oleh kesadaran pribadi. Abdi dalem tidak lagi bergantung pada tuntutan politis dan status sosial seperti pada masa kerajaan masih berlangsung. Sehingga tindakan pengabdian tersebut didasari untuk melampaui orientasi masyarakat saat ini yang mengejar keuntungan. Identitas abdi dalem yang bersifat aktif sebagai pelestari budaya. Hal ini dilakukan untuk mencari keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Abdi dalem menjalankan tugas sebagai pelestari budaya dengan solidaritas yang didasari tanggung jawab, keinginan untuk memajukan, dan saling menghormati.

Suksepsi politik yang dikhawatirkan mengganggu keharmonisan Keraton, mendorong abdi dalem untuk bertindak melalui penguatan-penguatan internal abdi dalem. Penguatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai diharmonisasi Keraton Surakarta. Sumbangan pemikiran yang didasarkan pada

tradisi luhur yang diajarkan oleh pendahulu yang masih relevan dalam menjawab permasalahan saat ini.

Selain abdi dalem, aktor yang berperan dalam struktur relasi kuasa, terdapat Raja memiliki wewenang tradisional merupakan wewenang berdasarkan legitimasi kesucian suatu tradisi tertentu dalam masyarakat. Kepercayaan pada otoritas tersebut didasarkan pada kepercayaan pada tradisi leluhur sehingga mengarah pada hubungan kekeluargaan. Takhta kerajaan didasarkan pada hubungan keturunan. Ada kesadaran seorang Raja dalam menjalankan kewajiban dan kesetiaan masyarakat pada Raja yang bertakhta. Dalam otoritas tersebut terdapat norma paten yaitu *manunggaling kawula gusti* yang dianggap karena sebagai bentuk penyatuan diri pada Tuhan dan Raja merupakan perwakilan Tuhan di dunia.

Tradisi budaya Jawa khususnya di dalam internal keraton menjunjung tinggi keberadaan Raja. Sebagai pemimpin Raja harus dijunjung tinggi karena kekuasaan yang dimiliki dan mendapat otoritas karismatik karena karisma yang ditampilkan. Raja Jawa sebagai pemangku hukum adat keraton juga mendapatkan otoritas tradisional sehingga disegani oleh masyarakatnya. Dari otoritas kekuasaan menurut Weber (dalam Giddens, 1995:34) terdapat kemampuan untuk memaksakan kehendak subjek kuasa pada objek kuasa terlepas dari keinginan lain meskipun terdapat kehendak perlawanan. Sebagai suatu otoritas mampu mengendalikan dan mempengaruhi objek kuasa melalui komunikasi efektif sehingga suatu kepentingan dapat disetujui atau disahkan.

Raja Keraton Surakarta berkuasa dalam urusan pemerintahan lembaga adat, panglima angkatan perang dan dianggap sebagai wakil Allah di dunia. Sehingga

terjadinya suksesi menyebabkan permasalahan di internal Keraton Surakarta. Dalam hal ini Paku Buwana XII Hangabeni membentuk tim lima untuk membantu jalannya pemerintah namun justru memperkeruh konflik internal dalam Keraton. Keputusan Paku Buwana XII Hangabeni membentuk tim lima yang menjadikan tindakan sosial dilihat sebagai tindakan politik, karena di dalamnya terdapat suatu otoritas atau wewenang tanpa mempertimbangkan penerimaan pihak lain. Namun dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan tumpang tindih kekuasaan di Keraton yang berakibat pada relasi sosial abdi dalem.

Dampak lain dari keputusan tersebut yaitu menyebabkan dana hibah dari pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak dapat dicairkan karena permasalahan yang tidak kunjung redam. Dengan terhentinya dana hibah tersebut menyebabkan gaji abdi tidak kunjung terbayar. Hal ini berpengaruh pada abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat. Selain berdampak pada abdi dalem, terhentinya dana hibah ini menyebabkan Keraton kekurangan dana kegiatan dan ritual adat. Kebutuhan akan dana hibah demi kelangsungan kegiatan-kegiatan adat mendorong abdi dalem untuk ikut berperan dalam suksesi politik yang terjadi di Keraton Surakarta.

Kedudukan aktor yang melakukan tindakan rasional dari Weber mempengaruhi pandangan dari Randall Collins. Sehingga Randall Collins memaparkan pula bahwa tindakan sosial merupakan tindakan politik yang melihat peran aktor dalam melakukan tindakan rasional dalam suatu kompetisi. Randall Collins memaparkan bahwa interaksi didasarkan pada definisi subjektif individu yang mempunyai suatu sumber sehingga terjadi kompetisi, individu dengan sumber daya yang lebih unggul maka akan mengontrol pihak lain. Adanya kontrol untuk

mempengaruhi pihak lain agar berkuasa tersebut yang menjadikan tindakan sosial disebut sebagai tindakan politik (dalam Ritzer & Goodman, 2008:80).

Hal ini membantu peneliti dalam memetakan pihak-pihak yang berkompetisi dalam akumulasi sumber daya dalam perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Tindakan rasional dari Weber juga mempengaruhi Lukes (2005:37) yang memandang tindakan sosial sebagai tindakan politik karena terdapat suatu keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan alternatif dalam suatu kesepakatan antara dua belah pihak.

Peneliti menggunakan kekuasaan Weberian sebagai dasar dalam melakukan penelitian mengenai relasi kekuasaan abdi dalem menyikapi konflik perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Penelitian ini melakukan identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa dan melakukan klasifikasi berdasarkan peran dalam struktur sosial di Keraton Surakarta. Sehingga akan diperoleh pemetaan aktor yang terlibat, peran, dan klaim-klaim dari relasi sosial abdi dalem Surakarta.

2.1.2. Tiga Dimensi Kekuasaan menurut Steven Lukes

Teori Weber tentang tindakan sosial sebagai tindakan politik dilanjutkan oleh beberapa tokoh. Salah satunya adalah sosiolog Lukes (2005:25) yang memandang relasi kekuasaan secara radikal. Lukes membuat kritik mengenai paham Dahl dan Bachrach dan Baratz yang dianggapnya terlalu berfokus pada pendekatan tingkah laku. Lukes percaya bahwa kepentingan riil tidak terletak pada kekuasaan subjek melainkan pada tindakan objek dalam menentukan pilihan pada kondisi otonomi relatif khususnya dari pengaruh kekuasaan subjek pada objek melalui partisipasi demokratis.

Abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat bertindak sebagai objek yang dapat menentukan pilihan terhadap pengaruh kekuasaan. Untuk itu dalam penelitian melihat proses pengambilan keputusan oleh abdi dalem saat dihadapkan pada suksesi politik. Pandangan mengenai pengambilan keputusan dalam situasi relasi kekuasaan diawali dari Dahl.

Menurut Dahl, relasi kekuasaan dapat diobservasi saat terjadi konflik riil dalam suatu proses pengambilan keputusan. Menitikberatkan pada studi tingkah laku para aktor dalam pembuatan keputusan atas isu kunci yang penting, kontroversial dan konflik aktual (Dahl, 1957: 204). Konflik yang dimaksud Dahl, (1957:204) adalah konflik antar preferensi yang diasumsikan dengan sadar oleh aktor yang terlibat, tampak pada suatu tindakan sehingga dapat diamati tingkah laku aktor tersebut. Kepentingan dipahami sebagai preferensi kebijakan yang dapat diamati atas kepentingan subjektif. Dalam hal ini pandangan Dahl memperlihatkan pengambilan keputusan hanya terlihat pada situasi yang nyata. Pengambilan keputusan hanya terpusat pada satu pihak yang mampu mendominasinya dan pihak lain terdominasi. Dominasi menjadi kunci dari proses pengambilan keputusan menurut Dahl.

Hal ini kemudian dikritik oleh Bachrach & Baratz (2000:948) yang memaparkan alternatif pilihan tindakan *non decision making* yaitu keinginan perubahan dalam masyarakat ditekan sebelum disuarakan, diupayakan tetap tertutup dan dlenyapkan sebelum mencapai arena pembuatan keputusan yang relevan. Sehingga membuat objek tidak dapat melakukan konfrontasi melalui cara sistemis karena telah terjadi bias mobilisasi oleh kepentingan penguasa. Secara

ringkas Bachrach & Baratz (2000:948) sedang memperlihatkan bahwa telah terjadi diskusi-diskusi sebelum terjadinya proses pengambilan keputusan. Kepentingan yang telah direncanakan ini seolah-olah bukan menjadi kepentingan penguasa karena telah diatur sedemikian rupa sebelum proses pengambilan keputusan berlangsung. Sehingga saat terjadinya proses pengambilan keputusan, pada hakikatnya keputusan telah ditentukan sementara sebelumnya telah ada proses hegemoni untuk mencapai tujuan tersebut.

Lukes tidak sependapat dengan kubu pluralis yang terlalu menekankan konflik aktual. Baginya konflik laten juga dapat berlaku dalam sebuah kekuasaan, yaitu konflik yang terjadi saat tidak ada kesesuaian antara kepentingan penguasa dengan kepentingan riil sehingga objek tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Kekuasaan, menurut Lukes (2005:37), adalah “A exercises power over B when A affects B contrary to B’s interest”. Artinya, A menekankan kekuasaan atas B ketika A mempengaruhi B bertentangan dengan kepentingan B. Hal ini menekankan adanya kemampuan subjek untuk mempengaruhi tindakan objek meskipun bertentangan dengan kepentingan objek karena memiliki kepentingan lain. Secara ringkas Lukes (2005: 25) sedang memperlihatkan kenyataan bahwa dua pihak yang sedang berdialog memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda ini kemudian dipertemukan saat proses pengambilan keputusan, sehingga akan muncul proses negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dari proses negosiasi akan diperoleh suatu tujuan alternatif yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses relasi kekuasaan.

Hal ini menjadi poin penting yang digunakan dalam penelitian ini. Adanya kepentingan lain yang disembunyikan dari objek saat mendapat intervensi kekuasaan dari subjek kuasa. Dalam hal ini abdi dalem mempunyai kepentingan lain yaitu mempertahankan kondisi kondusif dan menegakkan aturan adat yang sesuai dengan warisan para pendahulu.

Konsep kepentingan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya membedakan efek signifikan dan non signifikan dari kekuasaan subjek pada objek. Bahwa seorang subjek penguasa memiliki motif dalam mempengaruhi tindakan objek yang juga mempunyai kepentingan yang lain. Dalam penelitian ini perebutan kekuasaan mempengaruhi relasi sosial abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat di Keraton Surakarta. Namun abdi dalem memiliki kepentingan lain yaitu menegakkan aturan adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini melihat konstruksi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh abdi dalem saat menyikapi perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta.

Lukes juga memformulasikan kekuasaan merujuk pada tingkah laku yang beraturan, yang dapat mempengaruhi tingkah laku lainnya. Lukes mengkritik pandangan kubu pluralis yang terlalu berlebihan terhadap arti penting konflik aktual, baginya kekuasaan dapat digunakan dalam situasi konflik potensial dan laten yang tidak akan menjadi aktual (Lukes, 2005:28). Konflik laten, merupakan suatu pertentangan antara kepentingan penguasa dan “real” kepentingan objek yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. Konsep kepentingan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya untuk membedakan efek signifikan dan non signifikan dari pelaksanaan kekuasaan oleh A atas B.

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan objektif atau kepentingan riil dalam situasi demokratis ideal kondisi relatif otonom. Kepentingan objektif yang dilakukan abdi dalem dalam membentuk klaim-klaim mengenai Raja yang dianggap sah berdasarkan aturan adat dan relasi sosial yang berlaku di dalamnya. Adanya proses negosiasi yang terjadi saat proses pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan alternatif yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain itu, Lukes (2005:54) mengembangkan inovasi dalam perdebatan mengenai kekuasaan selain digunakan seorang sebagai individu juga digunakan secara kolektif. Hal ini melalui pertimbangan adanya gejala tindakan kolektif dalam masyarakat muncul ke permukaan tapi tidak memperlihatkan ciri keputusan atau tingkah laku individu. Selanjutnya terdapat suatu gejala sistemis, bias mobilisasi muncul ke permukaan dari bentuk organisasi yang ada. Suatu isu tertentu dapat dilenyapkan dari agenda melalui penerapan kekuatan sosial dan praktek kelembagaan atau melalui keputusan individu. Klaim-klaim dari abdi dalem memang tidak diungkapkan secara terbuka namun manifestasi melalui tindakan pengabdian dan sikap yang diperlihatkan saat terjadi suksesi baik secara individu maupun kolektif.

Kolektivitas politik yang menggunakan kekuasaan independen dari pemimpinnya dianggap sebagai individu. Namun, kekuasaan juga digunakan oleh kekuatan sosial tidak terkait dengan praktek institusional. Meskipun kolektivitas terdiri dari individu-individu namun bukan sebagai keputusan atau tingkah laku individu, melainkan digunakan oleh berbagai komponen individu walaupun tidak

diidentifikasi secara langsung sebagai keputusan atau tingkah laku individu. Sehingga pandangan Lukes (2005:54) menekankan bahwa untuk mengetahui penggunaan kekuasaan oleh individu atau sekelompok aktor politik tidak harus melalui konflik yang aktual melainkan dapat pula melalui konflik yang bersifat laten. Penggunaan kekuasaan adalah suatu fungsi kekuatan kolektif berbentuk suatu aksi atau bukan. Hal ini nantinya untuk mengetahui penggunaan kekuasaan oleh abdi dalem sebagai pihak yang berkuasa dalam mempertahankan aturan adat mengenai Raja yang dianggap sah melalui kekuatan kolektifnya. Kekuatan kolektif yang mampu bernegosiasi pada proses pengambilan keputusan berdasarkan aturan-aturan adat turun temurun di Keraton Surakarta mengenai kekuasaan.

2.1.3. Kekuasaan dalam Budaya Jawa menurut Ben Anderson

Mempelajari tradisi budaya Jawa mengenai kehidupan politik maka tidak lepas dari pengertian kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa berbeda dari pengertian kekuasaan yang telah berkembang di Barat sejak abad pertengahan. Paham Barat memandang kekuasaan sebagai suatu formula yang abstrak karena tidak mampu mengamati apabila tidak terdapat tindakan yang real saat mengamati pola tertentu dalam interaksi sosial. Sumber-sumber kekuasaan bersifat heterogen yang berasal dari banyak aktor sehingga membutuhkan identifikasi aktor yang jelas. Akumulasi kekuasaan tidak mempunyai batas yang melekat, sehingga dimensi ruang dan aktor akan semakin kuat dan memperluas jaringan. Selanjutnya apabila seseorang berkuasa maka dapat dipersoalkan moralitasnya.

Sedangkan kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa dipahami sebagai suatu yang nyata energi dari Ilahi secara tunggal dijiwai alam yang semesta telah ditentukan batas jumlahnya dan tidak dipertanyakan keabsahannya (Anderson B. R., 2006:22-23). Kultur budaya Jawa tradisional mempunyai teori politik yang menawarkan penjelasan logis dan sistematis atas perilaku politik. Penjelasan yang cukup independen dipandang dari perspektif sains politik modern walaupun secara fundamental banyak terdapat pertentangan. Kekuasaan dalam tradisi Jawa adalah sesuatu yang konkret di luar dari diri individu secara mandiri. Dalam budaya Jawa masih lekat paham dinamisme, terdapat kekuatan pada alam, benda, misteri kehidupan dari generasi ke generasi. Sehingga kekuasaan dipahami sebagai suatu daya permanen dari alam semesta.

Kekuasaan bersumber dari sesuatu yang tunggal, dalam hal ini seorang Raja dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan di dunia yang wajib di taati segala perintahnya. Jagat raya telah menentukan jumlah kekuasaan, apabila ada yang seorang yang mendapatkan jumlah kekuasaan lebih maka seorang lainnya kehilangan jumlah kekuasaan yang sama. Kekuasaan di Jawa lebih menekankan keseimbangan jiwa dan raga yang diyakini oleh masyarakat setempat. Selanjutnya dalam kekuasaan di Jawa telah ditentukan kekuasaan yang dianggap baik dan buruk menurut standar kemanusiaan dan kebudayaan di Jawa.

Indikator seorang dinyatakan berkuasa apabila mempunyai hak kepemilikan atas benda-benda dan orang-orang dengan kekuatan besar. Seorang yang berkuasa harus menjadi pusat dari kekuatan besar, sehingga mampu diserap untuk memperkuat kapasitas diri (Anderson B. R., 2006:24). Selanjutnya memiliki

kemampuan dalam mengonsentrasikan kekuatan personal dalam menyerap kekuatan dari luar dan mengharmonisasi gejolak dalam diri agar tidak menjadi difraksi. Menyatukan perbedaan di sekitarnya dengan mengutarakan perintah dan menekan tenaga yang dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan tradisi politik Barat yang menekankan cara mempertahankan kekuasaan, sementara tradisi Jawa menekankan cara menggunakannya.

Persepsi waktu di dalam politik Barat berjalan lurus dan terus maju, sedangkan dalam tradisi Jawa waktu dilihat sebagai pengulangan kekuasaan. Hal ini berpengaruh pada pemimpin Kerajaan Jawa yang dijalankan melalui garis keturunan dan wahyu. Penelitian ini menggunakan konsep kekuasaan Jawa yang dikemukakan oleh Ben Anderson sebagai acuan dalam melihat kekuasaan Jawa secara lebih tepat dan taktis. Relasi kekuasaan dalam budaya Jawa yang dikemukakan oleh Ben Anderson berbeda dengan konsepsi relasi kekuasaan Lukes. Lukes (2005:28) memaparkan relasi kuasa yang terjadi dalam budaya Barat bersifat searah yaitu aktor subjek yang menguasai aktor objek dalam mencapai sehingga timbul konflik laten.

Konflik laten timbul disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepentingan penguasa dengan pihak yang dikuasai. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Ben Anderson mengenai relasi kekuasaan dalam budaya Jawa yang mengakumulasi kekuatan materiil maupun non material yang ada di sekitarnya. Dalam kondisi ideal seorang penguasa dalam tradisi Jawa harus mampu menyerap kekuatan besar tersebut untuk memperkuat kekuasaannya.

2.2. Kerangka Teori

Kerangka Teori yang akan digunakan sebagai pemandu dalam penyajian laporan penelitian Tugas Akhir. Sehingga peneliti menggunakannya mempermudah dalam penggalian data selama melakukan penelitian lapang. Berawal dari konflik perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta yang melibatkan beberapa pihak dari berbagai kalangan. Sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi awal mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa tersebut. Identifikasi ini akan dipandu oleh teori kekuasaan Ben Anderson dan menggunakan empat proposisi kekuasaannya untuk memandu dalam memahami kekuasaan dalam budaya Jawa. Sehingga perlu untuk diketahui pemahaman aktor-aktor tersebut mengenai konsep kekuasaan dan tujuan-tujuan awal masing-masing kelompok tersebut.

Masing-masing kelompok yang terlibat dalam relasi kuasa tersebut tentunya memiliki tujuan-tujuan yang memuat kepentingan tertentu. Sehingga diperlukan suatu tindakan-tindakan rasional dalam mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Weber (dalam Giddens, 1972:40-45) bahwa suatu tindakan sosial tertentu dilakukan oleh aktor untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai tujuan yang dikehendaknya.

Sehingga penelitian ini kemudian menggunakan teori kekuasaan menurut Ben Anderson (2006:22-23) yang merumuskan empat proposisi untuk mempermudah seorang peneliti saat melakukan penelitian mengenai kekuasaan pada budaya Jawa. Empat proposisi tersebut akan memandu peneliti saat melakukan penelusuran di lapangan dan menjadi fokus pengamatan juga pertanyaan wawancara bersama narasumber yaitu abdi dalem.

2.2.1. Materiil Kekuasaan

Proposisi yang pertama yaitu materiil kekuasaan, kekuasaan di Jawa bersifat paten artinya masyarakat meyakini keberadaan benda-benda yang memiliki kekuatan dan mampu berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam hal ini abdi dalem tentunya mempunyai alasan dari keberadaan benda-benda yang dianggap sakral dan mempunyai daya magis di dalamnya. Keberadaan benda tersebut menuntun untuk mengetahui asal mula, keberadaan, fungsi, dan alasan untuk tetap menjaganya. Kekuatan dari daya magis yang diyakini masyarakat Jawa dalam benda-benda tersebut kemudian berkaitan pada berlangsungnya sebuah dinasti. Sehingga akan menjadi menarik untuk mengetahui benda-benda yang memiliki kekuatan magis dan sakral dalam penelitian ini.

Kekuasaan dalam tradisi Jawa dipraktekkan melalui prosesi bersemadi, puasa, tidak melakukan hubungan seksual, pemurnian ritual. Hal ini menimbulkan panas fisik demi memancarkan kekuatan dan mempertahankan kekuasaan. Tindakan ini bukan merupakan bentuk penyiksaan diri demi tujuan etis melainkan cara mencapai titik keseimbangan kosmos dan mengurangi ego diri. Penguasa harusnya mampu menyatukan benda dan orang yang memiliki kekuatan besar.

Seperti halnya Keraton tiap tahunnya mengadakan ritual pencucian keris, mengoleksi benda pusaka dan alat suci. Selain itu terdapat manusia seperti Bulai seorang pelawak kerdil, ahli nujum, abdi dalem yang hidup berdampingan. Sehingga apabila benda-benda dan orang-orang tersebut hilang maka dianggap berkurangnya kekuasaan Raja dan pertanda hancurnya dinasti yang sedang berkuasa. Dalam setiap tindakan tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak

dicapai, begitu pula dengan keberadaan benda-benda, ritual adat, dan unsur lain terus dilestarikan. Hal ini tentu memiliki tujuan dan alasan khusus, menjadi menarik untuk diketahui dan hubungan benda-benda tersebut pada dinasti yang sedang bertakhta.

2.2.2. Homogenitas Kekuasaan

Kekuasaan di Jawa bersifat homogen artinya kekuasaan di Jawa bersumber dari sesuatu yang tunggal. Seorang Raja di Jawa diyakini merupakan titisan atau utusan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga tiap titahnya harus ditaati. Sehingga seorang Raja di Keraton Surakarta diberi gelar *Ngabdulrahman Sayidin Panatagama* yaitu sebagai wakil Allah di dunia (Khalifatullah). Sehingga Tuhan merupakan sumber kekuasaan tunggal yang diyakini dalam tradisi Jawa. Hal ini yang menjadikan abdi dalem *sendika ing dawuh* (menaati segala perintah) terhadap Raja dan telah menjadikan Keraton sebagai pusat dari peradaban. Terbukti bahwa Keraton berada di antara alun-alun utara, perempatan jalan besar Gladhag, dan Masjid Agung Surakarta serta banyak tempat penting yang mengelilingi Keraton Surakarta.

Hal ini seperti yang dipaparkan Moedjanto (1987:67) bahwa Keraton masih mempertahankan doktrin yang memuat ajaran kekuasaan Raja lebih besar dan rakyat mengakuinya. Sehingga membuat rakyat atau dalam hal ini abdi dalem sebagai pelaksana kegiatan adat selalu *ndherek kersa ndalem* (tunduk patuh pada kehendak Raja). Raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan *wenang misesa ing sanagari* (pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri). Dalam pewayangan

dikatakan kekuasaan Raja di Jawa sebagai *Agung binathara* (sebesar kekuasaan Dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia).

Walaupun hanya menopang posisinya sebagai lembaga pelestarian budaya namun semangat abdi dalem tetap bertahan membantu pelaksanaan kegiatan adat di Keraton Surakarta walaupun dengan gaji yang sangat minim. Pola *kawula gusti* (hubungan rakyat dengan Raja) tetap dijunjung oleh abdi dalem dalam melakukan pengabdian dengan setia pada seorang Raja. Hal ini karena Raja dianggap memiliki kapasitas lebih daripada abdi dalem dan mampu memberikan keberkahan dalam hidup abdi dalem.

2.2.3. Limitasi Kekuasaan

Ketiga kekuasaan di Jawa bersifat tetap jumlahnya yang telah ditentukan ambang batas pembagian dan kepemilikannya. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa memiliki keinginan untuk menjaga keseimbangan jiwa dan raga dalam menghindari konflik atau gejolak. Sehingga apabila seseorang mendapatkan jumlah kekuasaan lebih maka seseorang lainnya kehilangan jumlah kekuasaan yang sama. Keseimbangan yang dijaga oleh masyarakat secara turun temurun dalam menjaga keharmonisan kehidupan antar manusia dan kekuasaan dapat terus berlangsung sesuai dengan tujuan yang tentukan.

Jagat raya telah menentukan jumlah kekuasaan, apabila ada yang seorang yang mendapatkan jumlah kekuasaan lebih maka seorang lainnya kehilangan jumlah kekuasaan yang sama. Kekuasaan di Jawa lebih menekankan keseimbangan jiwa dan raga yang diyakini oleh masyarakat setempat. Selanjutnya dalam

kekuasaan di Jawa telah ditentukan kekuasaan yang dianggap baik dan buruk menurut standar kemanusiaan dan kebudayaan di Jawa.

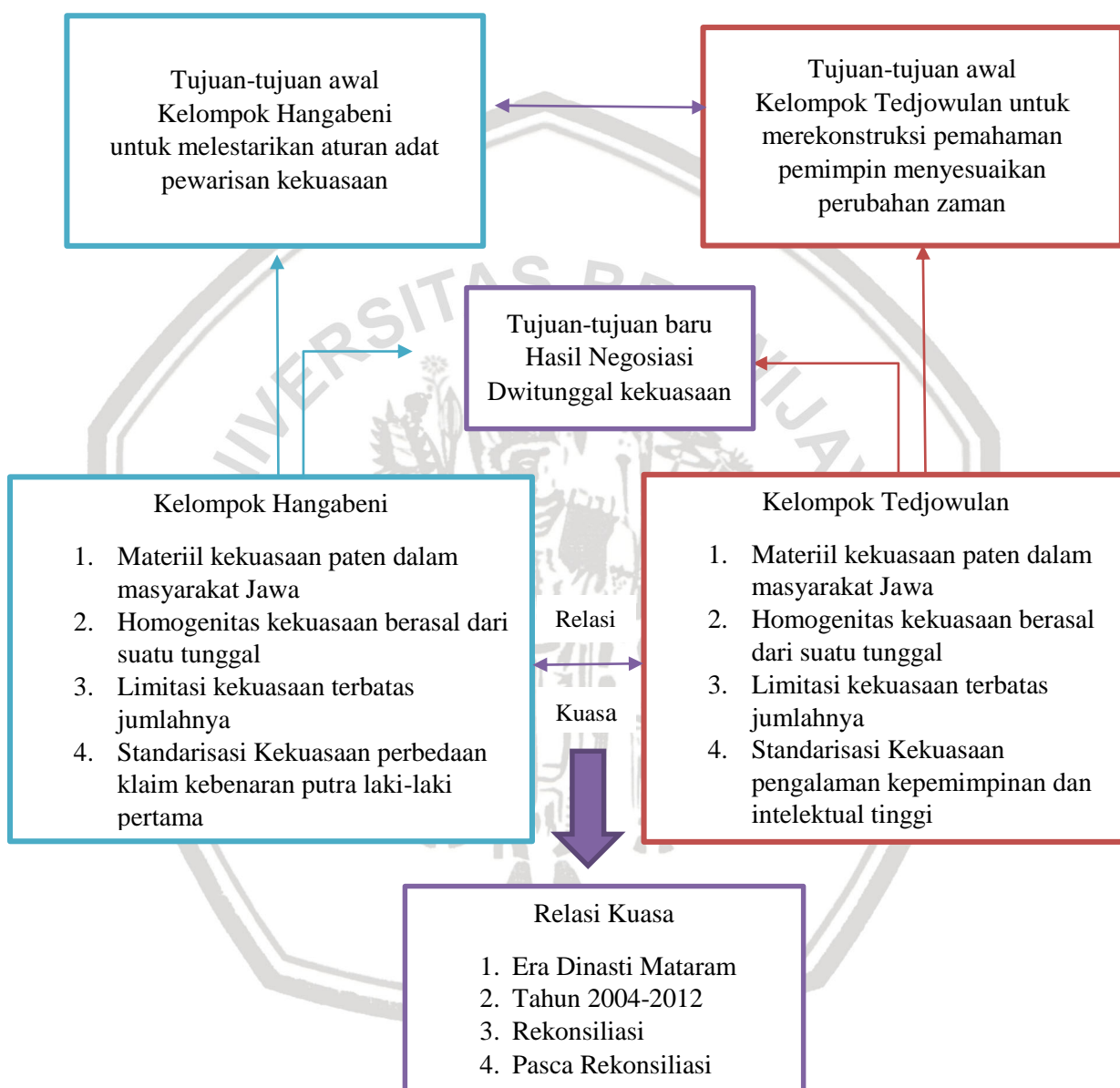
2.2.4. Standarisasi Kekuasaan

Kekuasaan di Jawa telah ditentukan standar baik dan buruk mengenai suatu dinasti. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan kedudukan dari kekuasaan tersebut dan cara memperolehnya. Penentuan baik dan buruk ini didasarkan pada standar kemanusiaan secara umum yang diyakini akal sehat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga apabila suatu didapatkan dengan cara yang baik dan sesuai dengan garis keturunan dan dapat menjalankan dinasti dengan cara yang mulia maka itu akan dianggap menjadi kekuasaan yang baik. Namun sebaliknya apabila suatu kekuasaan didapat dari kekerasan atau gejolak anarki lainnya maka akan dianggap sebagai kekuasaan yang buruk. Standarisasi yang telah diyakini bersama secara turun-temurun ini telah mendarah daging dalam masyarakat.

Penguasa yang ideal adalah yang kekuatan kosmosnya mampu menyerap semua elemen yang bertentang di alam semesta dan mengumpulkan dalam karakternya sehingga berwujud suatu karismatik penguasa. Dalam pelaksanaan kekuasaan, masyarakat Jawa membangun peran sosial antara penguasa dan yang dikuasa untuk menata kehidupan sosial walaupun tetap menekankan peran utama kelas penguasa. Seorang dianggap sebagai penguasa atau yang berpengaruh dalam masyarakat bukan berasal dari penguasa tersebut, melainkan penilaian dari orang-orang yang mengaktualisasikan sosok penguasa. Penilaian ini kemudian menyebar dalam masyarakat menjadi suatu yang dianggap benar mengenai suatu penguasa.

Hal ini menjadi acuan dalam penelitian ini sehingga dapat melihat kekuasaan dalam budaya Jawa secara lebih tepat dan taktis.

Bagan 1 Kerangka Teori



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Hangabeni sebagai Raja yang dianggap telah memperkeruh konflik dalam internal Keraton dengan pembentukan

tim lima. Hal ini berlawanan dengan Dewan Adat yang telah mengangkat pelaksana tugas sementara untuk menggantikan Hangabeni yang sedang sakit. Konflik perebutan kekuasaan yang telah terjadi sejak tahun 2012 ini semakin keruh dan mengakibatkan terhentinya kucuran dana dari Pemerintah untuk operasional Keraton. Sehingga abdi dalem tergerak untuk memobilisasi kepentingan dalam menegakkan peraturan adat mengenai kekuasaan di Keraton Surakarta. Adanya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa ini menjadikan keruhnya konflik internal Keraton pada periode kepemimpinan Hangabeni.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan mengenai pemahaman namun terdapat perbedaan pelaksanaan tiga proposisi awal yaitu materiil kekuasaan yang meyakini bahwa kekuasaan di Jawa bersifat paten, homogenitas kekuasaan yang menerangkan bahwa kekuasaan di Jawa bersumber dari kekuatan yang tunggal, dan mengenai limitasi kekuasaan bahwa kekuasaan di Jawa telah ditentukan batas jumlahnya yang mengacu pada keadilan. Perbedaan terlihat dari standarisasi kekuasaan atau klaim-klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah bertahta di Keraton Surakarta.

Sehingga penelitian ini melakukan pemetaan mengenai aktor yang terlibat dalam suksesi politik. Melalui keempat proposisi yang dipaparkan Ben Anderson tersebut kemudian akan dilakukan tipologi atau klasifikasi perbedaan kelompok kepentingan menurut para abdi dalem pasca suksesi politik dan konflik perebutan takhta. Dari klasifikasi kelompok kepentingan tersebut kemudian dilakukan analisis relasi kuasa menurut Lukes (2005:37) yang mengatakan bahwa akan ada mobilisasi

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk merumuskan tujuan alternatif yang dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam relasi kuasa. Dalam konteks penelitian ini maka akan dirumuskan tujuan-tujuan baru yang muncul melalui proses negosiasi dalam mengatasi konflik perebutan takhta. Tujuan-tujuan baru sebagai alternatif yang seolah-olah disepakati oleh dua belah pihak yang terlibat dalam menjaga keharmonisan Keraton Surakarta.

2.3. Definisi Operasional

Peneliti selanjutnya merumuskan definisi operasional untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini melihat relasi kuasa suksesi dan perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2017. Penelitian ini melihat konsekuensi akibat terjadinya suksesi politik di Keraton Surakarta pada relasi kuasa abdi dalem. Penting untuk mengetahui klaim-klaim kebenaran yang timbul dari abdi dalem dalam menghadapi suksesi politik di Keraton Surakarta. Sehingga dapat memetakan klaim-klaim mengenai Raja yang sah menurut sudut pandang abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat di Keraton Surakarta.

Melihat fenomena tersebut peneliti mengawali kemudian mengawali dari memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton Surakarta. Berawal dari mengidentifikasi pemahaman masing-masing kelompok mengenai konsep kekuasaan dan tujuan-tujuan awal yang memuat kepentingan tertentu. Identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa dan melakukan klasifikasi berdasarkan peran dalam struktur sosial di Keraton Surakarta. Sehingga

akan diperoleh pemetaan aktor yang terlibat, peran, dan klaim-klaim dari relasi sosial abdi dalem Surakarta.

Pemetaan aktor tersebut termasuk sumber kekuasaan yaitu legitimasi hukum, karismatik, dan tradisional. Sehingga akan menjadi penting untuk mengungkap tujuan dari aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton. Selain itu mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktor dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan melakukan pemetaan aktor semacam itu maka mempermudah melakukan identifikasi kepentingan dan peran masing-masing aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta.

Dalam melakukan identifikasi peneliti dipadu oleh teori kekuasaan Ben Anderson sebagai dasar analisa. Ben Anderson telah memaparkan teori kekuasaan dan menyusun empat proposisi untuk memudahkan seorang peneliti saat melakukan penelitian mengenai kekuasaan dalam budaya Jawa. Empat proposisi ini memandu peneliti dalam penggalian data di lapangan nantinya. Hal ini dikarenakan relasi kekuasaan dalam budaya Jawa yang dikemukakan Ben Anderson menyangkut peran benda-benda yang dikeramatkan dan penghuni Keraton dengan berbagai tugasnya yang menyimpan kekuatan besar. Kekuatan besar ini berfungsi dalam keberlangsungan suatu dinasti. Dalam hal ini peneliti membatasi peran atau relasi kuasa abdi dalem yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan adat yang tentunya berhubungan dengan benda-benda keramat dalam area Keraton.

Kekuasaan konkret berwujud nyata dalam benda-benda yang diyakini menyimpan kekuatan lebih dan berhubungan pada kekuasaan di Jawa. Peneliti akan

mengamati benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, proses mendapatkannya dan alasan abdi dalem tetap menjaganya. Sehingga diketahui kedudukan dari benda-benda tersebut dalam dinasti Keraton Surakarta. Dan posisi abdi dalem dalam hal ini merupakan pihak yang mempunyai peran terhadap kepemilikan benda-benda tersebut dan mampu menjadi kunci dari keabsahan atau legitimasi kekuasaan dalam Keraton karena berperan penting dalam menyumbang kekuatan seorang raja.

Peneliti telah melihat pula alasan abdi dalem yang menjadikan Keraton sebagai sentral kehidupannya dan alasan abdi dalem tetap menjaga tunduk patuh pada kehendak Raja. Dalam hal mengetahui keseimbangan kekuasaan dan standarisasi kekuasaan dalam budaya Jawa peneliti membutuhkan beberapa narasumber untuk memberikan informasi, sehingga telah dilakukan wawancara.

Setelah diketahui klasifikasi atau pembagian kelompok yang terlibat dalam relasi kuasa dan pemahaman mereka akan konsep kekuasaan. Hal ini kemudian akan dianalisis menggunakan teori kekuasaan Lukes (2005:25) bahwa telah terjadi mobilisasi kepentingan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai perbedaan tujuan. Selanjutnya akan terlihat dinamika relasi kuasa antara masing-masing kelompok yang terlibat di dalamnya. Dalam dinamika tersebut akan terdapat suatu mobilisasi kepentingan melalui proses pengambilan keputusan yang memuat negosiasi. Kesepakatan untuk merumuskan tujuan-tujuan baru dalam mengatasi konflik perebutan kekuasaan.

Dalam hal ini dibutuhkan negosiasi untuk menentukan atau membentuk tujuan alternatif yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam relasi

kuasa perebutan takhta di Keraton Surakarta. Sehingga peneliti melihat proses mobilisasi kepentingan yang telah dilakukan dalam relasi kekuasaan tersebut dan proses yang berlangsung. Selain itu peneliti telah melihat hingga proses kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga perlu untuk diketahui proses munculnya tujuan-tujuan baru yang dapat digunakan oleh dua kelompok yang berkepentingan.

Selanjutnya dari penelitian ini maka telah dilihat proses mobilisasi kepentingan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan dibantu oleh abdi dalem selaku pelaksana kegiatan adat dalam melakukan negosiasi. Negosiasi dilakukan dalam proses pengambilan tujuan-tujuan alternatif memuat kepentingan dua belah pihak yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton Surakarta. Sehingga diperoleh alternatif kesepakatan dalam menjaga keseimbangan Keraton Surakarta, hal ini menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan dalam merancang suatu penelitian ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian mengenai relasi kuasa abdi dalem pasca terjadinya suksesi politik dan konflik perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini maka dilakukan pengamatan dan pencarian data secara langsung mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta dan tujuan dikehendaki secara interaktif, untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan menekankan realitas sosial. Sedangkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih dalam penelitian ini karena dianggap mampu menggambarkan dan memberikan penjelasan mendalam mengenai relasi abdi dalem dalam menyikapi perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai fenomena dalam konteks khusus seperti relasi kuasa yang membutuhkan penggalan data secara mendalam.

Penelitian ini telah berusaha untuk melihat, memahami serta menganalisis relasi kuasa abdi dalem dalam menyikapi perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Dalam konteks penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental karena penelitian ini mencoba untuk melakukan tipologi mengenai relasi kuasa dalam perebutan kekuasaan yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Terlebih kasus mengenai perebutan kekuasaan juga terjadi di

Keraton Yogyakarta namun berbeda jenis dan proses berlangsungnya, sehingga secara tidak langsung aktor dan fungsinya pun berbeda. Selanjutnya berikut kerangka kerja lapang yang akan digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pencarian data di lapang.

Tabel 1 Kerangka Kerja Lapang

Proposisi kekuasaan	Metode penelitian	Kerangka Kerja
Materiil kekuasaan	Observasi dan wawancara non partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Apa saja benda yang dianggap keramat dan kekuatan yang terkandung di dalamnya • Peran keberadaan benda-benda dalam suatu dinasti • Kegiatan dan upacara adat Keraton dan alasan penyelenggaraannya • Siapa yang diberikan ijin untuk menyimpannya • Proses memperoleh benda-benda tersebut • Tempat benda-benda tersebut disimpan dan cara perawatannya
Homogenitas Kekuasaan	Wawancara non Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kedudukan Raja menurut abdi dalem Keraton Surakarta • Bagaimana kedudukan Keraton menurut abdi dalem • Alasan abdi dalem tetap mengabdikan di Keraton • Tata letak Keraton Surakarta di antara bangunan lain yang mengelilinginya • Bagaimana kepercayaan abdi dalem dan sentana dalem terhadap keberadaan Tuhan dan agama Islam • Bagaimana proses masuk agama Islam di Keraton Surakarta dan perpaduan antara agama Hindu
Limitasi kekuasaan	Wawancara non Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan kekuasaan di Keraton telah ditentukan jumlahnya • Proses pembagian kekuasaan di Jawa • Apa yang hubungan kekuasaan dengan benda-benda sakral
Standarisasi kekuasaan	Wawancara non Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang berhak menjadi pewaris kekuasaan di Keraton Surakarta • Apa kriteria Raja yang dapat menjadi pewaris takhta • Bagaimana proses penobatan Raja tersebut • Ketentuan lain apabila terjadi permasalahan mengenai perpindahan kekuasaan • Alasan penentuan penerus kekuasaan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Observasi dalam penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman abdi dalem secara langsung. Secara metodologis observasi penting, karena pengamatan mengoptimalkan kemampuan seorang peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan. Observasi memungkinkan peneliti menangkap sebuah fenomena dari segi subjektif dalam kurun waktu tertentu serta memungkinkan peneliti mengetahui kehidupan abdi dalem sebagai subjek penelitian. Penelitian ini telah melakukan pengamatan dan identifikasi benda-benda yang dianggap memiliki hubungan terhadap suatu dinasti atau kepemimpinan dalam jumlah yang telah ditentukan, mengetahui kedudukan Keraton sebagai pusat tata ruang. Pengamatan akan difokuskan pada dua elemen tersebut, sehingga akan diketahui posisi benda-benda, ritual adat, ataupun unsur konkret lain yang berperan dalam kelangsungan dinasti Keraton Surakarta.

Selanjutnya dalam wawancara peneliti melakukan percakapan ataupun obrolan pada responden dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terdapat di panduan wawancara. Pengumpulan data menggunakan alat bantu untuk membantu lancarnya pelaksanaan wawancara seperti *tape recorder* dan buku catatan. Hasil wawancara tersebut selanjutnya akan menjadi data primer karena diperoleh secara langsung oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses perebutan pewaris takhta dan mengetahui informasi mengenai hal tersebut. Penelitian ini akan berusaha melihat keberadaan Raja sebagai utusan Tuhan di dunia yang harus ditaati perintahnya, dan standarisasi

dari suatu kekuasaan dianggap baik dan buruk seperti yang dipaparkan oleh Ben Anderson. Peneliti telah menyiapkan *guide interview* sebagai panduan dalam melakukan pencarian data sehingga lebih terarah sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Guide interview* tersebut ditanyakan pada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga telah diperoleh data terkait pemaparan narasumber mengenai permasalahan suksesi di Keraton Surakarta menurut bidang yang dikuasai.

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan *purposive*. Hal ini digunakan untuk memilih individu secara spesifik memberi pemahaman mengenai fenomena dan masalah penelitian yang sedang dikaji. Melalui teknik tersebut maka akan didapat suatu pemahaman yang spesifik dan fenomena secara sentral. Peneliti selanjutnya mengklasifikasikan menjadi dua jenis informan. Pertama informan utama menjadi subjek penelitian yang paling mengetahui permasalahan penelitian. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Kanjeng Budayaningrat yang bertanggung jawab terhadap abdi dalem. Dalam hal ini Pangageng Wilapa telah mampu memberikan informasi mengenai kepemilikan benda-benda sakral di Keraton karena beliau adalah penanggung jawab bidang kebudayaan Keraton yang tempat menyimpan benda-benda tersebut. Sekaligus memberikan keterangan mengenai kekuasaan yang bersifat terbatas atau limit. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui alasan dan praktek pembagiannya.
- b. Winarno Kusuma sebagai Wakil Pangageng Sasana Wilapa, sebagai pihak yang mengetahui asal mula dan keterangan mengenai sumber kekuasaan di

Jawa bersifat tunggal hanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan seluk beluk menempatkan Keraton sebagai pusat peradaban.

- c. Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang diketuai oleh Gusti Mung, sebagai pihak yang mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan takhta. Sehingga Dewan adat dan perwakilan dari abdi dalem mampu memberikan keterangan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dalam peristiwa perebutan takhta. Dewan adat tersebut dipilih karena merupakan pelaksana kegiatan adat dan yang mengetahui aturan adat kekuasaan di Keraton Surakarta.
- d. Humas kubu Tedjowulan sebagai pihak yang mengetahui proses suksesi dari tahun 2004 sekaligus menjabat sebagai juru bicara kubu Tedjowulan. Humas yang diwakili oleh Bambang Ary selaku pihak yang mengetahui perjalanan perebutan tahta terutama menurut pandangan kubu Tedjowulan.
- e. Sentana Dalem yang diwakili oleh RM. Restu yang merupakan bagian dari sentana dalem yang berposisi netral tidak memihak antar dua belah pihak yang berseteru. Mempunyai pemikiran terbuka dan memiliki hubungan baik pada masing-masing kubu.
- f. Ketua Pakasa atau Paguyuban Kawula Keraton Surakarta perwakilan abdi dalem yang bertugas dalam lingkup Keraton sebagai tambahan data pendukung untuk menganalisis proses relasi kuasa antar pihak-pihak yang terlibat.

Alasan peneliti mengambil kelima pihak tersebut sebagai narasumber karena memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai terkait permasalahan

penelitian yaitu mengenai relasi kuasa terjadinya suksesi politik. Yang kedua informan pendukung merupakan pihak yang mampu memberikan informasi tambahan dalam menunjang penyelesaian permasalahan penelitian. Dalam melakukan penelitian pada awalnya menjadikan abdi dalem sebagai informan utama, namun kondisi informan yang langsung menyerahkan segala keputusan dan pemberian informasi kepada para Gusti atau sentana dalem. Pemilik kekuasaan ini dipandang mempunyai legalitas dalam memberikan pernyataan sikap atau segala hal yang berkaitan dengan suksesi politik dan konflik perebutan takhta. Abdi dalem dengan aksi tutup mulut tidak memberikan komentar maupun jawaban atas pertanyaan mengenai suksesi tersebut merupakan salah satu indikasi adanya relasi kuasa antara Gusti dan abdi dalem dalam lingkup Keraton Surakarta. Namun peneliti tetap berusaha untuk mencari informasi secara mendalam mengenai suksesi dari pandangan abdi dalem.

Selain itu peneliti mengambil abdi dalem sekitar Baluwarti sebagai data pendukung dalam penelitian. Selain itu peneliti juga melibatkan abdi dalem sebagai narasumber terkait suksesi politik, pada awal perbincangan abdi dalem masih memaparkan dengan gamblang terkait posisinya sebagai abdi dalem. Namun saat pertanyaan mulai mengarah pada konflik perebutan tahta abdi dalem tidak memberikan banyak penjelasan dan mengarahkan agar langsung menemui para Gusti dan sentana dalem yang lebih mengetahui prosesnya. Abdi dalem hanya menjawab bahwa mereka mengabdikan pada Gustinya masing-masing, termasuk mengikuti dan tunduk patuh pada keputusannya.

Teknik atau metode selanjutnya selain observasi dan wawancara, dalam penelitian juga penting dan lebih kredibel apabila didukung oleh data sekunder berupa studi literatur. Studi literatur yang diperoleh kemudian akan dijadikan data pendukung yang mampu memaparkan kejadian masa lampau sebagai acuan dalam menganalisis relasi kuasa abdi dalem saat dihadapkan suksesi politik. Studi literatur berfungsi sebagai pendukung data primer dalam penelitian ini meliputi arsip abdi dalem, penelitian terdahulu yang membahas permasalahan abdi dalem, berita-berita di berbagai media mengenai konflik perebutan takhta di Keraton Surakarta, teori mengenai kekuasaan Weber, Steven Lukes dan Ben Anderson.

Selain itu peneliti juga menggunakan benda-benda pendukung yang berasal dari buku-buku, teks, benda yang dianggap mempunyai peran dalam kelangsungan proses suksesi. Peneliti telah menggunakan dua benda yaitu Buku yang berjudul Hanya Satu Catatan Tahun Pertama di Atas Tahta karangan dari KP. Edy Wirabumi merupakan karangan dari pihak Hangabeni untuk menguatkan klaim kedudukannya sebagai seorang raja. Buku kedua yang berjudul Pemangku Budaya yang Berwawasan Nusantara karya Lies Hery Susanto merupakan buku mengenai standarisasi kepemimpinan menurut tradisi budaya Jawa yang dianggap mampu memimpin keraton Surakarta. Kedua buku tersebut dijadikan sebagai data pendukung untuk memetakan klaim-klaim dari masing-masing kubu mengenai raja yang dianggap sah dan layak memimpin Keraton Surakarta. Sehingga diperoleh data pendukung yang menunjang penelitian mengenai relasi kuasa terhadap suksesi politik dan perebutan kekuasaan. Selanjutnya hasil dari penelitian ini akan disajikan berdasarkan proposisi yang telah dibangun dalam kerangka teori sebelumnya.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kemudian melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian tersebut. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas dan mulai meningkat menjadi lebih terperinci.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Tinjauan Awal

Pada bab ini saya akan membahas tentang kekuasaan dalam budaya Jawa secara khusus yang berada di Keraton Surakarta. Temuan dari penelitian terungkap bahwa di Keraton Surakarta terdapat perbedaan pandangan kekuasaan oleh dua kubu yang memperebutkan tahta. Perbedaan lebih mengarah pada standarisasi kekuasaan mengenai tokoh yang dianggap lebih layak untuk bertahta sebagai Paku Buwana XIII. Pandangan kekuasaan tidak tunggal, namun terdapat dua kubu yang memberikan klaim mengenai Raja yang dianggap sah bertahta di Keraton Surakarta.

Peneliti dalam menganalisis hasil temuan menggunakan konsep kekuasaan dari Ben Anderson yang mengatakan bahwa kekuasaan bersumber dari sesuatu yang tunggal, sebagai yang nyata energi dari Ilahi secara tunggal dijiwai alam yang semesta telah ditentukan batas jumlahnya dan tidak dipertanyakan keabsahannya (Anderson B. R., 2006:22-23).

Pada bab ini memuat identifikasi awal aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan kekuasaan. Identifikasi ini dipandu oleh teori kekuasaan Ben Anderson dan menggunakan empat proposisi kekuasaannya dalam memahami kekuasaan dalam budaya Jawa. Sehingga dapat diketahui pemahaman aktor-aktor tersebut mengenai konsep kekuasaan dan tujuan-tujuan awal masing-masing kelompok yang terlibat dalam suksesi kepemimpinan di Keraton Surakarta.

4.2. Kekuasaan dalam Budaya Jawa

Kekuasaan bersumber dari sesuatu yang tunggal, sebagai suatu yang nyata energi dari Ilahi secara tunggal dijiwai alam yang semesta telah ditentukan batas jumlahnya dan tidak dipertanyakan keabsahannya (Anderson B. R., 2006:22-23). Jagat raya telah menentukan jumlah kekuasaan, apabila seorang yang mendapatkan jumlah kekuasaan lebih maka seorang lainnya kehilangan kekuasaan dengan jumlah yang sama. Kekuasaan di Jawa lebih menekankan keseimbangan jiwa dan raga yang diyakini oleh masyarakat setempat. Selanjutnya dalam kekuasaan di Jawa telah ditentukan kekuasaan yang dianggap baik dan buruk menurut standar kemanusiaan dan kebudayaan di Jawa. Kekuasaan dalam tradisi Jawa adalah sesuatu yang konkret di luar dari diri individu secara mandiri. Sehingga kekuasaan dipahami sebagai suatu daya permanen dari alam semesta.

Peneliti menggunakan teori kekuasaan Ben Anderson sebagai dasar analisa dalam melihat kekuasaan dalam budaya Jawa. Ben Anderson telah memaparkan teori kekuasaan dan menyusun empat proposisi untuk memudahkan seorang peneliti saat melakukan penelitian mengenai kekuasaan dalam budaya Jawa. Empat proposisi ini telah memandu peneliti dalam penggalan data di lapangan. Hal ini dikarenakan relasi kekuasaan dalam budaya Jawa yang dikemukakan Ben Anderson menyangkut peran benda-benda yang dikeramatkan dan penghuni Keraton dengan berbagai tugasnya yang menyimpan kekuatan besar. Kekuatan besar ini berfungsi dalam keberlangsungan suatu dinasti. Dalam hal ini peneliti membatasi peran atau relasi kuasa abdi dalem yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan adat yang

tentunya berhubungan dengan benda-benda keramat dalam area Keraton Surakarta sebagai lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

4.3. Kekuasaan dalam Keraton Surakarta

Kekuasaan dalam budaya Jawa erat kaitannya dengan kedudukan keraton. Hal ini karena keraton merupakan pusat peradaban dalam budaya Jawa, kedudukannya inilah yang menjadi dasar peneliti dalam melihat kebudayaan Jawa dari dalam Keraton Surakarta.

4.3.1. Materiil Kekuasaan

Keraton Surakarta masih mempertahankan kebudayaan Jawa, termasuk dalam menganalisis kekuasaan. Kekuasaan di Jawa bersifat paten artinya masyarakat meyakini keberadaan benda-benda, orang-orang, ritual yang memiliki kekuatan dan mampu berpengaruh pada kehidupan manusia. Salah satu komponen yang berpengaruh pada Keraton Surakarta adalah Abdi dalem.

Abdi dalem sebelum kemerdekaan berbeda dengan setelah kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan Keraton bertindak sebagai sebuah pemerintahan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai tugas dan fungsinya. Keraton memperlakukan abdi dalem secara serius termasuk dalam urusan pemberian gaji. Namun setelah kemerdekaan, Keraton Surakarta berubah fungsinya hanya sebagai penyangga budaya. Sehingga abdi dalem lebih banyak melakukan tugas pelestarian budaya seperti upacara adat, ritual pemberian sesaji, kesenian, dan tugas harian seperti *caos dhahar* (menyiapkan makanan untuk Raja dan Keluarga Keraton), bersih-bersih dan perawatan pusaka Keraton.

Abdi dalem yang menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja. Hal ini dikarenakan abdi dalem menganggap bahwa Raja merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang perintahnya harus dipatuhi. Abdi dalem tidak akan mengeluh saat diberikan berbagai tugas dan diperintahkan untuk mendatangi berbagai tempat. Paham *Nerima Ing Pandhum* atau menerima setiap bagian yang ditetapkan dengan ikhlas telah mendarah daging pada diri abdi dalem sehingga ikhlas dalam menjalankan tugas dan perintah. Abdi dalem tidak pernah memedulikan kebutuhan finansial.

Kepasrahan dan totalitas dalam melakukan pengabdian pada diri abdi dalem yang sudah mendarah daging ini masih dipertahankan hingga sekarang. Mereka menjalankan pengabdian karena kesadaran berada pada kelas yang rendah dan harus melakukan pengabdian pada Raja. Pembagian kasta ini diyakini sudah diterapkan sejak awal.

Dengan menjalankan beberapa tugas tersebut abdi dalem mendapatkan hak yang diterima. Yaitu akses terhadap benda-benda, ritual adat, dan kesenian yang ada dalam Keraton. Segala sesuatu yang dipercaya maka akan menimbulkan daya, sehingga akan menimbulkan energi. Orang Jawa yang tidak mampu untuk menguraikan maka akan mengaitkannya dengan hal mistis bahwa sesuatu itu ada *daya ghaib* atau daya supranatural. Orang-orang di Jawa dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih kental akan mengatakan pada suatu benda atau tempat terdapat penunggu dan kekuatan supranatural lainnya. Padahal jika ditarik sedikit pada kajian yang lebih ilmiah maka akan didapat suatu data yang mencengangkan. Adanya medan magnet di dalam suatu pusaka akan

mempengaruhi penerimaan terhadap orang tertentu. Dalam hal ini apabila medan magnetnya searah atau cocok maka efek yang diharapkan akan langsung bereaksi positif. Begitu pula sebaliknya, apabila kutub medan magnet berlainan arah maka keris tersebut akan bereaksi menolak. Namun bagi masyarakat Jawa awam akan menganggap bahwa penunggu keris tersebut tidak cocok dengannya.

Seperti contohnya keris, yang menjadi salah satu pusaka paling terkenal pada masyarakat Jawa. Kanjeng Budyaningrat pada tanggal 22 Maret 2018 memaparkan bahwa dalam keris tersebut terdapat kandungan nikel, pamor, baja dengan komposisi dan perhitungan yang tepat maka akan menimbulkan medan magnet. Sehingga tidak heran apabila keris ditempatkan di lambung, pinggang, depan, dan samping akan mempengaruhi tubuh sang pemakai. Hal ini karena kandungan unsur-unsur kimia yang bereaksi apabila diarahkan pada tubuh seseorang. Masyarakat Jawa sebenarnya tidak *klenik*, hanya ketidakmampuan untuk menguraikannya secara ilmiah maka mengaitkannya dengan hal-hal yang mistis. Sementara keris sudah diakui secara dunia melalui UNESCO sebagai waris budaya yang harus dilestarikan pada tanggal 25 November 2005. Hal ini karena keris dipandang sebagai hasil karya manusia yang mengandung unsur seni tinggi, teknologi, unsur-unsur kimia dengan komposisi yang sesuai, dapat menimbulkan energi, peninggalan sejarah, dan dapat diuraikan secara ilmiah.

Salah satu keris yang disimpan di Keraton dan diyakini mempunyai peranan terhadap keberlangsungan suatu dinasti itu adalah keris Kyai Pamor. Tersusun dari ‘Pamor Prambanan’ yaitu meteor yang jatuh di daerah Prambanan sekitar tahun 1784 pada masa pemerintahan Susuhunan Paku Buwana III Surakarta. Selanjutnya

adalah tombak Kyai Plered yang merupakan pusaka yang digunakan oleh Sutawijaya untuk menghunus Harya Penangsang saat terlibat peperangan. Tosan Aji atau senjata pusaka berbentuk tombak ini menimbulkan rasa keberanian atau *piyandel* untuk menambah rasa percaya diri bagi yang pembawanya. Selain itu juga terdapat pusaka yang berfungsi untuk ketenteraman, kekebalan tubuh, penangkal tubuh dan fungsi lainnya.

Bahkan keris pusaka atau tombak pusaka yang *digaduh* atau dipinjamkan Raja kepada para pejabat Keraton mengandung kepercayaan yang terlekat. Setiap keris tentu disimpan dalam sebuah sarung yang mempunyai arti *manunggaling kawula gusti* yaitu hubungan harmonis antara keduanya seperti hubungan Raja dan abdi dalem. Seorang abdi dalem yang tidak diberikan pinjaman pusaka maka dia akan melakukan ritual pencarian sendiri yang bernama *tayuh*. *Tayuh* yaitu cara untuk melihat apakah pusaka tersebut cocok apabila disandingkan dengan dirinya. Dalam proses *tayuh* seorang abdi dalem akan berimajinasi ke arah *klenik* atau mistis saat berhadapan dengan pusaka tersebut. Seperti contoh yang disampaikan oleh Kanjeng Budyaningrat pada tanggal 28 Maret 2018 dalam wawancara, apabila pusaka tersebut cocok maka akan bermimpi bertemu dengan kakek-kakek yang lembut. Dengan cara *tayuh* ini abdi dalem akan mengetahui bahwa penunggu dalam pusaka tersebut cocok dengannya.

Sementara hal ini jika dalam dunia ilmiah adalah persoalan medan magnet dan energi yang terkandung di dalamnya selaras dengan pemiliknya. Seperti yang diungkapkan oleh Kanjeng Budyaningrat selaku pemerhati kebudayaan di Keraton Surakarta bahwa suatu pusaka memiliki peranan dalam suatu kekuasaan

mempunyai benda-benda yang diyakini mampu memberikan legitimasi kekuasaan pada seorang raja (wawancara Kanjeng Budyaningrat, 22 Maret 2018).

Setiap benda-benda yang disimpan di Keraton memiliki maksud dan tujuan dalam keberlangsungan suatu dinasti. Kepemilikan suatu benda atau pusaka berperan sebagai legitimasi adanya kekuatan pada Raja yang memilikinya. Sehingga dalam sebuah dinasti selalu diadakan upacara untuk merawat dan membersihkannya melalui kirab pusaka. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati kedudukannya dalam sebuah dinasti yang sangat penting.

4.3.2. Homogenitas Kekuasaan

Persebaran Islam di tanah Jawa melalui Wali Songo. Banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Wali Songo salah satunya penolakan dari masyarakat Jawa. Hal ini terjadi karena agama Hindu telah terlebih dahulu menjadi falsafah hidup masyarakat Jawa. Dengan kondisi yang seperti ini maka Wali Songo menerapkan metode yaitu Islam yang menyesuaikan kebudayaan Jawa. Masyarakat dipengaruhi dan diberikan penyadaran secara perlahan, dengan mempertahankan tradisi lama namun juga menyisipi paham-paham Islam di dalamnya. Seperti contohnya *kenduren* tradisi untuk pemujaan dewa mantranya diganti dengan doa-doa, pemahaman tentang sunat, dan tradisi Keraton yang dilaksanakan dengan tuntunan Islam.

Sehingga agama Islam dan tradisi Jawa dapat berjalan beriringan secara seimbang. Termasuk dalam menjalankan peribadatan agama Islam tidak ada paksaan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing orang. Masyarakat Jawa yang tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan baik maka dibuatkan Qur'an Gundul

atau pegon. Bahkan abdi dalem menjalankan sembahyang atau salat menggunakan busana adat Jawa dan melafalkan bacaan salat dengan nada seperti tembang dalam tradisi Jawa. Sehingga abdi dalem menjalankannya sesuai batas kemampuannya. Hal ini karena paham kawula gusti bahwa tidak ada perantara antara dia dan Tuhannya. Sikap orang Jawa yang mendahulukan kepentingan orang lain dan menghargainya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjamin kehidupan abdi dalem karena keyakinannya yang teguh pada kuasa Tuhan setelah berusaha dengan maksimal.

Selain pusaka komponen lain dalam suatu dinasti yaitu keberadaan dari Keraton. Hal ini menuntun untuk kembali pada konsep Keraton yang terdiri dari Raja, Sentana dalem, Abdi dalem, Keraton, dan operasionalnya. Kelima hal ini yang disebut dalam istilah *patjupat lima pancer* mempunyai makna bahwa Keraton diakui eksistensinya apabila terdapat lima komponen tersebut dan berjalan dengan aktif. Keraton Surakarta menjadi kerajaan Islam sejak keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam akan mewajibkan adanya Masjid Agung, lapangan atau alun-alun, dan pohon beringin. Komponen ini menjadi pakem dalam Kerajaan keturunan Mataram. Ketiga komponen tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Masjid Agung sebagai pusat peribadatan umat Islam. Alun-alun sebagai pusat kegiatan bersama dan sebagai tempat untuk latihan perang. Di lingkungan alun-alun biasanya akan terdapat pohon beringin, hal ini sebagai tradisi peninggal leluhur. Beringin selalu dimaknai sebagai lambang mengayomi dan melindungi. Kedudukan Keraton adalah sebagai pusat dari bangunan lain yang mengelilinginya.

4.3.3. Limitasi Kekuasaan

Kekuasaan di Jawa telah terbagi jumlah dan takarannya. Hal ini karena masyarakat Jawa mengedepankan aspek keseimbangan dan keadilan. Menjadi seorang abdi dalem berarti siap menjadi punggawa Keraton yang mempunyai bekal lahir dan batin. Untuk mengisi ulang energi maka seorang punggawa Keraton, baik Raja, Sentana dalem, dan Abdi dalem akan melakukan pertapaan. Menurut Kanjeng Budyaningrat Pertapaan dilakukan dengan melakukan puasa empat puluh hari berturut-turut tanpa henti, tidak tidur dan akan memunculkan reaksi gemuruh. Hal ini diyakini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengisi ulang energi karena mampu menimbulkan panas tubuh (wawancara Kanjeng Budyaningrat, 22 Maret 2018).

Tapa yang dilakukan dengan mengasingkan diri, tidak makan minum, tidak mengenal sinar matahari dilakukan secara total selama empat puluh hari penuh tanpa jeda. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan gemuruh dan panas tubuh yang kemudian dapat memancarkan energi. Pengisian ulang energi ini dilakukan dengan perhitungan berdasarkan weton, perhitungan hari bulan tahun, peredaran bulan dan rasi bintang. Perhitungan ini akan mengarahkan tempat dan waktu untuk melakukan pertapaan.

Dari kedua kubu memiliki pemahaman yang sama mengenai tiga elemen tersebut namun terdapat perbedaan mengenai standarisasi kekuasaan. Diawali sejak tahun 2012 hingga sekarang terjadi perebutan kekuasaan yang membuat suasana keraton menjadi tidak kondusif. Keadaan ini terjadi karena adanya konflik dingin atau konflik pemikiran antar kubu yang terlibat dalam perebutan kekuasaan.

Standarisasi tersebut menjurus pada klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah untuk bertahta di Keraton Surakarta.

4.4. Dualisme Standarisasi Kekuasaan

Peneliti mengawali dari memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton Surakarta. Berawal dari mengidentifikasi pemahaman masing-masing kelompok mengenai konsep kekuasaan dan tujuan-tujuan awal yang memuat kepentingan tertentu. Identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa dan melakukan klasifikasi berdasarkan peran dalam struktur sosial di Keraton Surakarta. Sehingga diperoleh pemetaan aktor yang terlibat, peran, dan klaim-klaim dari relasi sosial abdi dalem Surakarta.

Peneliti mengungkapkan tujuan dari aktor-aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan takhta di Keraton. Selain itu mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktor dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan melakukan pemetaan aktor semacam itu maka mempermudah melakukan identifikasi kepentingan dan peran masing-masing aktor yang terlibat dalam relasi kuasa perebutan kekuasaan di Keraton Surakarta. Peneliti melakukan identifikasi dipadu oleh teori kekuasaan Ben Anderson sebagai dasar analisa. Anderson (2006:29) telah memaparkan teori kekuasaan dan menyusun empat proposisi untuk memudahkan seorang peneliti saat melakukan penelitian mengenai kekuasaan dalam budaya Jawa.

Setiap pergantian kekuasaan dalam sebuah dinasti pasti diwarnai suatu suksesi. Adapun aktor yang terlibat dalam proses suksesi ini terdapat dua kelompok besar yaitu Hangabeni dan Tedjowulan.

4.4.1. Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Hangabeni

Keraton Surakarta merupakan keturunan dari dinasti Mataram, suatu Kerajaan dengan sistem pemerintah Islam. Sehingga dalam melakukan pengangkatan pada seorang Raja pun mengharuskan untuk menggunakan metode Islam. Termasuk ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Raja. Seorang Raja harus dari jenis kelamin laki-laki karena akan menjadi seorang imam bagi masyarakat dan memimpin sebuah dinasti. Selanjutnya putra tertua, karena putra tertua dari Paku Buwana XII berjenis kelamin perempuan sementara syarat pertama harus laki-laki maka yang paling memenuhi syarat adalah Hangabeni. Syarat selanjutnya untuk menentukan pewaris kekuasaan maka raja sebelum mangkat akan mendapat bisikan atau wahyu dari Tuhan. Hubungan baik yang tetap dijaga oleh Raja dan Tuhannya memungkinkan paham kawula gusti yaitu pasrah pada kehendak Gusti.

Menurut Kanjeng Budyaningrat, Raja dilantik dengan memenuhi syariat agama Islam sebagai agama yang diyakini dalam dinasti Mataram. Pelantikan seorang Raja mewajibkan calon raja untuk khatam membaca Kitab Suci Al-Qur'an, melakukan ibadah sembahyang Jumat tujuh kali di Masjid Agung Surakarta, dan disumpah oleh keturunan langsung Sunan dari Kerajaan Demak yang masih hidup. Sumpah tersebut dilakukan untuk mendapat gelar Syaidin Panatagama yaitu sebagai penata agama khususnya agama Islam (wawancara Kanjeng Budyaningrat, 22 Maret 2018).

Sri Susuhunan Paku Buwana XIII dengan gelar Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana lahir di Surakarta pada tanggal 28 Juni

1948. Merupakan putra lelaki tertua dari Pakubuwana XII dan seorang selir KRAy. Pradapaningrum. Pada awal kelahirannya diberi nama GRM. Suryadi, namun karena sakit-sakitan maka namanya diganti menjadi GRM. Suryo Partono untuk mengikuti petuah dari tradisi Jawa. Setelah menginjak usia dewasa Susuhunan Paku Buwana XII dan sentana dalem menetapkan GRM. Suryo Partono sebagai putra laki-laki tertua yang menyandang nama dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabeni. Gelar ini mempunyai makna bahwa dia adalah seorang pangeran tertua yang disiapkan menjadi penerus takhta. Selain itu Hangabeni mempunyai legitimasi lain yaitu nama Hangabeni sendiri yang memungkinkan untuk menjadi penerus kekuasaan. Standarisasi seorang dapat diangkat menjadi Raja menurut RM. Restu Budisetiawan merupakan putra sulung laki-laki sesuai dengan aturan adat dalam Keraton dan ideologi agama Islam sebagai agama yang diyakini dalam Keraton Surakarta (wawancara RM. Restu Budisetiawan, 28 Maret 2018)

Persyaratan-persyaratan dan aturan memungkinkan Hangabeni untuk menduduki kursi kekuasaan sebagai Raja Paku Buwana XIII. Legitimasi tersebut *disengkuyung* atau didukung oleh sentana dalem dan abdi dalem di Keraton utama. Sehingga meniadakan pilihan lain selain Hangabeni karena dianggap lebih mampu dan telah memenuhi persyaratan menjadi penerus takhta di Keraton Surakarta Hadiningrat. Setelah menjadi seorang Raja maka Ibunda dari Hangabeni KRAy. Pradapaningrum secara langsung mendapat gelar sebagai Kanjeng Ratu Ageng.

Melalui Buku yang berjudul *Hanya Satu Catatan Tahun Pertama di Atas Tahta* karangan dari KP. Edy Wirabumi yang diterbitkan di Surakarta melalui penerbit Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Keraton Surakarta pada tahun 2004 yang

berisi dasar dari pengangkatan Hangabeni sebagai seorang Raja. Hangabeni yang diangkat menjadi raja di usia yang terbilang sepuh. Bagi Hangabeni usia bukan menjadi persoalan, karena semakin tinggi usia maka semakin mengendap. Tidak mempertimbangkan usia atau bahkan dicapai dengan jalan pemaksaan kehendak. Sistem pewarisan kekuasaan telah diatur dalam *angger-angger*, aturan adat yang tidak tertulis namun menjadi pedoman dalam suatu dinasti. Prosesi jumenengan dalam pelantikan seorang raja pun telah diatur secara baku, termasuk tata cara pelaksanaan.

Walaupun zaman telah berkembang sangat pesat, begitu pula dengan keberadaan keraton yang menyelaraskan diri seiring perkembangan zaman. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertahankan, sebagai ketentuan yang bersifat instrumental dengan berbagai pertimbangan. Sehingga perubahan yang tercapai bersifat *weweton* atau penuh pertimbangan tidak hanya *waton* atau sekedar berubah. Hal ini karena keberadaan keraton sebagai lembaga adat yang berfungsi untuk melestarikan kebudayaan dari generasi ke generasi sehingga terbentuk pola yang berkesinambungan. Apabila aturan adat tersebut melenceng dari standar yang telah ditentukan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan pada keberlangsungan suatu dinasti.

Keraton merupakan lembaga atau institusi pelestari budaya serta tradisi. Sehingga setiap penyelesaian masalah menggunakan pendekatan adat. Bahkan suksesi yang merupakan hak prerogatif raja tidak terlepas dari pertimbangan *angger-angger* yang selama ini dicoba ditegakkan serta dihormati. Pengangkatan

Hangabeni sebagai pewaris takhta Keraton Kasunanan Surakarta sah dan tidak dapat digagalkan oleh dalih apa pun di luar konteks tradisi (Wirabumi, 2004:64).

Hal ini menandakan posisi dari aturan adat sangat berpengaruh dan penting dalam berlangsungnya suatu dinasti termasuk dalam pengangkatan seorang raja. Menurut aturan adat yang berhak menjadi seorang menduduki singgasana adalah seorang putra laki-laki tertua selir jika raja tidak mengangkat permaisuri. Hal sebagai suatu ketentuan adat yang telah berjalan dari keturunan dinasti Mataram yang harus terus berlanjut hingga masa mendatang bukan hanya untuk mengukuhkan posisi dari Hangabeni.

Penyimpangan aturan adat oleh kubu lawan yang menggunakan dasar lain untuk menduduki singgasana dianggap merusak aturan adat tersebut. Kubu Hangabeni melalui buku ini menjelaskan bahwa kubu Tedjowulan sebagai lawan politiknya menghendaki proses penggantian kekuasaan dilaksanakan secara lebih terbuka dengan mempertimbangkan prinsip kualitas. Walaupun banyak dari saudara beda ibu yang meragukan kemampuannya, termasuk kefasihan dalam berbicara yang memang melemah akibat sakit yang sedang dideritanya.

Pelantikan Hangabeni menjadi Paku Buwana XIII melalui beberapa prosesi adat dengan ditandai dengan Sengkalan Sucining Wisik Anrusti Kedhaton. Selain itu keraton menyelenggarakan selamat caos dahar di Pengukuhan Hangabeni sebagai raja dengan melaksanakan prosesi jumenengan. Setelah itu dengan mengenakan sikepan ageng dodotan Hangabeni melakukan upacara *syukuran caos dhahar* di Bangsal Prabasuyasa. Berbagai macam jenis sesajen buah, termasuk lima ratus buah kue apem yang ditusuk setinggi tubuh Hangabeni. Prabayasa merupakan

sebuah ruangan dalam keraton yang paling disakralkan, dalam kosmologi keraton Surakarta dianggap sebagai meru atau titik pusat makro kosmos tempat raja mengontrol kekuatan magis serta kawula atau rakyatnya dan sebagai tempat menyimpan semua pusaka keramat. Sehingga tempat pengukuhan Hangabeni ini bersifat tertutup hanya disaksikan oleh keluarga keraton yang telah disumpah terlebih dahulu.

Setelah prosesi *caos dhahar* pengukuhan berlanjut pada acara kebesaran Keraton Surakarta. Bertempat di Siti hinggil, Hangabeni yang telah berstatus sebagai Putra Mahkota memaklumkan diri sebagai raja Kasunanan Surakarta dengan menggunakan upacara adat penobatan Raja dan mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Nagoro Sudibya Raja Putra Narendra Mataram. Menggantikan singgasana kerajaan dari Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana XII, bertakhta di Keraton Surakarta dengan gelar Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwana Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama ke XII (Wirabumi, 2004:55)

Setelah pengukuhan tersebut maka dilakukan prosesi penyematan bros putih yang terbuat dari intan berlian yang dibuat secara khusus oleh Paku Buwana XII saat memperingati *tumbuk ageng* usia delapan windu. Hiasan dada yang dipasangkan berbeda dari biasanya Bintang Surya Wasesa yaitu lambang kekuasaan seorang Raja. Surya Wasesa yang terdiri dari lima buah bintang milik Keraton yang masing-masing mempunyai warna mutu manikam yang berbeda. Namun keberadaan tiga dari lima bintang tersebut dapat dipertanyakan. Sedangkan dua sisanya berada di gedong pusaka, GKR. Alit sebagai anak pertama Hangabeni yang

membawa anak kunci pembukanya, sementara GKR. Alit berada di pihak Tedjowulan.

Setelah prosesi tersebut dilanjutkan dengan *pisowanan ageng* atau pertemuan besar oleh para sentana dan abdi dalem di Bangsal Sasana Sewaka. Hangabeni menduduki *dhampar* atau singgasana untuk menyaksikan tari pusaka Bedhaya Ketawang. Tari yang diciptakan oleh Sultan Agung ini dibawa oleh sembilan gadis penari. Bedhaya Ketawang yang diciptakan untuk mengekspresikan kecintaan Panembahan Senopati pada Kanjeng Ratu Kidul, selain itu juga melambangkan kesuburan, hubungan vertikal dan horizontal, dan mengandung makna *sangkan paraning dumadi* yang berarti pemberi kehidupan.

Setelah menyaksikan tari Bedhaya Ketawang, seharusnya melakukan kirab pusaka Kyai Garuda Kencana yang diikuti oleh kereta pengiringnya. Kirab yang dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi seorang raja baru kepada masyarakat luas. Namun kirab tersebut terpaksa ditunda dengan kebijakan dari Hangabeni, sebagai ungkapan duka cita atas peristiwa pengeboman Hotel Mariot di Jakarta. Hal ini dianggap tidak mengurangi esensi dari prosesi jumenengan atau pengukuhan Paku Buwana XIII, karena jauh sebelum pelantikan Hangabeni menurut pemaparan buku tersebut telah sering melakukan pendekatan dengan masyarakat yang berada di pasar tradisional Surakarta. Semua ritual ini harus dilaksanakan, apabila terdapat pihak yang mengesampingkan aturan tersebut maka dapat dipertanyakan keabsahan dari penobatan seorang raja.

Pendekatan yang dilakukan pada masyarakat tersebut dilakukan karena Hangabeni telah terbiasa berada pada kesulitan hidup. Hal ini juga yang

meyakinkan Paku Buwana XII untuk memberikan nama KGHP Hangabeni pada putra sulungnya tersebut. Nama Hangabeni merupakan salah satu dari empat nama yang akan menjadi penerus kekuasaan selain Mangku Bumi, Buminata, dan Purbaya. Hingga setelah mangkatnya Paku Buwana XII yang tidak memberikan empat nama tersebut pada anak yang lain, dianggap bahwa hanya Hangabeni sebagai calon tunggal pewaris takhta. Anggapan tersebut semakin memperkuat dasar pengangkatan Hangabeni sebagai seorang raja yang sah menurut aturan adat yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Selain itu penetapan Hangabeni sebagai seorang raja semakin diperkuat dengan keberadaan wasiat pesan Tawang Mangu yang ditulis oleh Paku Buwana XII saat beristirahat di Tawang Mangu. Isi pesan Tawang Mangu yang berisi tentang pewarisan kekuasaan pada Hangabeni. Walaupun masih banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan dari pesan Tawang Mangu tersebut, namun pihak Hangabeni bersikukuh terhadap isi dari pesan tersebut. Kubu Hangabeni yang sebagai berasal dari saudara satu ibu menganggap bahwa saat Paku Buwana XII di rawat di RS Panti Kosala, tidak satu pun saudara tirinya yang membesuk ayahanda. Hal ini disesalkan, karena kubu lawan tidak mengetahui proses surat wasiat tersebut.

4.4.2. Standarisasi Kekuasaan Menurut Kubu Tedjowulan

Terlepas dari persoalan pengangkatan Hangabeni, dalam menjaga eksistensi keraton di masa mendatang perlu dilakukan penguatan dengan memperbaiki pengelolaan keraton secara keseluruhan (Utomo, 2004:23). Perbaikan ini dapat

terwujud dengan memperhatikan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga perlu dilakukan perombakan struktur organisasi keraton.

Namun di lain sisi, pihak Tedjowulan selaku kubu tandingan dari Hangabeni juga mempunyai legitimasi yang memungkinkan untuk menjadi penerus takhta. Tedjowulan yang lahir di Surakarta pada tanggal 3 Agustus 1954 ini merupakan putra dari selir bernama KRAy. Retno Diningrum. Mempunyai nama asli GRM. Suryo Sutejo yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Bandung pada tahun 1984. Dan saat ini telah pensiun dan mendapat gelar Kolonel Inf (Purn). Tedjowulan.

Setelah rekonsiliasi dengan Hangabeni pada tahun 2012, Tedjowulan resmi menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Rajaputra Narendra ing Mataram atau sebagai Mahapatih dari Keraton Surakarta. Dengan menyandang Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan pun menempati rumah Mooryati Soedibyo sebagai Dalem Badran. Walaupun sudah melakukan rekonsiliasi pada tahun 2012 dan Tedjowulan menjadi Mahapatih, ternyata konflik internal masih berkejolak.

Konflik yang terjadi pun karena kubu Tedjowulan mempunyai legitimasi tersendiri untuk menjadi penerus takhta. Tedjowulan dianggap lebih cakap dengan pengalamannya dalam bidang militer, yang mendapat tempaan sehingga siap untuk memimpin Keraton. Pengalaman dalam bidang militer yang menjadi keunggulan Tedjowulan sehingga diharapkan mampu membawa Keraton Surakarta ke arah yang lebih baik. Menurut KP. Bambang Pradatanegara selaku staf Maha Menteri sekaligus juru bicara Dalem Badran, bahwa Tedjowulan telah dipersiapkan untuk

menjadi putra mahkota dengan memasukkannya ke akademi militer. Hal ini karena keraton tidak dapat dibebankan pada sembarang orang yang tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai (wawancara KP. Bambang Pradatanegara, 16 April 2018).

Legitimasi yang menjadi dasar dari kubu Tedjowulan mempunyai dasar kebenaran tersendiri. Seorang calon Raja dari segi tradisi dan kepercayaan Jawa mengharuskannya untuk mencari kembang Wijayaningrum ke Cilacap dengan waktu yang telah ditentukan (Utomo, 2004:43). Namun tidak dapat terlaksana karena Tedjowulan mendapat tugas militer ke Aceh. Hal inilah menjadi dasar untuk melakukan klaim untuk menjadi penerus takhta di Keraton Surakarta, selain itu dalam bidang pertahanan Tedjowulan mempunyai pengalaman dalam bidang militer. Pengalaman ini tentunya dianggap mampu untuk menjadi bekal dalam memimpin sebuah dinasti.

Buku yang berjudul *Pemangku Budaya yang Berwawasan Nusantara* karya Lies Hery Susanto merupakan buku yang di persiapkan secara khusus dalam rangka memperingati 6 Tahun Jumenengan Dalem Sinuhun Tedjowulan. Buku yang terbit pada tahun 2010 melalui Penerbit Aditya Communication di Kota Surakarta, menceritakan secara gamblang biografi dari Tedjowulan dan perjalanan hidupnya termasuk sejarah kepemimpinan di Keraton Surakarta sejak masa jabatan Paku Buwana I hingga sekarang. Buku tersebut juga memuat beberapa tanggapan dan penguatan dari kubu Tedjowulan mengenai standarisasi kepemimpinan menurut tradisi budaya Jawa. Seorang pemimpin yang dianggap mampu memimpin keraton Surakarta merupakan orang yang *kewahyon* atau mendapatkan wahyu dari Tuhan

Yang Maha Esa. Wahyu yang diartikan dalam buku ini merupakan pencerahan sehingga dapat menjaga keseimbangan intelektual dan spiritual.

Menurut Sutanto (2004:12), seorang yang mendapat pencerahan akan memikirkan masa depan keraton Surakarta sebagai warisan budaya, alam semesta, seluruh komponen dalam keberlangsungan suatu dinasti. Keberlangsungan Keraton yang disokong dengan kemandirian dari tiap pihak akan semakin memakmurkan suatu dinasti. Seorang pemimpin dalam negara republik dan globalisasi maka dibutuhkan seseorang dengan pemikiran universal, adil tidak membedakan antar suku ras agama, dan berwawasan nusantara. Sehingga peran dari seorang pemimpin harus mampu untuk menyelaraskan setiap unsur yang ada untuk merangkul semua golongan dengan sikap *welas asih* (belas kasih).

Pemimpin yang arif dan bijaksana merupakan pemimpin yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga segala kebijaksanaannya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat dan masa depan keraton sebagai peninggalan budaya yang harus dilestarikan. Seorang pemimpin yang tidak mendapat pencerahan maka tidak dapat berpikir secara jernih dalam menjalankan suatu dinasti, sehingga masa depan keraton dapat dipertanyakan dan hanya menjadi simbol saja.

Tedjowulan yang merupakan putra dari selir GRAY. Retnodiningrum, yang mempunyai prestasi dalam bidang akademik maupun keterampilan non akademik dan bercita-cita menjadi insinyur. Namun, saat lulus SMA, Paku Buwana XII justru memintanya untuk melanjutkan pendidikan AKABRI Magelang. Hal ini dimaksudkan agar Tedjowulan mendapatkan pendidikan militer yang keras sebagai

bekal kehidupan di masa mendatang. Harapannya Tedjowulan dapat menjadi manusia yang tanggap, tegas dan trengginas sesuai dengan nilai yang ditanamkan dalam pendidikan militer.

Tedjowulan memulai pendidikan di AKABRI pada tahun 1976/1977 dan lulus pada tahun 1981. Setelah lulus, Tedjowulan diberikan tugas mulai dari Danton, Brigade, hingga Kolonel yang ditempuh dalam kurun waktu 17 tahun melalui masa pendidikan sesuai tahapan tiap pangkatnya. Tugas sebagai seorang tentara dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebagai bekal untuk melatih jiwa kepemimpinannya. Walaupun pada awalnya sempat menolak kehendak dari Paku Buwana XII karena menganggap masih banyak adik-adiknya yang mampu memenuhi kehendak ayahanda, namun ternyata banyak pelajaran dan hikmah dari profesinya sebagai tentara.

Paku Buwana XII meyakini seorang yang mengenyam pendidikan militer akan lebih arti perjuangan, pelajaran hidup, penggemblengan watak, kemandirian, kegigihan mental, kesetiaan pada negara, dan memahami nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan warisan kebudayaan. Dalam buku tersebut memaparkan bahwa Paku Buwana XII menyebutkan seperti halnya beberapa kerajaan di luar negeri yang mempersiapkan raja pengganti dengan mengirimnya pada pendidikan militer. Dalam teks buku tersebut terpapar jelas bahwa Paku Buwana pernah menegaskan di hadapan para kerabat dalem bahwa Tedjowulan yang akan menjadi penerusnya dalam memimpin keraton Surakarta. Isyarat lain juga disampaikan oleh Paku Buwana XII sebelum wafat yakni dengan menulis surat pada Presiden Megawati saat itu yang berpesan

“Saya sudah tua, anak saya Tedjowulan supaya dipindahkan ke Surakarta”. Hal ini diyakini oleh kubu Tedjowulan sebagai amanah dari Paku Buwana untuk mempersiapkan Tedjowulan sebagai pengganti Paku Buwana XII. Namun hingga wafat, surat tersebut tidak ditindaklanjuti dan adanya oknum yang diyakini menyeludupkan surat tersebut menurut pemaparan kubu Tedjowulan.

Selain pengalaman dalam bidang militer Tedjowulan juga tetap belajar dari sifat dan karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh para pendahulunya. Hal ini memang secara terus menerus selalu dilaksanakan oleh Tedjowulan dalam meningkatkan kecerdasan intelektual melalui proses *ngangsu kawruh* atau proses belajar. Selain mempertajam kemampuan berpikirnya Tedjowulan juga senantiasa memelihara hubungan spiritual dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

Paku Buwana mangkat pada tanggal 11 Juni 2004 pada usia 79 tahun, pukul 08,15 WIB di Rumah sakit Dr. Oen Solo. Hingga tanggal 14 Juni 2004 Kota Solo dinyatakan dalam kondisi berkabung, dengan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang baik kantor-kantor pemerintahan, sekolah maupun institusi swasta. Paku Buwana XII dimakamkan di pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri Yogyakarta. Selain melangsungkan upacara kemiliteran juga menggunakan upacara kemiliteran karena almarhum merupakan keluarga besar purnawirawan TNI. Upacara kemiliteran dipimpin oleh Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Sunarso dan Danrem 072, Pamungkas Kolonel Suwarno yang ditandai dengan satu kali tembakan salvo. Setelah selesai upacara kemiliteran, jenazah di bawa naik

secara adat oleh para abdi dalem menuju makam raja-raja Mataram di puncak bukit Imogiri.

Sepeninggal Paku Buwana XII yang tidak mengangkat permaisuri dan tidak meninggalkan wasiat secara jelas maka timbul perselisihan mengenai penerus takhta. Menurut KP. Bambang Pradatanegara sembilan elemen penentu penunjukan dan penetapan raja baru di masa lampau, saat ini Keraton masih memiliki tiga elemen yang dipertahankan. Tiga elemen ini adalah Pangageng Putra Sentana yang dipimpin oleh KGPH Hadi Prabowo, Pangageng Parentah Kaputren oleh GK Ratu Alit dan Pangageng Parentah Keraton oleh KGPH Dipokusuma. Tiga Pangageng tinggi keraton pada tanggal 27 Agustus 2004 Selasa Kliwon (Candra Sengkala) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2004, yang menetapkan KGPH Tedjowulan sebagai calon raja. Tiga Pangageng tersebut sepakat apabila tidak ada putra mahkota karena Paku Buwana XII tidak mengangkat keenam selir menjadi permaisuri maka pengangkatan raja harus disetujui oleh tiga Pangageng keraton dan mempunyai hak untuk menobatkan seseorang menjadi Raja (wawancara KP. Bambang Pradatanegara, 16 April 2018)

Pada hari Selasa pagi 31 Agustus 2004, KGPH Tedjowulan dikukuhkan sebagai raja oleh ratusan pendukungnya. Penobatan raja ini dilaksanakan di dalam purnama atau lebih dikenal dengan sebutan Dalem Badran yang merupakan kediaman dari Mooryati Soedibyo di Jalan Moewardi Kota Surakarta. Suasana khidmat dan kegembiraan melingkupi pengangkatan Tedjowulan sebagai penerus takhta bahkan ada beberapa poster bertajuk 'Raja Rakyat'. Setelah dikukuhkan menjadi raja rakyat, keesokan harinya secara resmi Tedjowulan dikukuhkan

sebagai Paku Buwana XII bertempat di Dalem Badran pada pukul 12.15 WIB. Tedjowulan mengenakan pakaian beskap biru gaya Langenharjan melakukan ritual sungkeman pada ibundanya GRAY Retna Diningrum, Anak tertua Paku Buwana XII GK. Ratu Alit, dan salah satu kakak laki-lakinya KGPH. Hadi Prabowo. Pukul 12.35 di hadapan para hadirin Tedjowulan berpidato bahwa dirinya telah menjadi Paku Buwana XIII dengan menyandang gelar Sahandhap Sampeyan dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwana XIII Senopati Ing Alogo Abdurahman Sayiddin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi.

Tedjowulan menjadi raja keempat dalam dinasti Mataram yang dinobatkan di luar keraton karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penobatan di dalam kompleks keraton. Hal yang sama juga dialami oleh pertama Amangkurat II yang dinobatkan di atas Kapal Admiral karena Keraton Mataram saat itu diduduki oleh Trunojaya yang sedang melakukan pemberontakan. Kedua, penobatan Pangeran Puger sebagai Paku Buwana I di Semarang, selanjutnya dapat mengambil alih Keraton Mataram di Kartosura yang diduduki oleh Amangkurat III. Ketiga yaitu penobatan Paku Buwana III di Semarang karena saat itu kondisi Surakarta sedang genting dengan adanya pemberontakan Giyanti yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Kondisi yang sama terulang kembali pada penobatan Tedjowulan karena seluruh pintu keraton ditutup sejak malam harinya oleh pihak penentangannya. Dalam menyikapi persoalan dualisme Raja, Tedjowulan tidak memaksakan kehendak untuk menduduki singgasana kekuasaan hanya untuk mengemban tugas dan melestarikan keraton.

Menurut Tedjowulan dalam Susanto (2010:4) tidak perlu untuk memaksakan kehendak agar menduduki takhta di *dhampar kencana* Keraton Surakarta Hadiningrat. Namun yang paling penting adalah mengembang tugas dan menjaga kewibawaan keraton yang mulai pudar dan dibutuhkan sosok yang paling mampu membenahi keraton yang mulai luntur kebudayaannya

Tedjowulan dianggap oleh pendukungnya sebagai sosok yang mampu membenahi kondisi keraton baik dari segi fisik maupun kebudayaan yang mulai luntur. Walaupun Tedjowulan bukan merupakan anak laki-laki tertua atau putra mahkota dari Paku Buwana XII. Namun, semua anak Paku Buwana XII tidak ada yang mendapat gelar putra mahkota. Putra mahkota hanya lahir dari permaisuri dan bukan selir sementara keenam selirnya tidak ada yang diangkat menjadi permaisuri sehingga kedudukannya sama rata. Aturan yang mengatakan bahwa penerus takhta harus anak laki-laki tertua menurut Tedjowulan dan pengikutnya bukan merupakan *angger-angger* atau aturan adat yang tidak tertulis namun digunakan secara turun temurun (wawancara KP. Bambang Pradatanegara, 18 April 2018).

Menilik pengalaman masa lampau bahwa Paku Buwana XII menduduki posisi di *dhampar kencana* atau singgasana kerajaan sebenarnya masih memiliki dua saudara yang merupakan putra mahkota dan berhak menjadi raja. Namun kedua putra mahkota selain Paku Buwana XII ini sudah tidak lagi memiliki ibu. Sehingga tetap RM. Suryo Guritno yang diangkat menjadi Paku Buwana XII karena ibunya masih hidup. Hal ini juga yang dialami oleh Tedjowulan bahwa ibundanya GRAY. Retno Diningrum satu-satunya selir yang masih hidup. Hal ini juga yang menjadi

dasar dan penguat pengangkatan Tedjowulan sebagai Paku Buwana XIII (Susanto, 2010:12).

Pengangkatan Tedjowulan sebagai Paku Buwana XIII didukung oleh banyak pihak termasuk abdi dalem, sentana dalem, pejabat, dan pihak dari berbagai kalangan. Sebagai pemangku budaya seorang raja seharusnya memiliki visi dan misi untuk melestarikan kebudayaan. Dalam hal ini kubu Tedjowulan berpandangan bahwa tugas pokok seorang Raja di era kemerdekaan adalah untuk mengamankan keraton secara menyeluruh, melestarikan peninggalan dan memelihara kemandirian keraton. Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, sehingga posisi keraton harus dijadikan sebagai peninggalan budaya yang mengandung nilai sejarah. Sehingga penggusuran, pembongkaran dan penguasaan untuk kepentingan pribadi atau beberapa golongan tidak dengan dalih apa pun tidak diperkenankan.

Untuk mengamankan keraton secara menyeluruh, maka Tedjowulan menegaskan bahwa keraton bukan milik perorangan melainkan merupakan aset budaya yang harus selalu dilestarikan. Pelestarian ditujukan untuk menyelamatkan peninggalan fisik maupun non fisik keraton sehingga dapat menjadi warisan budaya bagi generasi mendatang (Susanto, 2010:6).

Upaya melestarikan peninggalan kebudayaan Jawa yang diwariskan oleh Keraton Surakarta menjadi tugas yang berat bagi semua pihak. Hal ini karena pamor keraton mulai menurun seiring berjalannya waktu terlebih dengan keadaan yang sedang tidak kondusif. Citra keraton yang sudah menurun karena tidak lagi kegiatan rutin yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur sepeninggal Paku Buwana

XII. Sebagai seorang raja yang bertugas sebagai pemangku adat budaya, Tedjowulan berpandangan harus siap berjuang dan bertanggung jawab pada kepentingan rakyat.

Raja diibaratkan sebagai akar yang berada paling bawah sehingga harus siap menderita, siap sakit, karena menyangga pohon, daun dan buah, harus dijaga keseimbangannya agar tidak roboh. Tugas seorang raja untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian budaya setempat, yang didukung kecerdasan intelektual dan merasa bertanggung jawab terhadap pohon tersebut (Susanto, 2010:34). Hal ini menandakan posisi dari Raja sangat penting dalam keraton yang akan berpengaruh pada aspek yang lain.

Posisi ini tidak dapat diubah-ubah sudah menjadi ketentuan bahwa seorang raja menjadi akar dari dinasti yang sedang di pimpinnya. Sehingga dalam rangka menjaga kemandirian keraton menurut Tedjowulan diawali dari peran seorang raja yang telah teruji jiwa kepemimpinannya. Manajemen diri sendiri dari segi sumber daya manusia dibutuhkan seseorang yang pintar dan telah teruji mental fisik sebagai pemimpin dalam banyak situasi dan lingkungan (Susanto, 2010:25).

Upaya yang dilakukan oleh keraton seharusnya melakukan pendekatan dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat untuk bersama melakukan dialog membahas pengelolaan dan pemanfaatan keraton secara bersama. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan aktualisasi dan penyesuaian seiring perubahan zaman. Kemandirian dapat tercapai dengan memanfaatkan aset-aset fisik maupun non fisik agar menghasilkan sumber pendapatan demi kepentingan bersama (Susanto, 2010:64).

Sejak diangkat menjadi pemangku budaya di lingkungan Keraton Surakarta, Tedjowulan telah memberikan gelar dan penghargaan pada para abdi dalem, sentana dalem, pejabat, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang dianggap berjasa dan memiliki karya nyata dalam bidang pelestarian dan pengembangan budaya. Hal ini juga sebagai upaya untuk menjalin misi persaudaraan melalui misi budaya. Penghargaan tidak hanya diberikan pada pelestarian budaya Jawa, namun juga orang-orang yang berjasa melestarikan budaya seluruh Nusantara.

Sebagai seorang Raja atau dalam istilah Jawa Ratu menurut Tedjowulan dalam Susanto (2010:28) mengandung makna *rat* yang artinya masyarakat sedangkan *tu* berarti *kedatu* atau pemimpin. Jadi ratu dalam tanah Jawa berarti pemimpin dari masyarakat, seorang Ratu di tanah Jawa membuah *kedhaton* atau rumah untuk menjalankan kepemimpinannya. Seorang pemimpin dengan sabda yang menyejukkan hati, perilaku yang menjadi panutan bagi masyarakat, sentana dalem, dan abdi dalem. Untuk menjadi seorang pemimpin seperti yang dipaparkan dalam buku tersebut harus melalui proses *mandhito*. Proses *mandhito*, bahwa seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan spiritual dan emosional yang mencukupi untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jika pada zaman dahulu untuk melaksanakan *mandhito* harus melalui proses tapa tapi sekarang juga harus pandai dan cakap. Sehingga seorang pemimpin harus memiliki dua kecerdasan tersebut untuk diperbolehkan bicara atau mengeluarkan sabda. Sehingga sabda seorang pemimpin mempunyai dasar.

Selain *sabdo mandhito ratu*, seorang pemimpin harus *waskitho* yang mampu menangkap isyarat alam semesta dan *wicaksana* yang mampu

menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Sehingga seorang pemimpin harus selalu belajar agar memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan mampu *memayu hayu ningrat* yaitu menjadikan *jagad* dan alam menjadi lebih baik, sejahtera dan bahagia di bawah kepemimpinannya. Selain kecerdasan seorang pemimpin sebagai *khalifatullah* atau wakil Allah di bumi juga harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan untuk mendapat petunjuk dalam menjalankan suatu dinasti. Seorang yang mendapatkan petunjuk maka telah mencapai pencerahan selalu mementingkan masyarakat dan alam beserta isinya terjaga keseimbangannya. Seorang pemimpin diharapkan memberikan perlindungan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Penyerahan diri secara total pada kehendak Tuhan dalam mencapai keseimbangan lahir batin.

Sebagai seorang pemimpin dalam budaya Jawa seperti yang digambarkan dalam kalimat “*Ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tur wurihandayani, ambegpamoro asta, gemi nastiti lila legawa*”. Kalimat ini bermakna bahwa yang paling depan memberikan teladan, yang di tengah membangun inovasi dan menciptakan suasana yang kondusif, yang di belakang memberikan dukungan moral dan semangat. Suka membantu tanpa pamrih dengan kerelaan hati dalam pengabdian menjadi seorang pemimpin.

Selain kalimat tersebut juga tertuang dalam konsep kepemimpinan yang disebut Hasta Brata. Tradisi budaya luhur yang masih relevan untuk digunakan di era sekarang. Hasta Brata atau delapan sifat kepemimpinan dalam Susanto (2010:79) menggariskan delapan asas melalui delapan tokoh dewa yang

dilambangkan dengan delapan unsur alam. Selain pedoman kepemimpinan yang dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Tedjowulan juga berpatokan pada Konsep Kepemimpinan pada masa Dinasti Mataram II yang dipaparkan pada kitab wulangreh karya Paku Buwana IV dan Kitab Widhatama karya Mangkunegara IV dalam Susanto (2010:81) tentang ajaran perilaku baik. Nilai-nilai luhur yang tertuang dalam konsep kepemimpinan tersebut harus senantiasa diamalkan sehingga tercipta ketenteraman, kemakmuran dan mencapai kejayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama oleh semua pihak hal ini yang diharapkan oleh Tedjowulan untuk mengembalikan kejayaan Keraton Surakarta.

4.5. Analisis Kelompok dalam Suksesi Politik

Identifikasi aktor yang terlibat dalam suksesi politik di Keraton Surakarta yang mempermudah dalam memetakan aktor dan tujuan awal dari masing-masing kubu dalam menyikapi suksesi politik. Masing-masing kubu telah mempunyai skema dan pemahaman awal mengenai kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa yang tentunya dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang dianut. Dengan mengidentifikasi pemahaman kekuasaan dari dua kubu mempermudah untuk memetakan standarisasi kekuasaan dalam tradisi budaya Jawa yang selanjutnya menjadi dasar dalam menganalisa proses suksesi politik di Keraton Surakarta.

Pemahaman klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah diawali dari tokoh dalam tataran Gusti atau putra-putri kerajaan yang bersentuhan langsung dengan konflik yang sedang berlangsung. Para Gusti yang mempunyai strata atau kedudukan yang lebih tinggi daripada sentana dalem maka mampu mempengaruhi pemikiran sentana dalem terlebih konsep *Manunggaling Kawula Gusti* yang

mengikuti kehendak gustinya. Sehingga pemahaman tersebut menyebar dalam kalangan sentana dalem yang merupakan keluarga kerajaan. Tidak terlepas abdi dalem yang mengabdikan hidupnya di Keraton yang bersentuhan langsung dengan para sentana dalem mendapatkan doktrin mengenai raja yang dianggap sah menurut klaim dari masing-masing kubu.

Relasi kuasa yang terbangun membawa pemahaman mengenai klaim kebenaran raja yang dianggap sah hingga pada lini yang paling rendah yaitu abdi dalem. Sehingga menciptakan polarisasi dari masing-masing kubu mengenai raja yang dianggap sah. Hal ini mengakibatkan kondisi keraton menjadi terbagi menjadi dua kubu pada masa sebelum rekonsiliasi dan menjadi tiga kubu pada masa setelah rekonsiliasi

Masing-masing kubu mempunyai dasar tentang pengukuhan seorang raja yang dianggap paling benar. Perbedaan dasar inilah yang memicu terjadinya konflik perebutan takhta di Keraton Surakarta. Dua kubu awal yang terdiri dari Hangabeni sebagai putra sulung dengan penguatan tradisi dan Tedjowulan sebagai putra dengan intelektualitas yang dianggap mampu memimpin sebuah dinasti.

Masing-masing kubu mempunyai dasar mengenai raja yang dianggap sah untuk meneruskan kepemimpinan di Keraton Surakarta. Standarisasi mengenai raja yang dianggap sah mengakibatkan perbedaan pendapat. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat diketahui masing-masing kubu mempunyai dasar dalam menetapkan pengganti raja. Aturan yang belum jelas mengenai penerus takhta saat seorang Raja tidak mengangkat permaisuri menimbulkan anggapan-anggapan yang berbeda. Hal ini disikapi oleh masing-masing kubu dengan cara memberikan klaim berdasarkan

pedoman yang dianut dan diyakini sebagai dasar dalam menentukan seorang raja dalam Trah Dinasti Mataram. Dengan perbedaan ini maka terjadilah dualisme kekuasaan sejak tahun 2004 hingga tahun 2012. Walaupun telah terjadi rekonsiliasi namun perdamaian tidak dapat dicapai, justru semakin meruncing ke arah perbedaan pendapat dan perpecahan. Adapun perbedaan klaim-klaim antar dua kubu disajikan dalam tabel perbedaan berikut :



Tabel 2 Perbedaan Standarisasi Kekuasaan di Keraton Surakarta

Kubu	Standarisasi Kekuasaan	Homogenitas Kekuasaan	Limitasi Kekuasaan		Materiil Kekuasaan			
Hangabeni	Merupakan putra lelaki tertua dari Pakubuwana XII dan seorang selir KRAy. Pradapaningrum	Nama Hangabeni merupakan salah satu dari empat nama yang diindikasikan akan menjadi penerus kekuasaan	Sistem pewarisan kekuasaan telah diatur dalam <i>angger-angger</i> ,	Walaupun zaman telah berkembang sangat pesat, begitu pula dengan keberadaan keraton yang menyelaraskan diri seiring perkembangan zaman.	Menurut aturan adat yang berhak menjadi seorang menduduki singgasana adalah seorang putra laki-laki tertua selir jika raja tidak berpermaisuri.	Melakukan upacara syukuran caos dhahar di Bangsal Prabasuyasa.	Prosesi penyematan bros putih yang terbuat dari intan berlian yang dibuat secara khusus oleh Paku Buwana XII Bintang Surya Wasesa yaitu lambang kekuasaan seorang Raja.	penetapan Hangabeni sebagai seorang raja diperkuat dengan keberadaan wasiat pesan Tawang Mangu
Tedjowulan	Telah melalui proses <i>mandhito</i> , bahwa seorang pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan spiritual dan emosional yang tinggi	Saat ini Keraton masih memiliki tiga elemen yang dipertahankan dan sebagai penentu pewarisan kekuasaan	dianggap oleh pendukungnya sebagai sosok yang mampu membenahi kondisi keraton	seorang pemimpin harus <i>waskitho</i> yang mampu menangkap isyarat alam semesta dan <i>wicaksana</i> yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya.	Tedjowulan bahwa ibundanya GRAY. Retnodiningrum satu-satunya selir yang masih hidup.	Brata Hasta Brata atau delapan sifat kepemimpinan yang menggariskan delapan asas melalui delapan tokoh dewa yang dilambangkan dengan delapan unsur alam	Mengingat ajaran wuruk Hayam Wuruk melalui Raja Kapa-kapa	Ajaran Negara kertagama karangan Prapanca memegang teguh 15 sifat kepemimpinan

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengantar

Pada bab ini peneliti memaparkan sejarah suksesi pada masa sebelum Paku Buwana XIII di Keraton Surakarta untuk mengawali pembahasan. Peneliti akan memaparkan proses berlangsung dalam suksesi politik yang terjadi di Keraton Surakarta. Peneliti juga akan memaparkan proses kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam proses rekonsiliasi. Sehingga perlu untuk diketahui proses munculnya tujuan-tujuan baru yang dapat digunakan oleh dua kelompok yang berkepentingan.

Pembahasan mengenai relasi kuasa dalam proses pengambilan keputusan dianalisis menggunakan dianalisis menggunakan teori kekuasaan Lukes (2005:25) bahwa telah terjadi mobilisasi kepentingan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai perbedaan tujuan. Selanjutnya akan terlihat dinamika relasi kuasa antara masing-masing kelompok yang terlibat di dalamnya. Dalam dinamika tersebut akan terdapat suatu mobilisasi kepentingan melalui proses pengambilan keputusan yang memuat negosiasi. Kesepakatan untuk merumuskan tujuan-tujuan baru dalam mengatasi konflik perebutan kekuasaan.

5.2. Suksesi Politik dan Perebutan Tahta

Suksesi perebutan kekuasaan oleh dua kubu yaitu Paku Buwana XII Hangabeni yang berkedudukan di Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwana XII Tedjowulan yang berbasis di Kota Barat. Hal ini disebabkan karena keduanya

sama-sama mengklaim sebagai pewaris Keraton yang sah. Paku Buwana XII memiliki enam selir dan dikaruniai tiga puluh lima anak terdiri dari lima belas orang putra dan dua puluh orang putri. Dari keenam selir tersebut tidak ada yang menjadi permaisuri, sehingga kedudukan antar selir sama derajatnya. Prahara ini terus berlangsung hingga babak baru yang menyebabkan kondisi Keraton Surakarta tidak stabil. Perebutan kekuasaan ini masih berlangsung walaupun sudah sempat terjadi rekonsiliasi pada tahun awal bulan Mei 2012. Tedjowulan mendukung kepemimpinan Hangabeni yang memang lebih tua darinya, sementara Tedjowulan mendapat gelar Mahapatih Keraton Surakarta.

Suksesi merupakan bagian dari warna setiap dinasti kerajaan. Walaupun tidak lagi memiliki kekuasaan politik, wilayah dan otoriter namun kerajaan sebagai sebuah dinasti masih hidup. Suksesi terjadi ketika seorang Raja sebelum mangkat tidak meninggalkan putra mahkota yang akan meneruskan kekuasaan, hal ini pasti menimbulkan konflik. Ada klaim-klaim dari pangeran senior atau yang merasa dirinya lebih cakap dalam memimpin Keraton Surakarta. Pergantian kekuasaan yang disertai suksesi juga pernah terjadi sebelum masa Paku Buwana XIII dalam dinasti Mataram diakibatkan oleh beberapa faktor.

5.3. Suksesi dalam Dinasti Mataram

Keraton Surakarta didirikan oleh Susuhunan Paku Buwono II pada tahun 1746 sebagai pengganti dari Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pacinan. Keberadaan Keraton Surakarta tidak terlepas dari Kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-16 yang kemudian diikuti dengan kemunculan Kerajaan Demak merupakan titik

awal perkembangan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Demak tidak berlangsung lama hanya sekitar empat puluh tahun. Hal ini disebabkan adanya intrik perebutan kekuasaan, yang akhirnya memunculkan Jaka Tingkir seorang menantu Raja terakhir Kerajaan Demak yang mendirikan Keraton di Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya.

Kenaikan takhta dari Jaka Tingkir yang hanya seorang menantu, mendorongnya untuk melakukan upaya legitimasi agar tidak menimbulkan keraguan dari masyarakat dan mengamankan kedudukan sebagai pewaris takhta. Jaka Tingkir mendapatkan bantuan dari Ki Penjawi dan Ki Pemanahan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Sebagai imbalan Jaka Tingkir memberikan tanah di daerah Pati untuk Ki Penjawi, dan Ki Pemanahan mendapatkan tanah di daerah Mataram. Ternyata seiring berjalannya waktu, Mataram menjadi daerah yang besar dan berpengaruh. Hal ini membuat Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya khawatir akan mengancam eksistensi Keraton Pajang.

Sepeninggal dari Ki Pemanahan, kekuasaan Mataram kemudian diserahkan pada Sutawijaya, putra Ki Pemanahan yang diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Dibawah kuasa Sutawijaya, Mataram mengalami kemajuan yang pesat dan mampu menguasai Jawa. Pada tahun 1613, kekuasaan Mataram beralih ke Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung merupakan cucu dari Panembahan Senapati yang merupakan Raja dengan pengaruh terbesar di Dinasti Mataram. Sepeninggal dari Sultan Agung, Mataram mengalami kemunduran yang signifikan. Untuk itulah pada 11 September 1680 Sunan Amangkurat II memindahkan pusat Kerajaan Mataram ke Pajang karena terjadi kebakaran yang hebat. Kerajaan Mataram di

Pajang mengalami pasang surut, persengketaan sering terjadi antara Sunan Amangkurat II dengan adiknya yaitu Pangeran Puger. Pada puncaknya terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Amangkurat III dengan Pangeran Puger pada tahun 1709, Pangeran Puger kemudian bergelar Sunan Paku Buwana I (Soeratman, 2000:21-24).

Sepeninggal Paku Buwono I pada tahun 1719, konflik perebutan kekuasaan kembali terjadi antara putra-putra pangeran. Pada masa Paku Buwana II kembali terjadi perpecahan di internal keraton yang melibatkan Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegara dalam pertarungan yang terbuka. Pada masa Paku Buwana II juga terjadi peristiwa pemberontakan dari etnis Tionghoa pada tahun 1740 atau disebut Geger Pacinan. Sebagai orang yang berjasa dalam memulihkan kondisi, Raden Mas Garendi diangkat menjadi raja baru di Pajang sebagai tandingan untuk menggantikan Paku Buwana II yang melarikan diri. Selang beberapa waktu Paku Buwana II kembali menguasai Keraton Pajang.

Pemberontakan dari peristiwa geger pacinan memperburuk kondisi Keraton Pajang saat itu, sehingga Paku Buwana II memutuskan untuk memindahkan pusat Keraton Pajang ke Surakarta. Beralamat di Komplek Baluwarti, Pasar Kliwon, Baluwarti, Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah inilah dinasti Mataram dengan Raja yang bergelar Paku Buwana bertahta hingga Paku Buwana XII yang mangkat pada 11 Juni 2004. Suksesi yang terjadi di Keraton Surakarta yang tidak dapat dihindari dari pergantian kekuasaan Paku Buwana. Dengan melihat kembali sejarah Kerajaan Mataram, akan diketahui bahwa banyak raja Mataram yang memperoleh kedudukan melalui peristiwa suksesi. Latar belakang suksesi beragam, tidak hanya

dari internal namun juga datang dari pihak luar yang memanfaatkan konflik perebutan kekuasaan untuk mengambil keuntungan.

Pada zaman pasca kemerdekaan Keraton tidak lagi berfungsi sebagai pusat kekuasaan, hanya sebagai pemangku cagar budaya untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan adi luhung. Seorang Raja tidak lagi leluasa bebas menggunakan kelengkapan keraton kecuali untuk upacara dan peringatan adat, hal ini sesuai dengan Keppres No. 23/21988 (Utomo, 2004:4). Walaupun tidak lagi menjadi pusat kekuasaan, pada kenyataannya masih memberikan pengaruh yang cukup besar pada masyarakat Surakarta dan sekitarnya. Masyarakat masih percaya Keraton mampu memberikan berkah pada kehidupannya, termasuk pada abdi dalem. Struktur organisasi Keraton masih terjaga, yaitu terdapat seorang Raja, pejabat keraton, sentana dalem, abdi dalem dan masih menyelenggarakan upacara-upacara adat juga masih menyimpan benda-benda bersejarah (Utomo, 2004:10).

Hingga saat ini walaupun Keraton Surakarta tidak lagi menjadi pusat pemerintahan, namun suksesi masih terjadi dan menimbulkan gejolak dalam internal istana. Suksesi di Keraton Surakarta pasca mangkatnya Paku Buwana telah menimbulkan polemik yang berlarut-larut dan menimbulkan konflik di antara putra-putri almarhum Paku Buwana XII (Utomo, 2004:4). Perebutan takhta yang juga terjadi pada masa lampau seperti perebutan takhta mangkatnya Amangkurat I (1705-1708), mangkatnya Paku Buwana I (1719-1728), dan mangkatnya Paku Buwana II (1746-1757). Raja yang menjabat merasa terancam akan kedudukannya, kekuasaan seorang raja yang tidak boleh dibagi dengan pihak lain. Kekuasaan raja

dengan pengaruh yang sangat besar sehingga akan berusaha untuk melanggengkan kekuasaan dalam menghadapi pesaingnya (Utomo, 2004:7).

5.4. Suksesi Tahun 2004

Fakta yang terjadi memperlihatkan bahwa Trah Kerajaan Mataram belum memiliki sistem pewarisan kekuasaan yang paten. Sehingga seorang Raja yang masih berkuasa mengalami kebimbangan saat harus menentukan pewaris takhta. Pada aturan yang tidak tertulis namun dijadikan sebagai panduan, yang berhak menjadi pewaris takhta adalah Putra Mahkota yang bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Anom putra tertua laki-laki dari Permaisuri. Namun setelah Paku Buwana XII mangkat yang tidak mengangkat selir menjadi permaisuri menimbulkan polemik mengenai pewaris takhta. Faktor selanjutnya muncul ide pembaharuan sistem pewarisan kekuasaan.

Perbedaan ini yang mengakibatkan pandangan masyarakat, sentana dalem dan abdi dalem terpecah. Namun adanya yang netral, dan hanya berpedoman pada adat. Ketika berpedoman pada *angger-angger* atau aturan tidak tertulis namun dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan secara turun temurun, putra tertua laki-laki almarhum dari selir yang paling berhak menjadi pewaris kekuasaan (KP. Edy Wirabhumi, 2004:13).

Namun di lain sisi terdapat pendapat yang berbeda, yaitu pewaris takhta tidak harus putra sulung namun bisa salah satu putra yang dinilai memiliki kompetensi memadai, akses yang luas dan mampu diterima oleh semua kalangan untuk mengikuti perkembangan zaman. Alasannya karena tegaknya keraton masih disokong dana dari pemerintah dan untuk memperluas hubungan dengan pihak luar.

Gejolak ini semakin runcing ketika Pesan Tawang Mangu mulai diperbincangkan oleh media masa. Pesan Tawang Mangu merupakan pesan dari almarhum Paku Buwana XII saat beristirahat di vila pribadi milik Sroso Sugiharso, guru spiritual Keraton Surakarta pada tanggal 3 Juni 2004. Pesan tersebut memuat pesan bahwa Paku Buwana meminta Hangabeni menggantikan posisinya dan meminta agar putra-putri mendukung bertahtanya Hangabeni sebagai Paku Buwana XIII. Pesan tersebut direkam oleh KP Edy Wirabumi, Suami dari GRAY. Koes Moertiyah dengan menggunakan telepon seluler kemudian diketik ulang dan ditandatangani oleh Paku Buwana XIII pada 10 Juni 2004 (Wirabumi, 2004:7).

Polarisasi di kalangan putra-putri dalem, sentana dalem, dan abdi dalem yang semula samar mulai mengarah pada konflik perebutan takhta. Hingga mengerucut pada dua tokoh yang mempunyai pendukungnya masing-masing. Para pendukung menganggap tokoh yang mereka dukung adalah yang paling berhak dan layak menjadi pewaris kekuasaan. Tokohnya yang pertama adalah KGPH. Hangabeni secara garis keturunan dianggap yang paling berhak karena putra tertua almarhum Paku Buwana XII. Para pendukungnya menganggap Hangabeni sebagai sosok yang paling tepat untuk meneruskan takhta dan telah ditunjuk oleh Paku Buwana XII melalui Pesan Tawang Mangu.

Tokoh yang kedua adalah KGPH. Tedjowulan, yang dinilai memiliki kemampuan, pengalaman dalam bidang militer dan intelektualitas tinggi (Utomo, 2004:13). Hal ini yang menjadi dasar dari kubu Tedjowulan karena mengacu pada kerajaan monarki, seorang yang dikirim untuk menempuh pendidikan militer maka dipersiapkan menjadi putra mahkota. Sementara kubu Tedjowulan bersikukuh jika

memang Hangabeni telah ditunjuk sebagai penerus takhta mengapa tidak dipersiapkan sejak awal jauh sebelum Paku Buwana XII mangkat. Kubu Tedjowulan mempertanyakan keaslian dan legalitas dari Pesan Tawang Mangu karena hanya disaksikan oleh pihak dari kubu Hangabeni dan sekretaris pribadi Paku Buwana XII (Wirabhumi, 2004:14).

Suksesi perebutan kekuasaan oleh dua kubu yaitu Paku Buwana XII Hangabeni yang berkedudukan di Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwana XII Tedjowulan yang berbasis di Kota Barat. Hal ini disebabkan karena keduanya sama-sama mengklaim sebagai pewaris Keraton yang sah. Paku Buwana XII memiliki enam selir dan dikaruniai tiga puluh lima anak terdiri dari lima belas orang putra dan dua puluh orang putri. Dari keenam selir tersebut tidak ada yang menjadi permaisuri, sehingga kedudukan antar selir sama derajatnya.

Prahara ini terus berlangsung hingga babak baru yang menyebabkan kondisi Keraton Surakarta tidak stabil. Perebutan kekuasaan ini masih berlangsung walaupun sudah sempat terjadi rekonsiliasi pada tahun awal bulan Mei 2012. Tedjowulan mendukung kepemimpinan Hangabeni yang memang lebih tua darinya, sementara Tedjowulan mendapat gelar Mahapatih Keraton Surakarta. Namun situasi kembali memanas ketika kubu Hangabeni dengan sentana dalem (keluarga kerajaan) menolak Tedjowulan dinobatkan menjadi Mahapatih dan membubarkan secara paksa acara *Tinggalan Jumenengan Dalem* (ulang tahun penobatan Raja).

Setelah berhasil dimediasi oleh berbagai pihak kemudian kembali muncul konflik pada tahun 2014. Konflik yang terjadi hingga sekarang menimbulkan

kondisi yang kurang kondusif dalam lingkungan Keraton. Terbukti pada bulan April 2017 Sentana dan abdi dalem terpaksa harus keluar dari dalam Keraton karena kondisi yang disituasikan buruk.

Walaupun dalam internal keraton mengklaim kondisi sebenarnya tidak separah yang diwartakan oleh wartawan dan menimbulkan gejala baru dalam internal keraton. Keraton disituasikan berbahaya oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat sentana dan abdi dalem terpaksa keluar dari dalam lingkungan keraton. Hal ini yang membuat kantor-kantor, perpustakaan, dan sasana lain masih tutup hingga April 2018. Pemahaman sentana dalem dalam menyikapi adanya suksesi sebagai suatu yang selalu terjadi dalam setiap pergantian kekuasaan yang tidak mengangkat putra mahkota.

Menurut RM. Restu Budi Setiawan suksesi adalah sesuatu yang pasti dalam sebuah pergantian kekuasaan dalam sebuah dinasti, hal ini juga telah terjadi sebelum Paku Buwana XIII. Suksesi terjadi ketika Raja yang sudah mangkat atau meninggal namun tidak mempersiapkan putra mahkota hal ini pasti akan menimbulkan konflik. Ada klaim-klaim dari pangeran yang lebih senior karena merasa dirinya lebih cakap dalam memimpin negara (wawancara RM. Restu Budi Setiawan, 28 Maret 2018).

Pergolakan dimulai saat Paku Buwana XII tidak menunjuk putra pangeran penggantinya sehingga terjadi dualisme kekuasaan. Pemahaman klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah telah dimulai dari para Gusti, di satu sisi kubu Hangabeni mempunyai legalitas karena putra tertua laki-laki dan memiliki nama Hangabeni, nama yang berpotensi untuk menjadi penerus takhta walaupun tidak

ditunjuk secara langsung. Seiring berjalannya waktu kondisi keraton menjadi semakin memanas karena kubu Tedjowulan sebagai tandingan juga memiliki dasar dalam menuntut haknya. Dengan pengalaman dalam dunia militer dianggap akan mampu menjadi bekal dalam memimpin sebuah dinasti. Selain itu Tedjowulan adalah pihak yang diminta untuk mencari kembang Wijayakusuma di Cilacap namun tidak terlaksana karena bersamaan dengan tugas ke Aceh.

Klaim yang diberikan oleh dua belah pihak menjadi gejolak baru dalam babak perebutan takhta di Keraton Surakarta. Idealisme klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah yang pada mulanya berasal dari persetujuan antar Gusti atau putra-putri Paku Buwana karena tidak mengangkat putra pangeran. Pemahaman ini kemudian ditularkan kepada sentana dalem melalui komunikasi verbal maupun non verbal. Dengan kuasa yang dimiliki oleh para Gusti dari masing-masing kubu kemudian mampu mempengaruhi pemikiran dari para sentana dalem yang merupakan keluarga kerajaan. Keberadaan sentana dalem semakin memperkuat kedudukan oleh masing-masing kubu.

Para sentana dalem yang telah memiliki pemahaman yang mantap mengenai klaim kebenaran raja yang dianggap sah mampu mempengaruhi pemikiran dari abdi dalem selaku pelaksana tugas harian di keraton Surakarta. Hal ini memperlihatkan relasi sosial yang terbentuk di dalam suksesi politik mampu menembus hingga strata paling rendah sekalipun yaitu abdi dalem. Namun dalam hal ini abdi dalem mendapat tekanan dari pada sentana dalem dan para Gusti agar tidak terlalu banyak memberikan pernyataan sikap di depan media massa. Sehingga segala informasi dan pernyataan sikap hanya boleh dikeluarkan oleh para Gusti dan Sentana dalem

tertentu. Hal ini untuk menanggulangi perbedaan informasi yang dapat menyebabkan permasalahan baru.

Menanggapi konflik perebutan takhta ini maka pemerintah menginisiasi untuk melakukan rekonsiliasi yang terjadi pada tahun 2012. Hasil rekonsiliasi tersebut membuat Tedjowulan akhirnya mengakui kepemimpinan Hangabeni dan bersedia menjadi Mahapatih menempati Dalem Badran, yang merupakan rumah pribadi milik Hj. DR. BRA. Mooryati Soedibyo, S.S., M. Hum. Tedjowulan memiliki kedudukan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Sudibya Raja Putra Narendra ing Mataram dengan menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung.

Walaupun telah melakukan rekonsiliasi namun perdamaian tidak kunjung terealisasi hingga saat ini secara nyata. Dua belah pihak kurang *legowo* atau kurang bisa menerima kesepakatan pada tahun 2012. Hal inilah yang menimbulkan gejolak baru karena perbedaan prinsip dalam menjalankan Keraton Surakarta. Masing-masing mempunyai keyakinan bahwa metodenya adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan keraton, namun hal ini justru menimbulkan masalah baru. Permasalahan-permasalahan keraton yang tidak kunjung diselesaikan karena masing-masing pihak yang mementingkan egonya masing-masing. Sehingga keraton yang justru menjadi semakin terpuruk oleh idealisme masing-masing yang tidak berpihak pada keraton.

Idealisme yang terlekat dalam kedua belah kubu merupakan manifestasi dari pengalaman hidup. Hangabeni sebagai seorang yang *menguri-uri* atau melestarikan budaya Jawa akan berbeda dengan cara pandang Tedjowulan yang mempunyai

pengalaman dalam bidang militer. Konflik yang terjadi saat ini adalah perbedaan cara pandang dalam menyelesaikan persoalan keraton. Menurut RM. Budi Setiawan masing-masing pihak mempunyai tujuan untuk mempertahankan eksistensi Keraton dan seluruh pihak yang berada di dalamnya. Namun mempunyai perbedaan standarisasi dan metode yang digunakan, sehingga menimbulkan perpecahan dalam internal keraton (wawancara RM. Budi Setiawan, 28 Maret 2018).

Keraton sebagai salah satu representasi kebudayaan di Jawa Tengah yang masih bertahan hingga saat ini. Termasuk di dalamnya adalah sikap, tindak tanduk, tata krama, dan *unggah-ungguh* atau sopan santun yang masih dijunjung dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat kondisi keraton masih tidak stabil setelah adanya rekonsiliasi. Kesepakatan yang dibuat seakan hanya menjadi syarat dan mengembalikan citra keraton yang sempat memburuk. Pada kenyataannya, kondisi internal keraton masih memprihatinkan. Kedua belah kubu masih bertegur sapa dalam komunikasi, hal ini karena mereka tidak mampu mengungkapkan rasa kebencian secara terang-terangan. Secara kasat mata memang tidak terjadi lagi konflik secara kontak fisik maupun verbal, namun perbedaan pemikiran dan pemahaman untuk mempertahankan dan keraton dan citra putra-putri keraton.

Perbedaan yang tidak pernah diungkapkan secara langsung hanya secara tersirat ini yang memperburuk suasana. Setiap pihak mempunyai pandangannya masing-masing namun tidak pernah dipersatukan dan dituangkan dalam suatu kebijakan yang menampung aspirasi semua pihak. Sehingga hanya berkuat pada pandangan-pandangan yang memecah belah relasi dalam internal keraton. Menurut

KP. Bambang Pradatanegara pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya dualisme raja ini salah satunya adalah pemerintah karena mengalami kebingungan dalam mendistribusikan dana anggaran bantuan(wawancara KP. Bambang Pradatanegara, 16 April 2018).

Terlihat jelas kerugian yang dialami pemerintah dengan adanya dualisme kekuasaan ini. Termasuk penutupan fasilitas dan kantor Keraton sehingga operasionalisasinya tidak berjalan seperti seharusnya. Anggaran dana yang seharusnya dikucurkan untuk mendukung pelestarian kebudayaan dalam keraton justru terhambat sehingga akan mempengaruhi anggaran yang lain.

Dampak yang dirasakan kedua adalah bagi keraton. Keraton yang seharusnya sebagai penyangga budaya, namun akhir-akhir ini citra keraton menjadi tercoreng dengan adanya gejolak dalam tubuh internal. Kucuran dana yang terhambat dari pemerintah mengakibatkan beberapa upacara, acara, dan ritual adat menjadi kendala secara finansial. Hal ini karena banyak akomodasi kegiatan yang mendapat sokongan dana dari pemerintah.

Pihak ketiga yang mendapat kerugian dengan adanya dualisme kekuasaan ini adalah masyarakat yang akhirnya terpecah belah. Perbedaan pandangan pada pihak gusti mempengaruhi cara pandang dan sikap dari masyarakat sekitar termasuk abdi dan sentana dalem. Abdi dalem yang berpedoman pada prinsip *narima ing pandum* (terimalah bagianmu secara ikhlas, jangan iri dengan yang lain) meyakini kaya dan miskin, rezeki yang kecil semua adalah takdir. Kedua, mereka mencari berkah dari Sultan, karena dianggap mampu menuntut manusia untuk hidup tenang, kecukupan, dan selamat hidup. Yang ketiga yaitu mempertahankan

identitas diri dan pelestarian budaya tata krama, karena menjalani kehidupan yang pasrah (apa adanya) merupakan budi pekerti dasar dalam kehidupan. Sehingga pasrah dengan apa yang dikehendaki oleh Gusti yang dianutnya. Dalam melaksanakan pengabdian abdi dalem juga dijiwai oleh konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, hal ini yang mendasari proses relasi kuasa. Seorang abdi dalem mengikuti dan tunduk patuh terhadap kehendak dari Gusti termasuk dalam pemihakan kubu konflik perebutan kekuasaan.

Abdi dalem sebagai pelaksana kegiatan adat selalu *ndherek kersa ndalem* (tunduk patuh pada kehendak Raja). Raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan *wenang misesa ing sanagari* (pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri). Dalam pewayangan dikatakan kekuasaan Raja di Jawa sebagai *Agung binathara* (sebesar kekuasaan Dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia).

Walaupun tidak terlihat secara kasat mata namun di dalam tembok keraton terlihat perpecahan tersebut. Menurut Bambang Pradatanegara terjadi perpecahan, bagian barat Baluwarti memihak pada Tedjowulan sedangkan bagian timur memihak pada Hangabeni. Walaupun pemisahan tidak terlihat secara tegas, masih ada beberapa pihak dari sisi Timur yang memihak pada Tedjowulan dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan suasana keraton menjadi tidak kondusif (wawancara KP. Bambang Pradatanegara, 16 April 2018)

Sisi sebelah barat yang lebih memihak pada kubu Tedjowulan karena jaraknya lebih dekat dengan Dalem Badran. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa tokoh kubu Tedjowulan yang berada di sisi barat Baluwarti. Pengaruh yang kuat dari tokoh kepercayaan Tedjowulan langsung mempengaruhi masyarakat termasuk

di dalamnya abdi dalem dan sentana dalem. Begitu juga sebaliknya yang terjadi di Keraton utama atau sisi timur yang didominasi oleh pendukung dari kubu Hangabeni. Hal ini karena letak dan pengaruh dari Hangabeni yang dijadikan oleh para pendukungnya sebagai dasar dalam menentukan sikap. Sikap inilah yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan oleh masing-masing kubu. Apabila bekerja pada kubu yang didukung maka akan mempengaruhi semangat dalam melaksanakan tugas dan perintah.

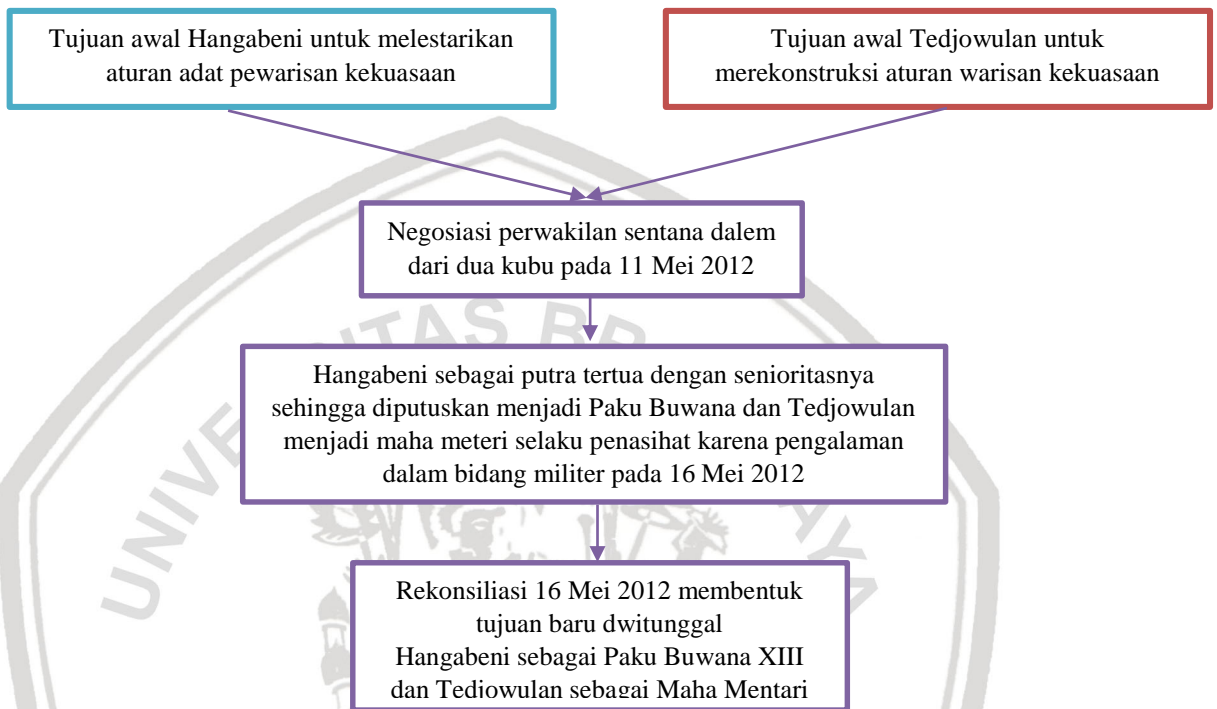
Terbentuknya forum komunikasi oleh para pendukungnya, yang terbagi menjadi dua kubu. Dari kubu Tedjowulan tergabung dalam Forum Silaturahmi Keraton Nusantara(FSKN), karena Tedjowulan menjadi salah satu penasihat forum tersebut. FSKN di bawah binaan Depdagri dan terdaftar di Kebaglimas sehingga mempunyai akta notaris. Selanjutnya Forum Komunikasi Keraton Nusantara (FKKN), Hangabeni sebagai salah satu pemimpin dalam forum tersebut, sehingga banyak melibatkan sentana dari keraton utama. FKKN berdiri di bawah naungan dari Departemen Pariwisata. Masing-masing mempunyai pengikut dan kegiatan masing-masing, yang tidak saling melibatkan diri dalam kegiatan forum lain.

5.5. Rekonsiliasi Tahun 2012

Upaya rekonsiliasi yang berusaha untuk dilakukan untuk mengembalikan kondisi keraton telah beberapa kali dilakukan. Pada tahun 2011 sudah muncul keinginan untuk islah dengan bantuan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu. Persiapan yang dilakukan dari pihak Tedjowulan bersama Sentana dalem di Jakarta hingga pada 11 Mei 2012 terjadi pertemuan dari perwakilan dua belah pihak di Hotel Ibis. KP. Haryo Hari S yang mewakili Hangabeni bersama KP. Bambang

Pradaponagoro berproses hingga tanggal 12 Mei untuk mempersiapkan rencana penandatanganan rekonsiliasi.

Bagan 2 Relasi kuasa pada proses rekonsiliasi tahun 2012



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Setelah melalui proses, maka penandatanganan dilaksanakan di hotel Grand Mahakam Jakarta dengan didampingi Ir. Joko Widodo sebagai Wali kota pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 21.30. Dengan perjanjian rekonsiliasi tersebut maka diputuskan bawa Hangabeni sebagai Paku Buwana XIII dan Tedjowulan sebagai Maha Menteri. Dua hal ini merupakan hasil kesepakatan antara humas Tedjowulan dan humas Hangabeni dengan menggunakan Dwitunggal. Kesepakatan ini akhirnya terwujud setelah melalui beberapa pertimbangan dan perdebatan antar dua belah pihak.

Keputusan untuk menyetujui rekonsiliasi dan menerima kedudukannya sebagai Maha Menteri karena beberapa faktor. Salah satunya adalah posisinya yang masih aktif di militer, menuntutnya untuk tunduk patuh pada perintah komandan sementara komandan tertingginya adalah Presiden. Saat seorang Presiden telah memerintahkan untuk menyelesaikan konflik perebutan takhta maka Tedjowulan hanya bisa tunduk patuh pada keputusan tersebut.

Walaupun mendapatkan pertentangan dari Lembaga Dewan Adat, namun rekonsiliasi tetap diselenggarakan. Meminjam istilah Lukes (2005: 25) bahwa dua pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda ini kemudian dipertemukan saat proses pengambilan keputusan, sehingga akan muncul proses negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dari proses negosiasi akan diperoleh suatu tujuan alternatif yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses relasi kekuasaan. Pihak Tedjowulan akhirnya menyetujui untuk menerima kedudukannya sebagai maha menteri, yang terdapat suatu relasi antar dua aktor dengan kesepakatan untuk menjalankan rumah tangga Keraton secara bersamaan seorang Paku Buwana dibantu oleh Maha Menteri. Kuasa dari Hangabeni sebagai putra laki-laki tertua mampu untuk mempengaruhi Tedjowulan mundur selangkah, selain itu desakan dari presiden selaku panglima tertinggi di Indonesia yang memintanya untuk menciptakan perdamaian. Sebagai seorang maha menteri maka Tedjowulan memiliki wewenang dalam proses pengambilan keputusan dalam menjalankan rumah tangga Keraton Surakarta. Melalui proses negosiasi tersebut terlihat relasi atas kuasa masing-masing kubu untuk mempengaruhi pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan kesepakatan sistem dwi

tunggal kekuasaan di Keraton Surakarta. Negosiasi yang diawali oleh sentana dalem dari masing-masing kubu untuk merumuskan kebijakan dalam mencapai tujuan baru yaitu perdamaian di Keraton Surakarta. Keputusan dalam negosiasi awal tersebut kemudian dibawa dalam proses penandatanganan nota kesepahaman oleh masing-masing kubu yaitu Tedjowulan dan Hangabeni.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perwakilan dua belah pihak yang sebelumnya terdapat negosiasi kesepakatan untuk menciptakan suasana kondusif di Keraton Surakarta. Rekonsiliasi tersebut dianggap sah secara hukum menurut pasal 13 KUHPerdara tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Perjanjian yang sah dan mengikat dua belah pihak ini kemudian dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap proses rekonsiliasi dari dua belah pihak yang diwujudkan dalam nota kesepahaman. Nota kesepahaman antara dua belah pihak yang diakui oleh pemerintah dilaksanakan di ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV dengan disaksikan oleh Ketua DPR RI, empat Kementerian menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Surakarta Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Dengan penandatanganan nota kesepahaman maka telah diputuskan bahwa Keraton Surakarta dipimpin oleh Paku Buwana XIII Hangabeni dan Tedjowulan sebagai Maha Menteri diakui oleh pemerintah pusat. Proses rekonsiliasi ini mendapat pertentangan dari adik-adik kandung Hangabeni tersebut Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau yang biasa disebut Gusti Mung yang mengatas namakan Lembaga Dewan Adat.

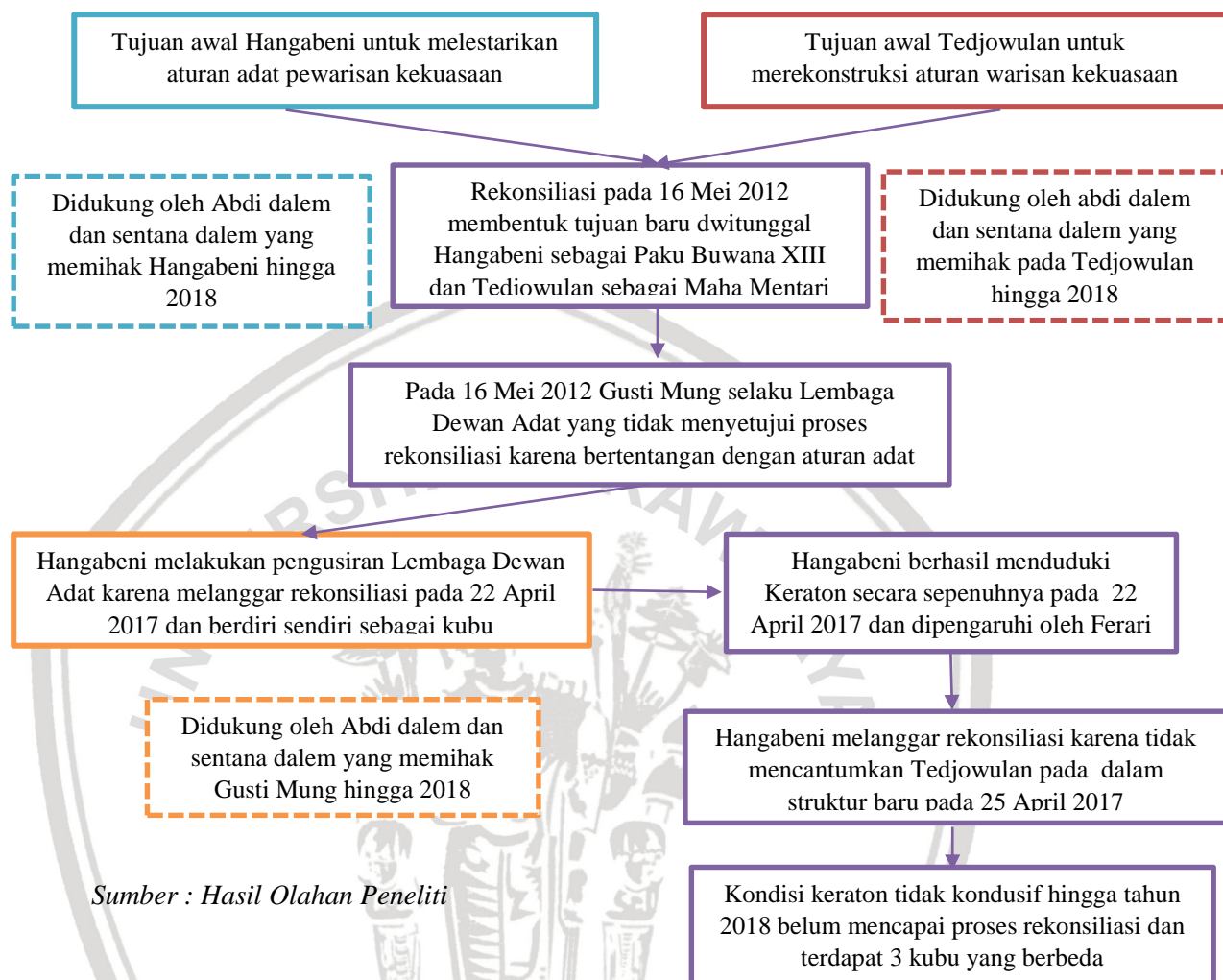
5.6. Pasca Rekonsiliasi

Pada tahun 2012 muncul aktor baru yang terlibat dalam relasi kuasa abdi dalam pasca suksesi politik. Aktor baru tersebut adalah Gusti Mung yang merupakan saudara perempuan seibu dari Hangabeni. Pada awalnya Gusti Mung memberikan dukungan penuh untuk mengusung Hangabeni sebagai raja tunggal yang bertahta di Keraton Surakarta secara sah, namun prahara mulai memanasi tatkala Hangabeni menyalahi aturan adat dengan melaksanakan rekonsiliasi pada tahun 2012. Hal ini membuat Gusti Mung yang di bawah naungan Lembaga Dewan Adat dan Pangageng Sasana Wilapa menolak proses rekonsiliasi termasuk keputusan yang disepakati dalam forum tersebut.

Lembaga Dewan Adat yang pada awal kedudukan Hangabeni sebagai raja diberikan mandat untuk menyelenggarakan upacara adat sekaligus yang mengajukan proposal dana operasional. Menurut Gusti Mung, keputusan rekonsiliasi ini dinilai menyalahi adat karena Hangabeni ikut menyumbang kerusakan aturan adat yang telah diperjuangkan oleh dan dapat menggeser kedudukan dari Lembaga Dewan Adat yang selama ini menyelenggarakan upacara dan ritual adat (wawancara Gusti Mung, 19 April 2018).

Menurut Gusti Mung, Keraton sebagai lembaga adat sejak ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1988 hanya sebagai cagar budaya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Sehingga dibentuk Lembaga Dewan Adat untuk melindungi keraton dalam keadilan hukum termasuk konstelasi politik dengan pihak lawan (wawancara Gusti Mung, 19 April 2018).

Bagan 3 Relasi kuasa pasca rekonsiliasi



Keberadaan Lembaga Dewan adat yang membantu legitimasi Hangabeni sebagai seorang raja karena dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang berhak menjadi penerus takhta selaku putra tertua laki-laki. Semua proses berjalan dengan baik hingga pada tahun 2006 Hangabeni meminta dana operasional untuk diserahkan langsung pada rekening pribadinya. Sementara dana tersebut seharusnya ditujukan untuk operasional keraton, gaji abdi dalem dan sentana dalem, dan upacara adat keraton didistribusikan pada lembaga berbadan hukum dalam hal

ini adalah Lembaga Dewan Adat. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah menunda dana operasional tersebut.

Dana yang akan cair terhenti kembali karena adanya proses rekonsiliasi. Setelah kesepakatan ini ditandatangani dalam proses rekonsiliasi yang memutuskan bahwa Hangabeni sebagai Paku Buwana XIII dan Tedjowulan sebagai Maha Menteri terjadi permasalahan terkait pelaksanaan operasional Keraton. Hal ini mengakibatkan Gusti Mung selaku Lembaga Dewan Adat menarik dukungan dari Hangabeni karena dianggap menyalahi aturan adat (wawancara Gusti Mung, 19 April 2018).

Hal ini terbukti dalam *bebedan* atau struktur organisasi baru setelah adanya rekonsiliasi tidak mencantumkan Lembaga Dewan Adat. Lembaga Dewan Adat yang pada awal kedudukan Hangabeni sebagai raja bertindak sebagai penyelenggara kegiatan adat. Keberadaan Lembaga Dewan Adat diperuntukkan sebagai pelindung. Lembaga Dewan Adat diawali dengan adanya pihak yang mendeklarasikan diri sebagai raja di luar keraton. Hal ini mendorong kubu Hangabeni untuk membentuk badan dalam memperkuat kedudukan keraton dalam bidang hukum. Hangabeni sebagai raja yang sah menjabat Paku Buwana XII memiliki wewenang untuk melakukan penataan ulang struktur organisasi terbaru untuk mendukung pelaksanaan kepemimpinannya di Keraton Surakarta. Sehingga mengeluarkan keputusan untuk tidak mencantumkan Gusti Mung beserta Lembaga Dewan Adat dalam struktur organisasi terbaru karena dianggap berbeda pandangan dengan Hangabeni dan dapat menghambat proses kepemimpinannya.

Menurut hasil rekonsiliasi dua pihak ini yang akan menjalankan operasionalisasi keraton, namun mendapat hambatan karena Keraton masih dikuasai Lembaga Dewan Adat dalam bidang pelaksanaan upacara adat dan pengajuan dana. Ketegangan ini kemudian memuncak pada 22 April 2017 dalam peristiwa pengusiran sentana dalem, abdi dalem yang memihak pada Lembaga Dewan Adat dari lingkungan keraton. Sehingga operasionalisasi keraton kembali dikuasai oleh Hangabeni. Namun hal ini menimbulkan ketegangan baru karena Hangabeni tidak mencantumkan nama Tedjowulan sebagai Menteri dalam struktur organisasi unit pelaksanaan tugas Keraton. Kuasa Hangabeni dengan gelar yang dilegitimasi secara hukum tersebut memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan termasuk tidak mencantumkan Tedjowulan sebagai Maha Menteri dalam struktur organisasi Keraton yang terbaru. Hal ini memperlihatkan relasi kuasa Hangabeni sebagai seorang raja mampu menentukan pihak-pihak yang harus disingkirkan dan yang dipertahankan dalam pelaksanaan tugas Keraton.

Konflik semakin runcing dengan keberadaan pihak luar yang mempengaruhi Hangabeni dalam menentukan keputusan dikenal dengan sebutan Ferari. Ferari singkatan dari KPAA. Ferry Ermansyah Pradatanegara Kuasa hukum, KPH. Adipati Hari Sosronegara, yang ketiga ini adalah Kanjeng Puteri Paku Buwana atau istri dari Hangabeni yang bernama Asih. Keberadaan dari ketiga tokoh ini dibenarkan oleh ketiga belah pihak karena memberikan pengaruh yang signifikan pada Hangabeni dalam memberikan keputusan. Termasuk dengan tidak mencantumkan Tedjowulan sebagai Maha Menteri dalam struktur organisasi unit pelaksanaan operasional Keraton Surakarta.

Menurut KP. Bambang Pradatanegara, Hangabeni dianggap menyalahi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam proses rekonsiliasi pada tahun 2012. Hal ini karena sejak 22 April 2017 telah dikeluarkan keputusan Kemendagri No 403/2933/2017 tentang pengelolaan keraton Kasunanan Surakarta dengan tegas menyatakan keraton dipimpin oleh Hangabeni dan dibantu oleh maha menteri Tedjowulan (wawancara KP. Bambang Pradotonagoro, 16 April 2018)

Posisi Hangabeni dengan pengaruh Ferari ini diyakini oleh kubu Tedjowulan dan Kubu Gusti Mung memburuk kondisi internal keraton. Untuk saat ini pelaksanaan operasional keraton hanya dilaksanakan oleh tim Ferari, sentana dan abdi dalem yang masih bertahan memihak Hangabeni. Keberadaan Ferari juga diakui oleh Gusti Mung sebagai ketua Lembaga Dewan Adat sebagai pihak yang mempengaruhi Hangabeni dalam mengambil keputusan. Termasuk kebijakan menutup seluruh kantor di Keraton Surakarta dan melakukan pengusiran abdi dalem, sentana dalem, dan Gusti-gusti yang tidak sependapat dengan Hangabeni (wawancara Gusti Mung. 19 April 2018).

Dalam pemaparannya terbukti bahwa adanya penutupan beberapa tempat dalam lingkungan keraton dan pengusiran abdi dalem dan sentana dalem setelah Acara Tinggalan Jumenengan Dalem pada tanggal 22 April 2017. Menurut KP. Bambang Pradatanegara merupakan Kekuatan di luar sistem, ferari itu singkatan dari KPAA. Ferry Ermansyah Pradatanegara Kuasa hukum, KPH. Adipati Hari Sosronegara, yang ketiga ini adalah Kanjeng Puteri Paku Buwana atau istri dari Hangabeni. Kemampuan Ferari untuk mengendalikan Hangabeni menggantikan

posisi Lembaga Dewan Adat, dengan tujuan agar Kanjeng Putri tidak keluar dari keraton (wawancara KP. Bambang Pradotonagoro, 16 April 2018).

Konflik yang pada awalnya hanya terjadi dalam tataran elit atau para Gusti dan sentana dalem mempengaruhi kedudukan abdi dalem sebagai pelaksana kegiatan pengabdian. Hal ini karena abdi dalem yang memihak pada salah satu Gusti maka dia akan terkena imbas dari kebijakan Hangabeni, yaitu pengusiran dari internal keraton. Dalam hal ini dapat terlihat relasi kuasa dari suksesi politik tersebut mempengaruhi kehidupan abdi dalem dalam selaku pelaksana tugas adat. sehingga saat ini kondisi keraton yang tertutup menyulitkan abdi dalem untuk masuk kembali dan menjalankan kegiatan adat keraton. Abdi dalem diposisikan menjadi aktor yang tidak berdaya karena hanya mengikuti kehendak dari Gustinya.

Dalam pelaksanaan upacara adat digelar secara tertutup dan tidak sesuai dengan aturan adat. Sebagai contoh dalam pelaksanaan Tinggalan Jumenengan Dalem merupakan upacara memperingati ulang tahun kenaikan takhta. Dalam pelaksanaannya upacara ini tidak menggunakan penari yang telah rutin menampilkan Tari Bedhaya Ketawang dengan latihan selama tujuh hari tujuh malam berturut-turut dan hanya mengambil dari SMKI dengan kualitas yang belum terjamin. Penampilan Tari Bedhaya Ketawang hanya berlangsung lima belas menit dari durasi seharusnya dua jam tanpa henti.

Untuk saat ini kubu Tedjowulan hanya berfokus pada keputusan dan kerja sama dengan pemerintah. Hal ini karena Tedjowulan mengakui keberadaan pemerintah dan mengakui keberadaan hukum dan aturan yang ada di Indonesia. Dengan menandatangani nota kesepahaman pada proses rekonsiliasi maka

Tedjowulan tunjuk pada kebijakan dari pemerintah. Segala keputusan dari pemerintah termasuk rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis untuk operasionalisasi keraton juga didukung oleh Tedjowulan. Menurut KP. Bambang Pradatanegara, pihak Tedjowulan tidak lagi ikut campur pada kebijakan dari Hangabeni yang tidak mengakui pemerintah (wawancara KP. Bambang Pradotonagoro, 16 April 2018)

5.7. Rekonsiliasi dan Proses Pengambilan Keputusan

Upaya rekonsiliasi yang berusaha untuk dilakukan untuk mengembalikan kondisi keraton. Proses rekonsiliasi yang terjadi di di hotel Grand Mahakam Jakarta dengan didampingi Ir. Joko Widodo sebagai Wali kota pada tanggal 16 Mei 2012 pukul 21.30. Dengan perjanjian rekonsiliasi tersebut maka diputuskan bawa Hangabeni sebagai Paku Buwana XIII dan Tedjowulan sebagai Maha Menteri. Dua hal ini merupakan hasil kesepakatan antara humas Tedjowulan dan humas Hangabeni dengan menggunakan Dwitunggal. Kesepakatan ini akhirnya terwujud setelah melalui beberapa pertimbangan dan perdebatan antar dua belah pihak.

Keputusan untuk menyetujui rekonsiliasi dan menerima kedudukannya sebagai Maha Menteri karena beberapa faktor. Salah satunya adalah posisinya yang masih aktif di militer, menuntutnya untuk tunduk patuh pada perintah komandan sementara komandan tertingginya adalah Presiden. Saat seorang Presiden telah memerintahkan untuk menyelesaikan konflik perebutan takhta maka Tedjowulan hanya bisa tunduk patuh pada keputusan tersebut. Walaupun mendapatkan pertentangan dari Lembaga Dewan Adat, namun rekonsiliasi tetap diselenggarakan.

Hal ini menekankan adanya kemampuan subjek untuk mempengaruhi tindakan objek meskipun bertentangan dengan kepentingan objek karena memiliki kepentingan lain. Meminjam istilah Lukes (2005: 25) bahwa dua pihak yang sedang berdialog memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda ini kemudian dipertemukan saat proses pengambilan keputusan, sehingga akan muncul proses negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dari proses negosiasi akan diperoleh suatu tujuan alternatif yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses relasi kekuasaan.

Masing-masing kubu mempunyai kepentingan berbeda satu dengan yang lain, namun akhirnya dapat dilebur melalui proses negosiasi yang menghasilkan keputusan berupa perdamaian atau rekonsiliasi. Hal ini dapat tercapai melalui dialog atau negosiasi dan perdebatan oleh masing-masing perwakilan dua kubu yang sedang berseteru. Masing-masing perwakilan dalam hal ini humas yang merangkap sebagai juru bicara melakukan proses negosiasi yang telah dilaksanakan sebelum penandatanganan rekonsiliasi dan nota kesepahaman. Melalui proses negosiasi yang panjang dan akhirnya teretus keputusan model pemerintahan Dwitunggal, yang mengartikan bahwa Hangabeni menjabat sebagai Paku Buwana XIII dan dibantu oleh Tedjowulan sebagai Maha Menteri. Keputusan tersebut disepakati dan dilaksanakan bersama dengan tujuan utama untuk mengembalikan kondisi keraton yang kondusif.

Namun permasalahan kembali terjadi karena munculnya pertentangan oleh Lembaga Dewan Adat yang tidak menyetujui adanya rekonsiliasi karena dianggap mencoreng adat Keraton. Hal ini pula yang mengakibatkan Hangabeni tidak dapat

melaksanakan pemerintahan di Keraton sebagai mana mestinya, karena Keraton secara *de facto* masih dikuasai oleh Lembaga Dewan Adat. Penguasaan yang meliputi pelaksanaan kegiatan adat, pemeliharaan abdi dalem sentana dalem, dan pendistribusian dana bantuan operasional dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu akhirnya pada 22 April 2017 setelah menyelenggarakan acara Tinggalan Jumenengan Dalem, Hangabeni beserta tim melakukan pengusiran Lembaga Dewan Adat beserta sentana dan abdi dalem yang memihak padanya karena dianggap telah melanggar rekonsiliasi. Setelah melakukan pengusiran terhadap Lembaga Dewan Adat dan Abdi dalem sentana dalem yang memihak padanya, maka kekuasaan dapat diambil alih kembali oleh Hangabeni. Namun permasalahan kembali terjadi ketika Hangabeni tidak mencantumkan Tedjowulan atau Maha Menteri dalam susunan organisasi *bebadan* Keraton. Atas tindakannya Hangabeni dianggap telah menyalahi rekonsiliasi yang sepakati pada 2012 silam.

Hal ini yang menyebabkan kondisi Keraton Surakarta saat ini tidak kondusif, masing-masing kubu terbelah oleh kepentingannya masing-masing. Hingga saat ini Hangabeni tetap yang menjalankan prosesi dan upacara adat namun dengan menggunakan standar dan aturannya sendiri yang dibuat bersama timnya. Lembaga Dewan Adat yang berfokus pada pemeliharaan abdi dan sentana dalem yang diusir dari dalam keraton. Tedjowulan yang berfokus pada pendekatan dan memberikan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah untuk memakmurkan keraton sebagai pemangku budaya. Walaupun telah dilakukan dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini namun masing-masing pihak belum berkenan untuk mencapai keputusan bersama demi kemakmuran keraton.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Relasi kuasa abdi dalem dalam suksesi politik dan perebutan tahta yang diawali dari Paku Buwana XII yang tidak mengangkat putra mahkota untuk meneruskan kekuasaan sebelum beliau mangkat. Terlebih Paku Buwana XII memiliki enam selir dan tidak mengangkat permaisuri, hal ini menimbulkan gejolak perebutan tahta. Penelitian mengenai kekuasaan dalam budaya Jawa khususnya di Keraton Surakarta dapat ditarik kesimpulan dengan meminjam teori kekuasaan Ben Anderson yang mengatakan bahwa kekuasaan bersumber dari sesuatu yang tunggal, sebagai yang nyata energi dari Ilahi secara tunggal dijiwai alam yang semesta telah ditentukan batas jumlahnya dan tidak dipertanyakan keabsahannya (Anderson B. R., 2006:22-23).

Menganalisis keraton sebagai sebuah dinasti menuntun untuk kembali pada empat proposisi kekuasaan dari Ben Anderson yaitu Materiil kekuasaan, Homogenitas Kekuasaan, Limitasi kekuasaan, Standarisasi kekuasaan. Hal ini berkaitan dengan perebutan tahta di Keraton Surakarta. Dua kubu yang berseteru memiliki pemahaman yang sama mengenai tiga proposisi yaitu materiil kekuasaan, homogenitas kekuasaan, dan limitasi kekuasaan. Namun mempunyai perbedaan dalam hal standarisasi kekuasaan untuk menentukan penerus tahta.

Tujuan awal kubu Hangabeni dari awal perebutan tahta untuk melestarikan dan menegakkan *angger-angger* atau aturan tidak tertulis yang ditaati secara turun

menurun terutama dalam pewarisan kekuasaan. Sesuai aturan adat tersebut Hangabeni menjadi dianggap sah karena merupakan putra laki-laki tertua dari Paku Buwana XII. Sedangkan dari kubu Tedjowulan meyakini bahwa seorang pemimpin seharusnya mempunyai kemampuan intelektual dan kepemimpinan tinggi yang telah teruji dalam berbagai kondisi hal ini untuk menunjang perubahan zaman. Dengan klaim ini maka diyakini bahwa Tedjowulan sah menjadi seorang Raja dengan bekal pengalaman dalam bidang militer yang telah menempanya menjadi pribadi yang unggul. Dalam hal ini dapat dilihat relasi kuasa antara dua pihak tersebut sehingga teretuslah perdamaian dalam sebuah rekonsiliasi. Terwujudnya nota kesepahaman antar dua belah pihak untuk bersama mewujudkan perdamaian Keraton Surakarta.

Seiring berjalannya waktu dan keinginan dari berbagai pihak untuk mengakhiri perseteruan demi mengembalikan kondisi keraton yang kondusif. Oleh karena itu setelah melalui proses negosiasi oleh perwakilan dua kubu pada 11 Mei 2012 akhirnya diputuskan menggunakan istilah Dwitunggal. Sistem Dwitunggal yang disepakati kemudian disahkan dalam proses penandatanganan perjanjian rekonsiliasi dan nota kesepahaman oleh Tedjowulan dan Hangabeni. Sehingga diambil keputusan bahwa Hangabeni menjabat sebagai Paku Buwana XIII dibantu oleh Tedjowulan sebagai Maha Menteri. Untuk mencapai keputusan ini maka dapat dianalisa menggunakan istilah Lukes (2005: 25) sedang memperlihatkan kenyataan bahwa dua pihak yang sedang berdialog memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan yang berbeda ini kemudian dipertemukan saat proses pengambilan keputusan, sehingga muncul proses negosiasi antar pihak-pihak yang berkepentingan. Dari

proses negosiasi diperoleh suatu tujuan alternatif yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses relasi kekuasaan.

Kesepakatan berupa nota kesepahaman dan penandatanganan rekonsiliasi ini ditujukan untuk mencapai tujuan alternatif yang dilaksanakan oleh kubu Hangabeni dan Tedjowulan. Pemahaman klaim kebenaran mengenai raja yang dianggap sah diawali dari tokoh dalam tataran Gusti atau putra-putri kerajaan yang bersentuhan langsung dengan konflik yang sedang berlangsung. Para Gusti yang mempunyai strata atau kedudukan yang lebih tinggi daripada sentana dalem maka mampu mempengaruhi pemikiran sentana dalem terlebih konsep *Manunggaling Kawula Gusti* yang mengikuti kehendak gustinya. Sehingga pemahaman tersebut menyebar dalam kalangan sentana dalem yang merupakan keluarga kerajaan. Tidak terlepas abdi dalem yang mengabdikan hidupnya di Keraton yang bersentuhan langsung dengan para sentana dalem mendapatkan doktrin mengenai raja yang dianggap sah menurut klaim dari masing-masing kubu.

Relasi kuasa yang terbangun membawa pemahaman mengenai klaim kebenaran raja yang dianggap sah hingga pada lini yang paling rendah yaitu abdi dalem. Sehingga menciptakan polarisasi dari masing-masing kubu mengenai raja yang dianggap sah. Hal ini mengakibatkan kondisi keraton menjadi terbagi menjadi dua kubu pada masa sebelum rekonsiliasi dan menjadi tiga kubu pada masa setelah rekonsiliasi.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini untuk perbaikan dan kemajuan kaidah keilmuan sosial khususnya berkaitan sosiologi politik sebagai berikut :

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggali relasi kuasa yang terdapat dalam kubu Hangabeni, yang saat ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari pihak luar dalam hal pengambilan keputusan. Sehingga dapat diketahui proses pengambilan keputusan dari pihak Hangabeni.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih mengenai materiil kekuasaan yang terwujud dalam benda-benda dan upacara adat sehingga dapat diketahui pandangan ilmiah mengenai keberadaannya. Hal ini akan sangat menarik diteliti, sehingga akan diketahui komponen keraton yang selama ini masih sulit untuk diuraikan dapat dipelajari secara logika ilmiah.
- c. Untuk mencapai keharmonisan Keraton Surakarta diharapkan masing-masing pihak mengalahkan egonya sehingga akan tercapai kesepakatan yang mengarah pada tujuan bersama. Kesepakatan tersebut untuk melestarikan keraton sebagai warisan budaya dan mengembalikan citra Keraton Sur

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. (2006). *Language and Power Exploring Political Culture in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.
- Antlöv H, C. S. (2011). *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintah Otoriter*. Yayasan Obor Indonesia.
- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (Des, 1962). Two Faces of Power. *The American Political Science Review Volume 56, Issue 4*, 947-952.
- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power. *Behavioral Science*, 201.
- Dari, R. W. (2009). *Peran Public Relations dalam Mempertahankan Citra Positif Keraton Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Eviana, R. (2012). *Konflik Raja Kembar Kasunanan Surakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial.
- Fadzar Alimin, T. M. (2007). Dinamika psikologis pengabdian abdi dalem Keraton Surakarta pascasar suksesi. *Indigeneous Jurnal Berkala Psikologis*, 26-36.
- Giddens, A. (1972). *Politics and Sociology in the Thought of Max Weber*. London: The Macmillan Press.
- Giddens, A. (1995). *Politics, Sociology, and Social Theory*. California: Stanford University Press.
- Lombard, D. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu. Jilid 3. Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View Second Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Moedjanto, G. (1987). *Konsep kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh raja-raja Mataram*. Kanisius.
- Nurchayyo, R. J. (2016). Peranan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Abdi dalem. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 77-87.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Soeratman, D. (2000). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

- Sudaryanto, A. (2008). Hak dan Kewajiban abdi dalem dalam pemerintahan keraton Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 163-177.
- Susanto, L. H. (2010). *Pemangku Budaya yang Berwawasan Nusantara*. Surakarta: Aditya Communication.
- Utomo, M. (2004). *Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat*. Surakarta: Solopos.
- Wirabhumi, E. (2004). *Mas Behi, Angger-angger dan Perubahan Zaman*. Surakarta: Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Keraton Surakarta.
- Wirabumi, E. (2004). *Hanya Satu Catatan Tahun Pertama di Atas Tahta*. Surakarta: Yayasan Pawiyatan Kebudayaan Keraton Surakarta.

